



UNIVERSITAS INDONESIA

**GERAKAN SEPARATIS MUSLIM PATTANI
DI THAILAND SELATAN:
“Permasalahan dan Prospeknya”**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

HERIZAL APRIYANDI, S.In

NPM : 0806448680

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEGIK INTELIJEN**

**JAKARTA
DESEMBER 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : HERIZAL APRIYANDI, S.In

NPM : 0806448680

Tanda Tangan :



Tanggal

: 7 JANUARI 2011

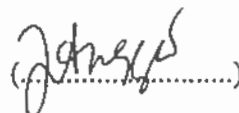
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Herizal Apriyandi, S.In
NPM : 0806448680
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan
Kajian Stratejik Intelijen
Judul Tesis : GERAKAN SEPARATIS MUSLIM PATTANI
DI THAILAND SELATAN: Permasalahan dan
Prospeknya

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister of Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

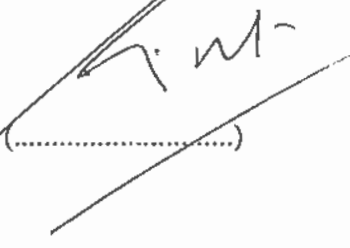
Ketua Sidang : Joko Kusnanto Anggoro, Ph.D


(.....)

Pembimbing : Dr. R. Siti Zuhro, MA


(.....)

Penguji : Makmur Keliat, Ph.D


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. R. Siti Zuhro MA, selaku pembimbing tesis yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan, membantu dalam bimbingannya, mengoreksi dan memberikan masukan-masukan yang penting bagi kesempurnaan tesis ini.

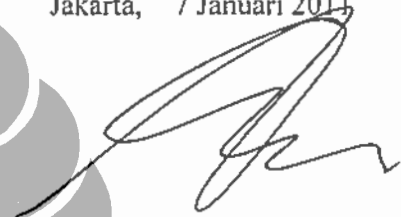
Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Dra. F. Iriani Sophiaan Yudoyoko M.Si, selaku Ketua Program Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah banyak membantu saya selama mengikuti pendidikan S2 Intelijen, beserta Bapak Eddy Faisal dan Wing Wiryawan selaku staff Sekretariat Program Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan dorongan baik itu berupa perhatian dan selalu mengingatkan demi selesainya pembuatan tesis.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada bapak Makmur Keliat, Ph.D selaku penguji dan pembaca ahli, yang senantiasa mengoreksi dan memberikan masukan-masukan penting demi sempurnanya tulisan dan demi akurasinya tulisan ini, dan bapak Kusnanto Anggoro yang telah memimpin sidang tesis penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Muhammad Saleh Amar yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan motivator untuk penulis melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi. Kepada Ibunda Tati Suryati yang selalu dengan penuh kesabaran memberikan dorongan dan motivasi dan berdoa sepanjang malam untuk kesuksesan penulis. Kepada teteh Salita Dewi Ariyanti yang selalu menyemangati dan mendoakan saya agar dapat segera menyelesaikan studi. Kepada atasan saya dan rekan-rekan kerja yang telah mensupport kelancaran pelaksanaan penelitian.

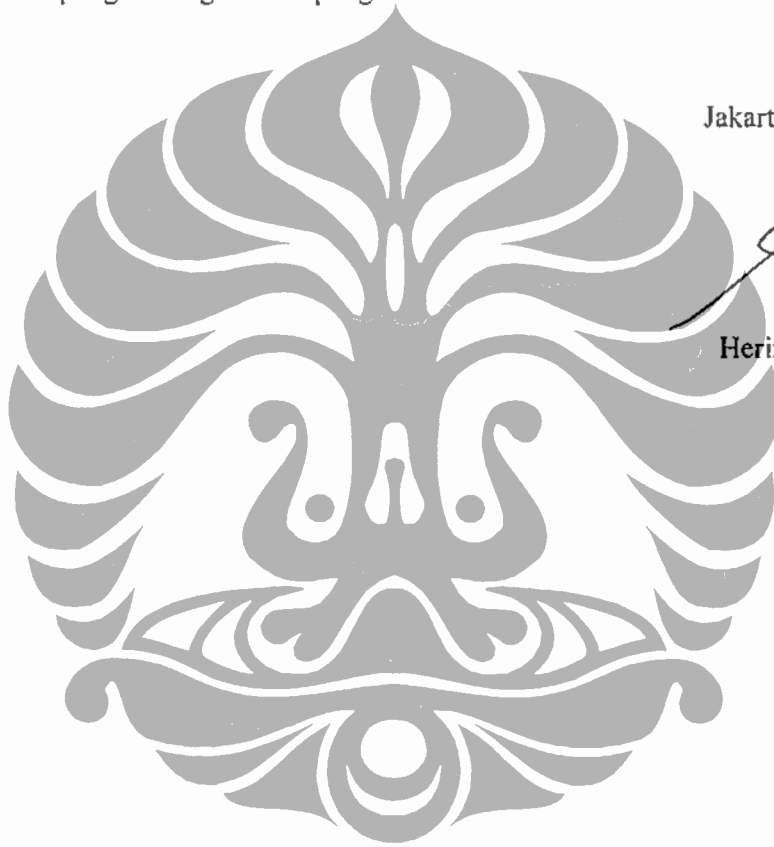
Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan S2 Kajian Strategik Intelijen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kepada teman-teman dan sahabat karib saya Mario Tetuko Hasiholan, Herwandy, Irwan Effendi, Irwan Syumanjaya, Bang Mipo, Bang Bambang, Ernezh Alvian, Faisal, Romi, bang Hendra, Kim, dan lain-lain yang telah menghibur penulis di kala jenuh dan selalu mensupport agar penulis segera menyelesaikan studi.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bisa membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 7 Januari 2011



Herizal Apriyandi, S.In



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herizal Apriyandi
NPM : 0806448680
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan
Kajian Strategik Intelijen
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

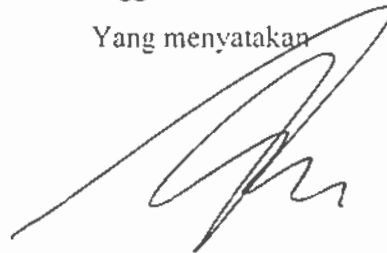
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Gerakan Separatis Muslim Pattani di Thailand Selatan: Permasalahan dan Prospeknya**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Januari 2011

Yang menyatakan



(HERIZAL APRIYANDI, S.In)

ABSTRAK

Name : Herizal Apriyandi
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional,
kekhususan Kajian Intelijen Stratgis

Judul Tesis :
Gerakan Separatis Muslim Pattani di Thailand Selatan: Permasalahan dan Prospeknya

Sejak proses Integrasi wilayah kerajaan Pattani ke dalam wilayah kerajaan Thailand, pergolakan di wilayah Thailand Selatan yang notabene merupakan bekas wilayah kerajaan Pattani terus menerus berlangsung. Perbedaan kultur antara masyarakat Muslim Melayu minoritas di Thailand Selatan dengan masyarakat Thai-Buddhis yang mendominasi wilayah Thailand menjadi penghambat proses integrasi. Kebijakan pemerintah kerajaan Thailand yang cenderung bersifat asimilatif dan diskriminatif terhadap kultur dari masyarakat Muslim Melayu di wilayah Thailand Selatan juga menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik. Pada akhir tahun 1990an, pemerintah kerajaan Thailand sepertinya telah berhasil meredam gejolak separatisme dan aksi-aksi terorisme di wilayah Thailand Selatan. Namun sejak awal tahun 2004, Thailand Selatan kembali menjadi sorotan karena adanya peningkatan siklus konflik di wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat. Permasalahan Kultural dan peningkatan jumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan militer Thailand telah membangkitkan amarah dan memancing aksi-aksi kekerasan oleh para separatis Muslim Thailand Selatan. Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan kritisi: Konflik apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kekerasan kembali mengalami peningkatan? Bagaimana pemerintah Thailand seharusnya mengatasi konflik tersebut? Hal inilah yang akan penulis coba bahas dalam studi ini.

Kata Kunci: Separatisme, Muslim Pattani, Thailand Selatan

ABSTRACT

Name : Herizal Apriyandi
Study Program : National Defense Studies, Speciality in Study of
Strategic Intelligence
Title of Thesis :
**Moslem Pattani's Separatism Movement in
Southern Thailand: The Problems and Prospect**

Muslim separatists were active in the southern region of the Thailand from the 1940s until the late 1980s. At the end of the 1990s, however, it seemed the Kingdom had solved its insurgency problem. The terrorism and political violence in the southern provinces was waning. In the past three years, however, southern Thailand has seen a recrudescence of long-dormant Malay-Muslim anger against the central government. The internal security situation in the country's southernmost provinces has rapidly worsened and worries are arising that the country will become another hotspot of Islamist terrorism in Southeast Asia. Cultural insensitivity and an increasing number of human rights violations committed by the police and the military have provoked fear and anger and strengthened the cause of the insurgents. This raises some critical questions: What is the conflict about? Why is violence rising? Who is behind the violence? How can Thailand counter this new wave of insurgency?

Keyword: Separatism, Pattani, Southern Thailand.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Batasan Penelitian.....	11
1.6 Hipotesis.....	12
1.7 Model Operasional Penelitian.....	12
1.8 Sistematika Penulisan.....	12
2. GERAKAN SEPARATIS MUSLIM PATTANI: BEBERAPA TINJAUAN TEORITIS.....	13
2.1 Teori Minoritas.....	13
2.2 Teori Politik Identitas	19

2.3 Teori Keadilan.....	24
2.4 Teori Deprivasi Relatif.....	26
2.5 Teori Konflik.....	28
2.6 Teori Integrasi Nasional.....	31
2.7 Konsep Self Determinasi dalam gagasan Sovereignty.....	32
3. DINAMIKA SEPARATISME DI THAILAND SELATAN.....	42
3.1 Gambaran Umum Wilayah Thailand.....	42
3.2 Gambaran Umum Wilayah Thailand Selatan.....	47
3.3 Muslim Pattani.....	51
3.4 Insiden dan Konflik Pemerintah dengan Muslim Pattani.....	67
4. ANATOMI GERAKAN SEPARATISME MUSLIM PATTANI, RESPON PEMERINTAH DAN PROSPEK KONFLIK DI THAILAND SELATAN.....	75
4.1 Anatomi Gerakan Separatisme Muslim Pattani di Thailand Selatan.....	75
4.2 Kebijakan Pemerintah Thailand Terhadap Eksistensi Muslim Pattani dan Implikasinya	98
4.3 Faktor-faktor Penyebab Gagalnya Kebijakan Pemerintah Thailand...	110
4.4 Prospek Konflik dan Analisa Future Trend.....	112
4.5 Resolusi Konflik.....	121
5. PENUTUP.....	127
5.1 Kesimpulan.....	127
5.2 Saran.....	128

DAFTAR REFERENSI	130
-------------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Gambar Peta Wilayah Thailand.....	42
Gambar 3.2	Gambar Peta Wilayah Thailand Selatan	48
Gambar 3.3	Bekas Wilayah Kerajaan Pattani.....	51
Gambar 4.1	Pola Skenario Prospek Konflik di Thailand Selatan.....	116

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Jumlah Korban Tewas dan Luka-luka Per Tahun.....	68
Diagram 3.2	Jumlah Insiden di Thailand Selatan 2004-2010.....	69
Diagram 3.3	Perbandingan Jumlah Insiden di Thailand Selatan.....	70
Diagram 3.4	Jumlah Korban Berdasarkan Agama.....	71
Diagram 4.1	Pertumbuhan Ekonomi di Thailand Selatan.....	76
Diagram 4.2	Insiden Pengeboman Tahun 2004-2009.....	95
Diagram 4.3	Perbandingan Korban Januari 2004-Januari 2010.....	96
Diagram 4.4	Persentase Korban Berdasarkan Pekerjaan.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Muslim di Wilayah Thailand Selatan.....	49
Tabel 4.1	Pendapatan per Kapita Yala, Pattani dan Narathiwat.....	77
Tabel 4.2	Faksi Organisasi Separatis di Thailand Selatan.....	81
Tabel 4.3	Daftar Kebijakan Pemerintah Thailand.....	100

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik di Thailand Selatan sangat kental dengan nilai-nilai agama. Banyak yang melihat konflik ini merupakan pertarungan antara Muslim Melayu dan buddhis Thai. Kata 'Muslim' dan 'buddhis' mengarahkan pada kuatnya pengaruh agama dalam masing-masing masyarakat. Konflik di Thailand Selatan berawal dari sejarah panjang kerajaan Pattani dan kerajaan Siam. Etnonasionalisme pada masyarakat Muslim melayu di Thailand Selatan sudah muncul sejak pemerintah Thailand memasukkan daerah Pattani Raya ke dalam negara Thai pada tahun 1902, telah berulang kali terjadi protes dan pemberontakan melawan kekuasaan pemerintah Thailand. Faktor utama yang telah membantu mendukung separatisme Melayu-Muslim Pattani adalah etnisitas dan solidaritas keagamaan. Kedua faktor itu juga membedakan mereka dari bagian utama penduduk Thailand. Islam dan etnisitas Melayu digunakan untuk memobilisasi rakyat minoritas menentang campur tangan pemerintah dalam urusan masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan¹.

Ketegangan, konflik dan perang antara kerajaan Pattani dan kerajaan Siam memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya kedua kerajaan tersebut hidup damai, namun pada abad 18 konflik muncul, diawali dengan berdirinya kerajaan Bangkok yang secara agresif menggantikan pemerintahan kerajaan Ayuthaya. Pada waktu itu konflik dan perang berkisar seputar penaklukan wilayah, kemudian berkembang secara sistematis terutama pada saat pemerintahan Raja Chulalongkorn yang sangat dipengaruhi dengan pemahaman barat tentang nasionalisme dan nation-state model. Kerajaan Pattani kemudian dipersatukan ke dalam kerajaan Siam sebagai sebuah negara yang baru².

¹ Adi Saputra dan Syahril Syarbaini, "Sebab-sebab Munculnya Konflik Separatis di Thailand Selatan" diakses dari <http://jurnal.budiluhur.ac.id/?p=231> pada tanggal 3 Oktober 2010.

² Cf. Serajul Islam. "The Islamic Independence Movements in Pattani of Thailand and Mindanao of the Philippines." *Asian Survey*, 38 (1998), h. 441-456

Pada kasus Muslim-Melayu di Thailand Selatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Muslim Pattani ini mereka telah mengalami sejarah yang represif, mereka dilarang berbicara dan mempelajari bahasa Muslim-Melayu, bahkan mereka dilarang untuk mempelajari budaya dan sejarah mereka baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan bekerja³. Muslim Pattani memiliki identitas etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk (dan juga pemerintah) Thailand. Muslim memiliki bahasa Melayu dan beragama Islam, dua identitas budaya dan agama yang menjadi bagian dari bangsa Pattani. Mereka selama ratusan tahun terbentuk dalam kerajaan Islam Pattani. Kuatnya identitas lokal keislaman dan kemelayuan ini mendorong banyak intelektual Thailand untuk menggagas status otonomi Thailand Selatan, khususnya di tiga provinsi: Pattani, Yala dan Narathiwat, atau dalam banyak istilah sejarah ketiga provinsi ini disebut "Muslim Pattani"⁴. Identitas ini sangat dekat dengan etnisitas Aceh yang tidak sekedar memiliki status Daerah Istimewa, tetapi otonomi khusus dengan peran dan hak lebih besar bagi pemerintah lokal atas kekayaan sumber daya alam. Otonomi luas barangkali solusi bagi Muslim Pattani untuk menentukan arah ekonomi dan politik wilayahnya di bawah kekuasaan pemerintah pusat Thailand. Tetapi ide otonomi nampaknya belum menjadi agenda pemerintah pusat. Seandainya wacana dimunculkan kalangan intelektual, muncul banyak kekhawatiran atas sikap tanggapan yang tidak fair dan berlebihan bahwa otonomi bisa dijadikan jembatan menuju kemerdekaan. Partai Demokrat yang menekankan secara persatuan dan kesatuan di negara Thailand pun tidak dapat berbuat banyak dalam perdamaian di Thailand Selatan, khususnya dalam mendukung kepentingan Muslim. Hal ini menjadi sebuah isu politik yang penting untuk diperhatikan oleh pihak politisi yang memainkan isu politik di Thailand Selatan untuk kepentingan mereka. Partai Thai Rak Thai yang dalam periode Thaksin memenangi parlemen secara

³ Ahmad Suaedy, *"The Muslim Minority Movement in South Most Thailand: From The Periphery to The Center"* Wahid Institute, 2009. h.2.

⁴ "Muslim Pattani" merupakan sebutan untuk kelompok masyarakat Muslim di wilayah Thailand Selatan (Yala, Pattani dan Narathiwat, dan selanjutnya untuk penyebutan masyarakat Muslim di ketiga wilayah di Thailand Selatan tersebut akan menggunakan istilah "Muslim Pattani"

sengaja meninggalkan Selatan dalam proses pembangunan dan modernisasi Thailand secara umum. Bahkan cenderung membiarkan kerusuhan di Selatan. Kerusuhan yang muncul dipelihara oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Di antara mereka adalah aparat pemerintah. Berlanjutnya kerusuhan akan mendapatkan budget lebih besar bagi rehabilitasi dan pembangunan lainnya.

Sejak terjadinya perampokan dan penyerangan gudang persenjataan militer di wilayah Thailand Selatan pada 4 Januari 2004, konflik separatisme berdarah terus memanas. Peristiwa itu sendiri menewaskan empat tentara dan lebih dari 300 persenjataan berbahaya dibawa kabur. Kejadian ini terang membuka kembali konflik pemerintah dengan kelompok separatis di Thailand Selatan⁵. Setelah peristiwa itu Thaksin menetapkan propinsi perbatasan selatan sebagai daerah darurat perang (*martial law*) dan karena itu menambah kekuatan militer. Namun hari-hari setelah pemberlakuan darurat perang itu korban terus berjatuhan silih berganti dari kedua belah pihak. Pemberlakuan darurat perang itu bukannya mengurangi polemik, justru menjadikan wilayah selatan ke dalam siklus kebiadaban dan saling bunuh hampir setiap hari dengan korban dari pihak tentara, polisi, pegawai pemerintah, kelompok Muslim separatis dan juga para bhikkhu Buddhis. Hal lain yang menambah kerumitan adalah pada 12 Maret 2004 seorang pengacara Muslim terkemuka, Somchai Neelapaijit⁶ diculik dan tidak diketahui rimbanya hingga sekarang.. Suasana saling bunuh, *zero sum game* hingga hari ini masih terus terjadi di Thailand Selatan.

Dalam perkembangannya saat ini, pasca kekerasan pada tahun 2004, terjadi pergeseran dalam pergerakan masyarakat Muslim Thailand Selatan, yang semula hanya berupa gerakan-gerakan kecil yang menuntut keadilan dan pemberantasan diskriminasi, kebebasan berbicara serta tuntutan kebangkitan budaya tradisional dan bahasa Muslim-melayu, sekarang meningkat menjadi

⁵ Angel M. Rabasa, "Political Islam in Southeast Asia: Moderates, Radicals and Terrorists", *Adelphi Paper* 358, 2003, h. 55.

⁶ Somchai merupakan pengacara yang gigih membela para penduduk "Muslim Pattani" yang ditahan. Somchai diduga oleh Pemerintah Kerajaan Thailand sebagai anggota Jamaah Islamiyah.

tuntutan untuk memperkuat "*civil society*". Mereka mulai meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebudayaan dan Hak Asasi Manusia, terlibat dalam wacana dan debat politik di lingkungan publik, serta mulai terlibat dalam negosiasi *vis a vis* pemerintah pusat dan pergerakan sosial⁷. Dalam melakukan pergerakan sosial tersebut mereka memanfaatkan momentum tuntutan akan demokratisasi dan efek globalisasi yang notabene meningkatkan tekanan internasional akan kasus mereka.

Respon pemerintah kerajaan Thailand atas apa yang terjadi di Thailand Selatan sangat lamban dan terkesan tidak serius, meskipun pemerintah Thailand sudah cukup persuasif dengan menjalankan beberapa program agenda nasional seperti menyediakan sekolah gratis dan membangun beberapa infrastruktur. Masyarakat Muslim Pattani di selatan menganggap program ini secara umum sebagai upaya untuk mensupport asimilasi dan pemberantasan sejarah, budaya dan bahasa Muslim-Melayu. Program tersebut di anggap hanya merupakan kelanjutan dari cara pandang yang eksklusif dalam melihat identitas nasional. Mereka menganggap bahwa pemerintah Thailand masih cenderung memahami nasionalisme dalam konteks nasionalisme statis yaitu dimana hanya ada satu identitas nasional dan tidak menghiraukan adanya perbedaan kultural dalam tingkat nasional. Jika respon pemerintah Thailand terhadap situasi tersebut lambat dan tidak ada perubahan yang berarti, dikhawatirkan akan muncul kembali tindakan insurgensi, upaya separatis serta aksi kekerasan yang lebih intens, sehingga sangat diperlukan adanya pengawasan komunitas internasional.

Gerakan nasionalisme Melayu ini hanya terdapat di Muangthai (Thailand) di luar semenanjung Malaya. Ini disebabkan karena mereka adalah suku Melayu atau merasa jati dirinya adalah suku Melayu yang berdekatan dengan negara dari pusat nasionalisme melayu di semenanjung Malaya. Secara kultural, mereka tergolong ke dalam alam budaya Melayu Raya, tetapi mereka tinggal di daerah yang merupakan bagian dari wilayah negara-bangsa Thai yang beragama Budha. Konflik yang terjadi sejak tahun 1903 ini merupakan akibat dari wujud perjuangan berkepanjangan kelompok separatis

⁷ Ahmad Suaedy, Op. Cit, h.5-6

di Thailand Selatan yang menuntut sebuah negara merdeka atau otonomi secara khusus dari Thailand bagi minoritas Muslim di Thailand Selatan.

Kelompok gerakan separatis berupaya memperjuangkan kemerdekaan bagi keempat provinsi tersebut sebagai akibat dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh mayoritas Thai-Buddhis terhadap minoritas Melayu-Muslim. Hal tersebut melalui program-program pemerintah Thailand seperti pembaruan administratif, proses asimilasi satu bangsa yaitu bangsa Thai (Pemerintah Thailand), ketimpangan dan kesenjangan ekonomi akibat eksploitasi pemerintah pusat di samping adanya pengaruh gejolak politik regional dan internasional yang semakin memperkeruh suasana kehidupan bermasyarakat.

Kondisi tersebut semakin menggenaskan karena pemerintah Thailand memaksakan diri melalui konsep negara modern dengan ideologi Buddhisme dan militeristik⁸. Kegagalan pemerintah Thailand dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan dasar rakyatnya telah mengecewakan sebagian pihak, khususnya kaum Melayu-Muslim, yang akhirnya memicu timbulnya konflik separatis antara pemerintah Thailand dan kelompok gerakan separatisme di Thailand Selatan.

Kebijakan represif pemerintah terhadap kelompok separatis di Thailand Selatan, lama kelamaan melahirkan perasaan traumatik tersendiri di kalangan umat Islam yang tinggal di daerah konflik. Sekalipun penganut Islam kini gampang ditemui di Bangkok karena terdapat setengah juta penganut Islam di sana dan juga Muslim keturunan China di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara bukan berarti integrasi mereka terhadap nasionalisme Thailand dalam tataran yang sepadan. Kaum Muslim di Bangkok dan di Chiang Mai berbeda persepsi tentang integrasi terhadap bangsa Thailand dengan kaum Muslim di Selatan. Kaum Muslim Selatan didorong intensi kultural mereka yang kental, menuntut hak-hak kultural mereka seperti pemakaian bahasa

⁸ Chidchanok Rahimmula, "Peace Resolution: A Case Study of Separatist and Terrorist Movement in Southern Border Provinces of Thailand," dalam S. Yunanto, *et. al*, *Militant Islamic Movements in Indonesia and Southeast Asia*, Jakarta: FES and The RIDEP Institute, 2003, h. 263-277.

Melayu (Yawi) diakui pemerintah. Tuntutan demikian ini jarang terdengar dari kalangan Muslim di luar wilayah konflik di Selatan⁹.

Terkait dengan situasi di Thailand Selatan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dinilai sebagai kegagalan Pemerintah Thailand, keinginan pemerintah nasional untuk mengintegrasikan seluruh wilayahnya ke dalam sebuah sistem negara yang berdasarkan ajaran Budha dan pemaksaan terhadap masyarakat Muslim di Thailand Selatan inilah yang menjadi akar konflik tersebut. Selain itu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Thailand pun cenderung represif dan justru menimbulkan reaksi perlawanan, adapun langkah-langkah yang dinilai gagal tersebut antara lain di antaranya Thailand mendirikan apa yang disebut *Southern Border Province Peace Building Command*, atau SBPPBC. Pada realitanya, hal ini hanya membuat pendekatan kekerasan “terkoordinasikan” dengan baik antara tentara dan pihak kepolisian Thailand. Pendekatan kekerasan ini semakin diperkuat dengan langkah memperkuat posisi politik tentara dalam Undang-Undang (UU). Kebijakan tersebut diperkuat dengan kebijakan selanjutnya yakni penambahan jumlah tentara di daerah perburuan teroris, termasuk di Yala, Pattani, dan Narathiwat. Pemerintah Thailand juga memperkenalkan kode warna dalam penyaluran bantuan keuangan kepada para penduduk di Thailand Selatan. Kebijakan ini, selain terkesan diskriminatif, juga menempatkan posisi rakyat sebagai objek yang harus dicurigai. Padahal dalam teori demokrasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, mestinya menjadi pihak yang mengawasi (mencurigai) pemerintahnya. Pemerintah Thailand juga mendirikan sebuah komisi khusus yang bertugas merancang strategi dan penanganan teroris. Komisi yang diberi nama *Reconciliation Commission* ini diketuai oleh bekas Perdana Menteri Thailand, Anand Panyarachun. Kenyataan yang kini terjadi di selatan Thailand adalah bahwa aksi-aksi “terorisisme” semakin meningkat. Dalam bahasa strategik, pemerintah Thailand mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu, disebabkan oleh kegagalan pemerintah Thailand dalam mengidentifikasi

⁹ Gilquin, Michael, “*The Muslims of Thailand*” diakses dari http://i-epistemology.net/attachments/918_ajiss24-2-stripped%20-%20Book%20Reviews%20-%20The%20Muslims%20of%20Thailand.pdf pada tanggal 3 Oktober 2010.

secara tepat akan kelompok yang harus bertanggungjawab dalam mendalangi aksi teroris di Thailand.

Selain itu, kegagalan pemerintah Thailand dalam menangani terorisme, disebabkan oleh lemahnya dukungan masyarakat setempat. Kegagalan ini, memunculkan fenomena *antagonix-strategy*, yang disebabkan oleh terjadinya persilangan persepsi antara pemerintah (pemburu teroris) dengan masyarakat (yang sebagiannya merupakan pihak yang diburu). *Antagonix-strategy* itu sendiri terjadi karena kegagalan pemerintah Thailand dalam menetapkan pendekatan penanganan. Secara empirik, masyarakat di Krisek dan Takbai misalnya, tidak senang dengan gaya penangan yang dilakukan oleh pihak tentara dan polisi Thailand.

Gagalnya kebijakan-kebijakan tersebut disebabkan karena ketiadaan *political will* pemerintah Thailand dalam mewujudkan otonomi khusus di Thailand Selatan. Hal ini terjadi, karena pemerintah Thailand kurang memahami akar persoalan lahirnya aksi-aksi terror di Thailand Selatan secara historis. Dalam kasus Thailand Selatan, secara historis pemerintah Inggris mesti ikut bertanggungjawab. Sebab, wilayah Thailand selatan yang mayoritas Muslim itu, sebelum dipisahkan oleh Inggris dan Belanda pada awal abad 20, dulunya merupakan satu "Karesidenan" dengan wilayah Kelantan, Malaysia. Sehingga, menafikan keberadaan hubungan ideo-sosiologis antara kedua wilayah beda negara tersebut, akan terus jadi "duri dalam daging" bagi pemerintah Thailand, juga bagi pemerintah Malaysia.

Situasi represif yang berlansung sejak lama terhadap masyarakat Muslim-Melayu di Thailand Selatan telah menempatkan mereka pada posisi terluar dalam politik nasional, bahkan beberapa ahli menyebut mereka dengan sebutan "penduduk kelas kedua" jika dibandingkan dengan mayoritas bangsa Thai atau Siam, bahkan sampai saat ini pemerintah Thailand masih memandang bahwa tiga provinsi mayoritas Muslim di wilayah selatan tersebut sebagai tanah jajahan dan tidak setara dengan provinsi lainnya. Tendensi dari pemerintah Thailand untuk mempersatukan identitas nasional tanpa memperhatikan keunikan budaya telah memunculkan advokasi dari nasionalisme etnis untuk menciptakan identitas Muslim-Melayu sebagai reaksi

atas penetrasi negara dan pemaksaan akan persamaan. Nasionalisme etnis merupakan strategi yang flexibel yang digunakan oleh masyarakat Muslim-melayu untuk berusaha membebaskan diri dari tindakan represif negara. Hal ini membuat mereka mengambil “jalan tengah” yaitu dengan cara mengadopsi strategi “*war of position*”.

Kasus Muslim minoritas di Xinjiang dan Guangdong memiliki karakteristik tersendiri, Muslim minoritas di Xinjiang cenderung mengambil posisi terpisah sedangkan Muslim di Guangdong cenderung mengarah pada integrasi. Posisi terpisah berarti kelompok tersebut menerima anggapan perbedaan persepsi akan identitas nasional dan cenderung bertindak resisten dan memberontak, sedangkan kelompok yang mengambil langkah integrasi berarti menyetujui untuk bergabung secara penuh dengan identitas nasional negara dan menjadi bagian dalam struktur sosial dan politik negara tersebut. Ada dua kasus, jika pemerintah memberikan kesempatan yang sama dalam mobilisasi politik dan ekonomi kepada elit politik dan seluruh penduduk mendapat perlakuan yang sama maka kelompok minoritas akan cenderung mengambil jalan integrasi, namun sebaliknya jika pemerintah membatasi dan menerapkan perlakuan yang diskriminatif maka kelompok minoritas akan cenderung memilih posisi terpisah¹⁰.

Pada kasus di Thailand Selatan, janji pemerintah pusat akan persamaan kesempatan dalam mobilisasi politik dan ekonomi serta perlakuan yang sama kepada seluruh penduduk bukanlah penyebab minoritas Muslim-melayu di Thailand Selatan untuk mengadopsi “jalan tengah”, tetapi “jalan tengah” yang di ambil disini lebih mengarah pada fakta bahwa minoritas Muslim-melayu tersebut menggunakan prosedur demokrasi dan hukum, baik melalui jalur hukum, politik, budaya, maupun jalur komunikasi publik. “Jalan tengah” ini termasuk sebagai contohnya meminta perubahan legislasi dan amandemen konstitusi. Rujukan pada HAM sebagai fondasi dari perjuangan dan tujuan yang akan dicapai juga merupakan sebuah indikator dari “jalan tengah”. di bandingkan mengoposisi pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya “jalan tengah” tidaklah semata-mata dikarenakan upaya pemerintah pusat,

¹⁰ Ahmad Suaedy, Op. Cit, h.7.

tetapi kelompok masyarakat pun dapat memaksa munculnya jalan tengah untuk memperoleh keadilan, mobilisasi ekonomi dan politik serta persamaan perlakuan. Tujuan utamanya dapat berupa kebebasan ataupun otonomi yang kelihatannya saat ini terjadi pada pergerakan sosial di Thailand Selatan dan yang perlu di garis bawahi bahwa fenomena ini dapat berubah menjadi sebuah tren.

Perjuangan untuk memperoleh hak khusus bagi masyarakat Muslim di Thailand Selatan berawal dari petisi Haji Sulong . 1947, yang isinya antara lain Thailand Selatan harus dipimpin oleh seorang yang dipilih melalui pemilu secara langsung oleh masyarakat lokal Thailand Selatan, pajak dari Thailand Selatan harus digunakan sepenuhnya untuk membangun wilayah Thailand Selatan dan pemerintah lokal Thailand Selatan harus diberikan wewenang untuk menerapkan syariah. Petisi tersebut direspon dengan penahanan Haji Sulong dan beberapa orang pemimpin Muslim di Thailand Selatan di tahun 1948, dan kemudian dibunuh pada tahun 1958 setelah sebelumnya dibebaskan dan dieulik.

Beberapa perubahan terjadi di tahun 90-an, terutama amandemen konstitusional pada tahun 1997, yang berimplikasi pada proses demiliterisasi dan desentralisasi. Berbagai rekomendasi dari para ahli, observer dan peneliti yang tergabung dalam National Reconciliation Commision (NRC) disampaikan ke pemerintah Thailand, namun belum diterapkan secara efektif.

1.2 Perumusan Masalah

Dinamika konflik di Thailand Selatan menunjukkan bahwa Muslim Thailand Selatan merasa tidak puas terhadap pemerintah Thailand. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Thailand terhadap eksistensi Muslim minoritas di Thailand Selatan masih dilandasi unsur diskriminasi dan rasa tidak percaya dari pemerintah kerajaan Thailand. Atas dasar tersebut beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

- 1.2.1 Gerakan Separatis seperti apakah yang muncul di Thailand Selatan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya?

- 1.2.2 Bagaimanakah respon pemerintah kerajaan Thailand terhadap keberadaan Muslim Pattani dan gerakan separatisme yang mereka lakukan?
- 1.2.3 Bagaimana implikasi dari kebijakan yang diterapkan pemerintah kerajaan Thailand terhadap eksistensi dan aktivitas Muslim Pattani dan prospeknya kedepan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- 1.3.1.1 Memperkaya wawasan mengenai teori-teori konflik, integrasi nasional, multikulturalisme.
- 1.3.1.2 Memahami faktor-faktor yang signifikan dalam penanganan konflik.
- 1.3.1.3 Studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1.3.2.1 Studi ini membahas sejarah gerakan separatis yang muncul di Thailand Selatan.
- 1.3.2.2 Membahas respon pemerintah terhadap gerakan separatis serta kebijakan pemerintah Thailand terhadap kaum "Muslim Pattani".
- 1.3.2.3 Menganalisis secara kritis implikasi kebijakan Pemerintah terhadap masyarakat dan prospeknya ke depan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai upaya penanggulangan konflik separatisme di Thailand Selatan ini diharapkan dapat menjelaskan masalah manajemen konflik yang ada di wilayah Thailand Selatan. Penyelesaian ini dapat menjadi contoh model penanggulangan konflik-konflik sosio-kultural di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat di dalam wilayah Indonesia potensi konflik-konflik bernuansa etnis masih sering terjadi, meskipun memiliki ciri khas yang berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah Thailand Selatan.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian membahas mengenai gerakan separatis Muslim Pattani, dengan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik, faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya pemerintah Thailand Selatan dalam menangani konflik yang ada, serta prospeknya. Penelitian ini juga mencakup analisa terhadap konsep Integrasi Nasional yang dianut oleh Pemerintah Thailand berupa upaya asimilasi seluruh kebudayaan yang ada di Thailand kedalam satu budaya Thai-Buddhism. Kebijakan ini mendapat respon dari kelompok masyarakat Muslim-Melayu di wilayah Thailand Selatan. Mereka yang notabene berasal dari ras dan kultur Melayu dan memiliki rasa nasionalisme etnis Melayu tidak dapat menerima begitu saja upaya asimiliasi tersebut, apalagi langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah Thailand sangat represif.

1.6 Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan maka dirumuskan sebuah hipotesis yaitu:

"Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kerajaan Thailand terhadap Muslim minoritas di Thailand Selatan menjadi kontra-produktif karena kebijakan pemerintah Thailand bersifat asimilatif dan represif serta tidak mengakomodasi kepentingan ras dan agama Muslim minoritas Thailand Selatan"

1.7 Model Operasional Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan metoda analisa kualitatif deskriptif dari berbagai sumber data yang terkait dengan masalah penelitian. Data berasal dari sumber sekunder seperti penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, buku, jurnal, surat kabar, dan majalah, namun jika memungkinkan akan dilakukan pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara via media telekomunikasi terhadap tokoh-tokoh yang terkait dengan permasalahan di Thailand Selatan.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam rangka penulisan tesis ini secara sistematis, akan disajikan sistematika penulisan ini sebanyak lima bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan latangbelakang masalah penelitian, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metoda penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Gerakan Separatis Muslim Pattani: Beberapa Tinjauan Teoritis

Bab ini akan menjelaskan beberapa kajian teori yang mendukung untuk memahami asal mula konflik, penyebab konflik dan prospek konflik. Beberapa teori yang digunakan adalah teori minoritas, teori Politik Identitas, teori Keadilan, teori Deprivasi Relative, teori Konflik dan konsep Integrasi Nasional

BAB III Perkembangan Masalah Separatisme di Thailand Selatan

Bab ini berisi perkembangan masalah yang meliputi gambaran umum wilayah Thailand, dan wilayah Thailand Selatan secara khusus. Pada Bab ini juga akan menguraikan secara historis kerajaan Pattani dan Muslim Melayu Pattani, serta insiden-insiden yang terjadi.

BAB IV Anatomi Gerakan Separatisme Muslim Pattani, Respon Pemerintah Thailand dan Prospek Konflik di Thailand Selatan

Bab ini akan menguraikan secara kritis anatomi gerakan separatisme Muslim Pattani serta kebijakan dan respon pemerintah Thailand terhadap eksistensi Muslim Pattani di Thailand Selatan. Selain itu Bab ini juga akan membahas prospek konflik di Thailand Selatan dengan menganalisis kecenderungannya.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan akhir atas dasar fakta dan data yang terkumpul serta saran.

BAB 2

GERAKAN SEPARATIS MUSLIM PATTANI: BEBERAPA TINJAUAN TEORITIS

Bab ini akan membahas beberapa kajian teori yang mendukung untuk memahami asal mula konflik, penyebab konflik dan prospek konflik. Beberapa teori yang digunakan adalah teori minoritas, teori Politik Identitas, teori Keadilan, teori Deprivasi Relative, teori Konflik dan konsep Integrasi Nasional.

Kebijakan Integrasi Siam terhadap Pattani sebagai awal mula munculnya konflik di Thailand Selatan, harus dilihat secara komprehensif dari latar belakang sejarah terbentuknya nasionalisme dan modernisasi Thai¹¹ pada permulaan abad ke-20. Proses integrasi provinsi-provinsi paling selatan ke kerajaan Thai merupakan proses yang lambat dan sulit. Pada akhir abad 18 Siam menghadapi permasalahan kesadaran akan kebangsaan dan persatuan yang sangat diperlukan untuk menghadapi bahaya kolonialisme. Upaya integrasi ini diharapkan menjadi langkah preventif untuk menghadang semakin meluasnya politik ekspansi kolonial di semenanjung Malaya/Burma dan Perancis di Indochina. Selain itu kebijakan integrasi tersebut berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan nasionalisme Thai karena sebelumnya kerajaan Siam merupakan sekumpulan kerajaan yang persatuannya sangat rapuh.

Berkaitan dengan hal tersebut dibawah ini akan dibahas beberapa teori-teori yang berkaitan erat dengan proses integrasi, kondisi masyarakat serta manajemen konflik di Thailand selatan.

2.1 Teori Minoritas

Keberadaan umat Muslim di Thailand hanya 5,5% dari jumlah penduduk negara tersebut¹². Jumlah umat Muslim ini termasuk kecil bila dibandingkan dengan umat Buddha yang menjadi mayoritas penduduk

¹¹ Thai yang lebih sering disebut Thailand dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa aslinya Mueang Thai (dibaca: "meng-thai", sama dengan versi Inggrisnya, berarti "Negeri Thai")

¹² Syed Serajul Islam, *The Liberation Movement of the Muslims in Thailand*, *AsianProfile*, 28, 5 October 2000, hal.400.

Thailand. Mayoritas dari penduduk Muslim ini berasal dari etnis Melayu dan berada di daerah Thailand Selatan. Seperti halnya kaum minoritas di negara-negara yang lain, kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis masyarakat melayu-Muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Lebih lebih ketika kerajaan melayu dihapuskan pada tahun 1902, masyarakat melayu Pattani dalam keadaan sangat tertekan. Khususnya pada pemerintahan Pibul Songgram (1939-44), orang Melayu telah menjadi mangsa dasar asimilasi kebudayaan. Bahkan sampai saat inipun masyarakat Muslim minoritas Pattani Thailand menghadapi diskriminasi kompleks dan teror yang berlarut-larut. Sehingga kehidupan sosial maupun politik menjadi sangat terbatas. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Nik Anuar, Konflik berkepanjangan di Thailand selatan tak ada bedanya dengan konflik minoritas Muslim di pulau Moro Philipina dengan organisasi MILF.¹³

Keadaan tertekan seperti itu perlu adanya atensi yang lebih dari semua umat Islam untuk membantu secara materi maupun moral demi mewujudkan komunitas Muslim yang berdampingan damai dengan komunitas yang lainnya. Penulis dalam studi ini akan membahas sejarah panjang masuknya Islam di Thailand serta keadaan sosial dan politik minoritas Muslim di daerah konflik, yaitu Thailand bagian selatan. Puncak awal mula dari konflik yang melanda Thailand Selatan adalah akibat diskriminasi yang diterapkan pemerintah Thailand terhadap populasi etnik Melayu-Islam dan tindakan pihak pemerintah Thailand yang beragama Buddha yang ingin memaksa proses asimilasi rakyatnya yang telah berlangsung selama hampir seabad lamanya dan perkembangan teknologi yang canggih dan ledakan teknologi maklumat secara tidak disadari telah menyebabkan konflik ini menjadi lebih sengit.

Sebagai satu-satunya populasi Muslim di negara tersebut, mereka mempunyai identitas etnik yang berbeda dengan bangsa lain di Thailand. Keberadaan masyarakat Melayu-Muslim di Thailand, berpusat di wilayah

¹³ Mohd. Zamberi A. Malek. 1994. Pattani Dalam Tamadun Melayu. Dewan bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Pattani Raya yang merupakan suatu kerajaan independen hingga tahun 1786 ketika Pattani dikuasai oleh Raja Siam dan dinasti Muslim disana dihilangkan. Bila dilihat secara kultural, wilayah Pattani ini masuk dalam budaya Melayu Raya karena dahulu kerajaan Pattani menguasai kawasan Malaka dan telah memiliki akar budaya Melayu didalamnya.

Adanya perbedaan etnis dari kerajaan siam dan kerajaan Pattani telah menjadi akar konflik yang menyulitkan proses integrasi Thailand, terlebih dalam perjalanan sejarahnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Thailand cenderung kontra produktif bahkan situasi berkembang menjadi konflik separatisme. Konflik separatisme biasanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang berada dalam kondisi minoritas, terdifferensiasi dari kondisi umum masyarakat dalam suatu negara, misalnya kelompok minoritas etnis, kelompok yang terbelakang secara ekonomi dan kelompok yang tertekan secara politik. Kelompok-kelompok inilah yang berpotensi besar akan meningkatkan gerakan sosialnya menjadi sebuah aksi separatisme¹⁴.

Keberadaan etnis Muslim-melayu di Thailand Selatan yang notabene merupakan kelompok minoritas di wilayah Thailand secara keseluruhan. Dari kaca mata sosiologi, yang dimaksudkan dengan minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut¹⁵: (1) anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka; (2) anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan "rasa kepemilikan bersama", dan mereka memandang dirinya sebagai "yang lain" sama sekali dari kelompok mayoritas; (3) biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar. Kelompok minoritas atas tiga yaitu: (1) gerakan-gerakan sosial baru yang meliputi gerakan kaum homoseksual (gay dan lesbi), kaum miskin kota, para penyandang cacat, feminis, kelompok-kelompok atau aliran kepercayaan dan agama "baru", dll; (2) minoritas-minoritas nasional yang meliputi suku-suku

¹⁴ Adi Saputra dan Syahril Syarbaini, "Sebab-sebab Munculnya Konflik Separatis di Thailand Selatan" diakses dari <http://jurnal.budihur.ac.id/?p=231> pada tanggal 3 Oktober.

¹⁵ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship*, Oxford University Press, 1995.

bangsa yang dulunya berdiri sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri-sendiri namun kemudian melebur menjadi satu negara (dan “bangsa”); dan (3) kelompok-kelompok etnis yang meliputi kaum imigran yang meninggalkan komunitas nasionalnya di negeri asalnya dan masuk ke komunitas masyarakat lainnya yang mayoritas.

Eksistensi ketiga kelompok ini membawa tuntutan masing-masingnya berupa *hak spesifik*, yaitu: hak untuk mendapatkan perwakilan khusus dalam lembaga politik bagi kelompok gerakan sosial baru; hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination* atau *self-government* atau otonomi penuh) bagi minoritas nasional; dan hak-hak politis untuk tetap menghayati budaya dan keyakinan mereka yang dijamin oleh sistem hukum dan politik yang toleran. Di samping hak-hak spesifik tersebut, kelompok minoritas juga berhak untuk menikmati hak-hak mereka sebagai manusia (HAM) dan hak sebagai warga negara (dalam konteks politik), sama seperti kaum mayoritas.

Definisi minoritas umumnya hanya menyangkut jumlah. Suatu kelompok dikatakan sebagai minoritas apabila jumlah anggota kelompok tersebut secara signifikan jauh lebih kecil daripada kelompok lain di dalam komunitas. Dari sudut pandang ilmu sosial pengertian minoritas tidak selalu terkait dengan jumlah anggota. Suatu kelompok akan dianggap kelompok minoritas apabila anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupannya sendiri dibanding anggota-anggota kelompok dominan. Jadi, bisa saja suatu kelompok secara jumlah anggota merupakan mayoritas tetapi dikatakan sebagai kelompok minoritas karena kekuasaan, kontrol, dan pengaruh yang dimiliki lebih kecil daripada kelompok yang jumlah anggotanya lebih sedikit, demikian juga prasangka rasial (etnik) lebih intens pada kelompok minoritas daripada kelompok mayoritas karena identitas sosial mereka selalu terancam oleh kelompok mayoritas.

Ancaman-ancaman yang datang terhadap kelompok etnik minoritas menyebabkan mereka memiliki kecurigaan yang lebih tinggi terhadap orang lain dan mereka juga lebih tertutup dalam pergaulan sosial. Ketertutupan kelompok minoritas dalam pergaulan sosial mengurangi kesempatan

kelompok minoritas untuk bergaul secara akrab dengan kelompok mayoritas. Akibatnya antara kelompok minoritas dan mayoritas kurang saling mengenal hal mana berpotensi menimbulkan prasangka¹⁶.

Selain berprasangka, golongan minoritas biasanya juga memiliki ketidakpercayaan yang tinggi (*distrustful*) terhadap golongan mayoritas, serta memandang mayoritas sebagai berprasangka dan kurang komunikatif. Kelompok minoritas biasanya enggan untuk sungguh-sungguh memiliki kerjasama yang mengharuskan mereka terikat erat dengan kelompok mayoritas. Kerjasama yang terjadi antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas umumnya hanya kerjasama yang bersifat terbuka dan tidak menyebabkan diperlukannya suatu komitmen untuk menjaga rahasia tertentu. Artinya tidak ada kerjasama yang benar-benar erat dan saling percaya mempercayai secara sungguh-sungguh. Kecurigannya benar-benar tinggi. Berkurangnya kemungkinan kerjasama ditambah dengan adanya penilaian bahwa kelompok mayoritas memiliki prasangka terhadap kelompok minoritas semakin menjauhkan potensi kerjasama yang erat. Belum lagi prasangka yang dimiliki kelompok minoritas mencegah mereka untuk bergaul secara akrab terhadap kelompok mayoritas. Akibatnya kelompok mayoritas menilai mereka sebagai eksklusif dan menjaga jarak sosial. Seterusnya, prasangka antara kedua kelompok akan tumbuh subur.

Masyarakat yang memiliki entitas etnik yang berposisi mayoritas-minoritas memiliki keragaman persoalan yang lebih besar daripada masyarakat monoetnik. Mereka menghadapi kemungkinan konflik dan disintegrasi yang lebih besar. Pola hubungan antar entitas juga beragam. Setidaknya ada empat hal yang biasa dilakukan kelompok minoritas dalam kaitannya dengan kehidupan sosial bersama kelompok mayoritas, yaitu:

2.1.1 *Pluralistik*

Minoritas berdamai dengan mayoritas dan minoritas yang lain. Hal ini sering sebagai prekondisi peradaban yang dinamis. Dalam kondisi ini, setiap kelompok etnik minoritas tidak menyatu diri dengan kelompok mayoritas. Mereka tetap mempertahankan identitasnya namun dapat

¹⁶ Brewer & Miller, *Intergroup Relationship*. Open University Press. 1996

hidup berbaur dengan kelompok lain dengan baik. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kebijakan terhadap etnisitas oleh pemerintah Indonesia. Semua etnik diharapkan tetap menunjukkan jati dirinya dengan tetap mempertahankan identitas etniknya namun bisa dan mampu bergaul secara baik dengan etnik mayoritas.

2.1.2 *Assimilationist*

Kaum minoritas larut dan meleburkan diri ke dalam kaum mayoritas. Dalam kondisi ini minoritas etnik melepaskan identitas etniknya dan mengadopsi nilai-nilai dan cara hidup kelompok mayoritas. Misalnya Etnis Jawa yang ada Jambi, tidak lagi mengakui identitas etnis jawanya, tetapi memakai identitas Jambi. Demikian juga cara-cara hidup dan tata nilai yang dianut tidak lagi tata nilai Jawa tetapi tata nilai melayu.

2.1.3 *Secessionist*

Kaum minoritas mencari kemerdekaan politik dan kultural dengan menarik diri dari kehidupan bersama kaum mayoritas dan minoritas yang lain. Gerakan ini jarang terjadi di Indonesia, tapi contoh yang bagus adalah etnik Badui di Jawa Barat. Mereka dengan sengaja memisahkan diri dari kehidupan sosial bersama kaum mayoritas dan minoritas lainnya. Mereka tetap memilih untuk tinggal di wilayah yang terisolasi agar tetap dapat melanjutkan tradisi leluhur yang dimilikinya. Dengan jelas mereka mencari kemerdekaan kultural. Adapun kemerdekaan politis agaknya sedikit banyak telah mereka dapatkan pula dimana tidak ada tangan-tangan birokrat sampai di kampung mereka. Keputusan mereka untuk tidak memilih pada pemilu 2004 juga merupakan salah satu bentuk kemerdekaan politis.

2.1.4 *Millitant*

Kaum minoritas melakukan perlawanan terhadap kaum mayoritas dan minoritas lainnya. Hal ini masih sering kita dengar di Indonesia sampai sekarang. Berbagai pemberontakan atas nama etnis terus berlangsung dari dulu sampai sekarang. Misalnya saja Gerakan Aceh

Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan Republik Maluku Selatan (RMS) dimana masing-masing mengatasnamakan etnis sebagai landasan perjuangan.

Dari empat hal yang biasa dilakukan oleh kelompok minoritas tersebut, masyarakat Muslim minoritas di Thailand Selatan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan "Muslim pattani" telah memilih jalur militan sebagai respon atas kebijakan represif dari pemerintah Thailand. Hal ini terlihat dari adanya kelompok-kelompok seperti PULO (*Pattani United Liberation Organization*) dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang melakukan aksi-aksi yang menjurus pada upaya separatis dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah kerajaan Thailand.

2.2 Teori Politik Identitas

Sikap bangsa Thai yang telah memarginalisasi keberadaan Melayu-Muslim di Thailand Selatan menunjukkan eksklusivitas bangsa Thai dan juga mengabaikan identitas dan juga keberadaan Melayu-Muslim yang ada di Thailand. Menurut Amartya Sen, identitas yang dimiliki oleh individu atau komunitas, tidak pernah tunggal atau dalam arti selalu plural. Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan sosial masyarakat terkadang individu atau komunitas yang ada dalam masyarakat itu sendiri menggunakan identitas dirinya secara kondisional. Artinya, individu atau komunitas tersebut akan menunjukkan dirinya sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapinya. Sementara itu Berger dan Luckman menyebut identitas sebagai elemen kunci dari realitas subyektif yang terdapat dalam hubungan dialektis dengan masyarakat. Dalam proses sosial, identitas dibentuk, dikristalisasi, dijaga, dimodifikasi, dan dipertajam melalui relasi sosial¹⁷. Kemudian identitas inilah yang mendasari etnis tertentu untuk menggunakannya dalam ranah politik.

¹⁷ Peter Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality, An Anchor Book*, Garden City NY: Doubleday, 1996, hal. 173.

Politik Identitas di asumsikan sebagai politik yang fokus utamanya adalah perbedaan (*difference*) sebagai kategori politik yang utama. Kemunculan politik etnis sebagai bentuk politik identitas diawali oleh timbulnya kesadaran yang mengindetikkan mereka ke dalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kelompok. Dengan kata lain etnik, yang terbentuk karena adanya kesadaran dan masuk pada relasi akan mengedepankan kategori politik identitas ini. Politik identitas dalam hal ini diartikan sebagai politik dari sebuah kolektif dengan mengedepankan aspek kesamaan identitas. Motivasi keanggotaan dalam kelompok identitas dapat berujung pada sebuah politik identitas. Ketika individu mempergunakan identitas untuk mencapai keinginan dan mewujudkan motivasinya, individu tersebut sedang berpolitik identitas.

Selanjutnya, Manuel Castells mendefinisikan identitas sebagai kepemilikan seseorang dari pengalaman dan "arti"¹⁸. Identitas juga merujuk pada aktor sosial yang terkait dengan atribut budaya. Lebih lanjut Castells berpendapat bahwa identitas dibangun atas dasar sejarah, geografi, biologi, institusi produktif, dan reproduktif, pengalaman bersama, hayalan pribadi, kekuatan aparat, dan agama. Ada tiga macam "proses pembentukan" identitas yakni:

2.2.1 *Legitimizing Identity*,

Identitas yang terbangun dalam ciri pertama ini adalah ketika diperkenalkan oleh institusi dominan untuk memperluas dan merasionalisasikan dominasi yang ada. Bentuk identitas ini mengarah pada *civil society* yang merupakan seperangkat institusi dan organisasi.

- Identitas Nasional, yaitu identitas yang berhubungan dengan kewarganegaraan seseorang dan terkait dengan negara yang ditematinya. Misalnya saja, identitas nasional warga negara Indonesia, maka ada simbol-simbol negara yang melekat kepadanya, seperti bahasa Indonesia yang digunakan dalam

¹⁸ Manuel Castells, *The Power of Identity*, USA:Blackwell Publishing, 2002, hal. 6.

percakapan sehari-hari, memiliki bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.

- Identitas Budaya, yaitu identitas yang melekat pada diri seseorang yang didasarkan kepada budayanya. Identitas ini bisa tercermin melalui kebiasaan, nilai, dan norma yang dipegang oleh seseorang yang terbentuk berdasarkan sosialisasi kebudayaan yang ditanamkan sejak dini.
- Identitas Agama, merupakan identitas seseorang yang terkait dengan keyakinan yang dipercayainya.
- Identitas Pendidikan, yaitu identitas yang didasarkan pada tingkat pendidikan yang dicapai seseorang.
- Identitas Pekerjaan, yang didasarkan pada spesialisasi pekerjaan yang dilakukan oleh individu.
- Identitas Kelompok, yaitu identitas gabungan individu-individu yang didasarkan kepada kesamaan agama, budaya, hobi, dll.

2.2.2 Resistance Identity

Adalah proses bertahannya identitas sebagai bentuk perlawanan atau dalam hal ini dihasilkan oleh mereka yang sedang dalam posisi atau keadaan yang lemah karena stigma dari pihak yang mendominasi, dan biasanya digunakan lebih mengarah kepada kegunaan politik identitas. Kemudian dari identitas tersebut nantinya akan berpengaruh pada pembentukan suatu komunitas sehingga melalui perlawanan secara kolektif terhadap tekanan yang ada Komunitas tersebut dapat merupakan dasar dari munculnya suatu jaringan yang kuat dan solid.

- *Etnonasionalism*, yaitu individu atau kelompok yang merasa identitasnya paling tinggi dan paling baik serta memandang lemah identitas milik individu atau kelompok lainnya. Hal ini terjadi dalam kasus Nazi di Jerman, pada saat itu Hitler mengatakan bahwa ras Aria adalah ras paling kuat dan paling murni, oleh karena itu ras Aria haruslah menjadi pimpinan bagi

ras-ras lainnya. Hitler bahkan membantai habis ras Yahudi yang dinilainya ras terburuk dan harus dimusnahkan karena ras ini tidak memiliki loyalitas terhadap negara yang dia tempati.

- Identitas Minoritas, ini adalah identitas yang memiliki lingkup kecil dalam masyarakat.

2.2.3 *Project Identity* (kelompok-kelompok baru),

Aktor membangun identitas dan mentransformasi struktur sosial.

- Kelompok feminis, yaitu kelompok yang membela hak-hak perempuan dan menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat
- Kelompok homosexual, yaitu kelompok yang membela eksistensi dari identitas homosexual, baik itu gay maupun lesbian.

Identitas dalam hal ini juga terkait dengan posisi kelompok sosial, khususnya organisasi¹⁹. Kelompok identitas juga sebagai sebuah asosiasi signifikan secara politik yang menarik seseorang karena identifikasi bersama. Kelompok identitas juga merujuk kepada kelompok terorganisasi yang memiliki ekspetasi sosial dan kemudian mengkreasikan sebuah perilaku kolektif. Kelompok identitas juga terjadi karena adanya keikutsertaan dari anggota, dukungan kelompok, dan identifikasi bersama. Dalam hal ini, Kelompok identitas secara kolektif akan bergerak menurut kepentingan instrumental dari kelompoknya sendiri. Identifikasi yang difokuskan pada kelompok etnik menjadikan seseorang termotivasi untuk secara politik berorganisasi. Lebih lanjut, Kymlicka²⁰ juga mengatakan bahwa setiap kelompok masyarakat sebenarnya telah memiliki kekuatan untuk mempertahankan eksistensi diri sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan kelompoknya, baik secara internal maupun eksternal.

¹⁹ Michael Haralobos dan Martin Holborn. *Sociology: Themes and Perspective*. Harper Collins, 2004, hal 819.

²⁰ Will Kymlicka. *Multicultural Citizenship*. Oxford University Press, 1995

Perlindungan internal dapat terjadi pada semua unsur anggota kelompok untuk melakukan pembatasan – pembatasan budaya yang ada, sedangkan perlindungan eksternal adalah setiap bentuk upaya untuk melindungi budaya dari kekuasaan ekonomi dan politik secara luas.

Dari teori sebelumnya kita dapat melihat bahwa persoalan mulai muncul dari identifikasi stereotip dan stigma masyarakat Pattani oleh pemerintahan Thai yang telah berlangsung cukup lama. Thai Buddhist menyebut masyarakat Pattani dengan sebutan “*Khaek*” yang secara harfiah berarti “tamun” atau “pendatang”. Secara umum istilah *khaek* juga dipakai untuk mengidentifikasi orang-orang dengan warna kulit sawo matang khususnya yang berasal dari Asia Selatan seperti India, Pakistan dan Timur Tengah, termasuk mereka yang beragama Islam, yang diantaranya adalah Melayu Muslim.

Dalam pandangan Thai Budhist, *Khaek* merujuk pada istilah yang berbau etnosentrik, dan stereotip. *Khaek* juga berkonotasi sebagai orang yang malas, jorok, egois, miskin, tak bisa dipercaya, berpikiran picik, bodoh dan fanatik. Intinya istilah *Khaek* mengandung pelecehan makna (*deragatory meaning*). Berdasarkan simbol-simbol agama dan budaya inilah mereka dikelompokkan sebagai *alien cultural group*. Sebaliknya Melayu Muslim mengidentifikasi orang Thai-Budhist sebagai orang kafir (*atheist*), penyembah patung. Mereka diibaratkan sebagai jahiliyah modern, yang menjadikan budak bak “Lata dan Uza” yang menurut hukum Islam wajib diperangi lantaran sifatnya yang zalim terhadap Melayu. Tidak seperti hubungan antara Thai dengan Cinam hubungan antara Thai dengan “Muslim Pattani”, yang melibatkan pula hubungan antara pemerintah Thai dengan rakyat Muslim Melayu penuh diwarnai dengan konflik ideologis, budaya bahkan konflik separatis. Pihak “Muslim Pattani” sendiri mengidentifikasi hubungan pemerintah Thai dengan mereka sebagai hubungan antara penjajah dengan rakyat yang ditindas. Disinilah pada akhirnya masyarakat “Muslim Pattani” menganggap dirinya (identitasnya) sebagai *outgroup* di dalam wilayah kelahirannya sendiri.

2.3 Teori Keadilan

Kebijakan Publik dalam pertimbangan moral, dalam kerangka tugas fasilitasi, negara berkewajiban menciptakan *basic social structure* demi menjamin kepentingan semua pihak. Artinya, negara tidak berurusan langsung dengan kesejahteraan masing-masing individu, melainkan menciptakan kebijakan publik yang memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan yang fair untuk memenuhi kepentingannya, termasuk kehidupan beragama. Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan UU atau kebijakan publik yang dipandang bermanfaat untuk memelihara tertib sosial.

Persoalannya adalah bahwa negara sebagai entitas politik selalu bersifat pluralistik. Terdapat relasi antara politik dan pluralitas yang sedemikian eksistensialnya sehingga pemisahan antara keduanya menjadi absurd. Bahkan pernyataan seperti "Masyarakat politik bersifat pluralistik" sebetulnya redundan. Adanya kenyataan seperti ini membuat Rawls berkeyakinan bahwa teori keadilan, yang termanifestasi lewat kebijakan-kebijakan publik, seharusnya tidak didasarkan pada pandangan agama, filsafat, atau moralitas yang menjadi anutan eksklusif (*Comprehensive moral, religious, and philosophical doctrines*) komunitas tertentu. Alasannya, tidak ada satu pun agama atau doktrin moral komprehensif yang bisa dianut oleh semua atau hampir semua orang. Dalam kaitan dengan itu, pertimbangan tentang mayoritas, yang juga menjadi bagian dari argumentasi Salahuddin, tentu saja penting. Tetapi ideologi mayoritas dan minoritas seharusnya tidak mengaburkan penilaian kita tentang kualitas sebuah keyakinan. Kelompok agama sekecil apapun bisa sangat yakin akan kebenaran ajarannya sehingga mengabaikan kelompok seperti ini bisa saja menimbulkan masalah sosial serius bagi komunitas politik.

Salah satu yang menyebabkan meningkatnya eskalasi konflik di wilayah Thailand Selatan adalah adanya kebijakan pemerintah kerajaan Thailand yang diskriminatif, timpangnya sektor ekonomi dan pembangunan di wilayah Thailand Selatan. Ketika dibawah rezim ultranasionalis Phibul

Songkram²¹ di tahun 1938, dibuatlah suatu kebijakan “nasionalis” untuk menjalankan asimilasi berbagai budaya minoritas ke suatu budaya pokok Buddha “*Thainess*”²² yang dibuat untuk membentuk “*the monoethnic character of the state*”²³. Proses asimilasi yang didasari atas kekerasan dan pelanggaran HAM di wilayah Thailand Selatan merupakan sebuah bentuk ketidakadilan atas etnis Muslim-melayu di wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat. Kebijakan pemerintah kerajaan Thailand inilah yang menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Muslim di Thailand Selatan.

Diskriminasi dalam bidang ekonomi juga berlanjut pada bidang sosial, seperti perbedaan bahasa. Mayoritas penduduk Thailand menggunakan bahasa Thai, namun di Selatan umat Muslim yang beretnik Melayu, menggunakan bahasa atau dialek mereka sendiri (*Yawi*), yang hanya sebagian kecil masyarakat non-Muslim yang mengerti dan dapat berbicara menggunakan bahasa atau dialek tersebut. Modal sosial (kepercayaan) dan kelompok sosial di Thailand Selatan merupakan yang terlemah diantara daerah lain di Thailand. Daerah Thailand Selatan mendapat reputasi sebagai daerah yang bermasalah yang dikarakteristikan dengan tingginya tingkat kejahatan dan banyaknya pelanggaran hukum.

Banyaknya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand tersebut menjadi sebuah ironi. Ketika mereka ingin membangun negaranya, mereka juga secara sadar maupun tidak sadar menghancurkan negaranya sendiri.

²¹ Phibul Songkram adalah tokoh militer sekaligus tokoh reformis Thailand. Phibul Songkram bersama Pridi Phanomyang melancarkan gerakan demokrasi di Thailand dan mengubah sistem monarki absolut. Phibul Songkram juga berperan besar dalam mengorganisasi KUP tanpa pertumpahan darah pada Juni 1932.

²² Chidchanok Rahimmula, *Peace Resolution: A Case Study of Separatist and Terrorist Movement in Southern Border Provinces of Thailand*, in S. Yunanto, et. al. *Militant Islamic Movements in Indonesia and Southeast Asia*, Jakarta: FES and The RIDEP Institute, 2003, hal. 263-277.

²³ David Brown, *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia*, London: Routledge, 1994

2.4 Teori Deprivasi Relative

Dalam *Why Men Rebel* (1970) Ted Robert Gurr²⁴, seorang ilmuwan sosial, memusatkan perhatiannya pada kekerasan politis dengan menggunakan teori *deprivasi relative*. Menurut Gurr kekerasan muncul karena adanya deprivasi relative yang dialami masyarakat sebagai perasaan kesengajaan antara nilai harapan (*Value Expectation*) dengan kapasitas nilai (*Value Capabilities*) yang dimiliki seseorang. Nilai harapan (*value expectation*) adalah harapan akan kualitas hidup kehidupan sebagai hak untuk dinikmati. Sedangkan nilai kapabilitas (*value capabilities*) sebagai kondisi untuk mendapatkan harapan itu.

Ketidakpuasan deprivatif relatif akan melahirkan terjadinya berbagai aksi kekerasan massal, karena semakin besar intensitas ketidakpuasan semakin besar dorongan untuk melakukan kekerasan. Deprivasi relative menciptakan potensi bagi kekerasan kolektif. Hal ini karena deprivasi relatif merupakan suatu frustrasi yang mengarah kepada agresi. Kepemilikan hak memang suatu konsep yang normatif. Ini berkaitan dengan kriteria keadilan atas apa yang belum diperoleh. Deprivasi relative menghubungkan antara keinginan subjektif dan hak yang diangankan disatu sisi dengan kemampuan disisi lain. Frustrasi terjadi atas ketidak mampuan pemenuhan apa yang diinginkan. Dan frustrasi ini menciptakan potensi kekerasan kolektif (agresi).

Kebutuhan kita atas perlindungan dan keamanan, bisa secara langsung mengarah kepada agresi kolektif. Beberapa sengaja mengorbankannya untuk

²⁴ Ted Robert Gurr. "Fear of failure or criticism has never inhibited me from starting off in a new direction," says Dr. Ted Robert Gurr, reflecting on a prolific career of ground-breaking research on civil conflict and political violence. Among his many achievements, Gurr has written the award-winning books *Why Men Rebel* (Princeton, 1970), and, with historian Hugh Davis Graham, *Violence In America* (U.S. Government Printing Office, Bantam Books, and Praeger, 1969; Sage Publications, 1979). He taught at Princeton and Northwestern Universities (where he was department chair) and the University of Colorado before joining the Maryland faculty in 1989. He was awarded a Distinguished University Professorship by the University of Maryland in 1995. Gurr's philosophy also underlies the Minorities at Risk project, which he conceived in 1985 at a time when ethnic conflict was not a major scholarly or policy concern. The project's results have been reported in three books and numerous articles and chapters, most recently in *Peoples Versus States: Minorities at Risk in the New Century* (U.S. Institute of Peace Press, 2000).

bersama-sama dalam kekerasan kolektif untuk sesuatu yang lebih luhur (Tuhan, negara, kebebasan); dan lainnya, termasuk kehebatan dan nilai pribadi atau karena temannya terkait; dan beberapa lainnya karena ingin memperbaiki kondisinya, dengan mengurangi deprivasi relatif. Kekerasan kolektif kemudian bisa saja hanya alat, pilihan atas kesadaran sebagai alat untuk memperbaiki posisi seseorang, tidak melulu merupakan respon agresif irrational, emosional dan otomatis atas suatu kondisi frustrasi.

Adanya keragaman antara budaya dan pribadi dalam hubungannya dengan bagaimana frustrasi ditangani dan pentingnya pembelajaran sosial, deprivasi relatif merupakan suatu potensi bagi kerjasama kolektif. Orang yang mempunyai kesenjangan bisa saja dia percaya bahwa deprivasi (kesenjangan) antara keinginan yang menjadi haknya dengan kemampuannya adalah karena perbuatan jahatnya dimasa lampau, karena kehendak Tuhan, atau karena kemalasannya. Dia kemudian menetapkan untuk hidup lebih baik, hidup yang lebih bermanfaat secara sosial, atau mencoba untuk memperbaiki kemampuannya. Akhirnya, orang yang frustrasi bisa saja menarik diri dari interaksi yang berkaitan dengan frustrasinya, menyerapnya dan menjadikannya untuk tujuan yang lebih luhur, atau mencoba mengatasi masalah ini

Jadi pada awalnya kita punya asumsi bahwa deprivasi relatif menyebabkan frustrasi. Intensitas dan cakupan frustrasi pada gilirannya akan mengarahkan pada potensi terjadinya kekerasan kolektif. Pada bagian kedua dari teorinya berhubungan dengan transformasi potensi ini menjadi semakin menyempit yaitu kekerasan politik politisasi ketidakpuasan. Bagian akhir dari Teori Gurr adalah bertransformasinya potensi politis menjadi manifestasi politik. Dua keseimbangan kekuatan menentukan hal ini. Satu adalah keseimbangan antara pemberontak dengan kekuatan penekan rejim yang berkuasa, kedua keseimbangan antara pemberontak dengan lembaga penunjang rejim yang berkuasa. Kekerasan politik menjadi sangat mungkin pada saat rezim yang berkuasa dan pemberontak hampir mempunyai kekuatan yang sama dan lembaga pendukung yang layak dipertimbangkan

2.5 Teori Konflik

Islam Pattani sebagai Islam tradisional yang melayu-sentris. Proses politik di Thailand yang memarginalkan Islam Tradisional di Thailand Selatan telah menimbulkan sebuah tindakan radikal yang berujung pada konflik. Dilihat dari perspektif *kecepatan reaksi (speed of reaction)* yang diberikan para pihak atas konflik yang terbentuk di kalangan berkonflik, maka konflik sosial dapat berlangsung dalam beberapa variasi tipe/bentuk, yaitu:

- a. Gerakan sosial damai (*peaceful collective action*) yang berlangsung berupa aksi penentangan, yang dapat berlangsung dalam bentuk: “aksi korektif”, “mogok kerja”, “mogok makan”, dan “aksi-diam”. Dalam hal tidak ditemukan resolusi konflik yang memuaskan, maka aksi damai dapat dimungkinkan berkembang menjadi “aksi membuat gangguan umum” (*strikes and civil disorders*) dalam bentuk demonstrasi ataupun huru-hara.
- b. Demonstrasi (*demonstrations*) atau protes bersama (*protest gatherings*) adalah kegiatan yang mengekspresikan atas ketidaksepahaman yang ditunjukkan oleh suatu kelompok atas suatu isu tertentu. Derajat tekanan konflik kurang-lebih sama dengan pemogokan. Aksi kolektif seperti ini biasanya diambil sebagai protes yang reaksioner yang dilakukan secara berkelompok ataupun massal atas ketidaksepahaman yang ditunjukkan oleh suatu pihak tertentu kepada pihak berseberangan atas suatu masalah tertentu. Biasanya skala bersifat lokalitas, sporadik (meski tidak tertutup kemungkinan dapat meluas).
- c. Kerusuhan dan huru-hara (*riots*), adalah peningkatan derajat keberingasan (*degree of violence*) dari sekedar demonstrasi. Kerusuhan berlangsung sebagai reaksi massal atas suatu keresahan umum. Oleh karena disertai dengan *histeria massa*, maka huru-hara seringkali tidak bisa dikendalikan dengan mudah tanpa memakan korban luka (bahkan kematian).
- d. Pemberontakan (*rebellions*) adalah konflik sosial berkepanjangan yang biasanya digagas dan direncanakan lebih konstruktif dan terorganisasikan dengan baik. Pemberontakan bisa menyangkut

perjuangan atas suatu kedaulatan atau mempertahankan “kawasan” termasuk eksistensi ideologi tertentu. Pemberontakan tidak harus berlangsung secara *manifest*, melainkan bisa diawali “di bawah tanah” sehingga tampak *latent* sifatnya.

- e. Aksi radikalisme-revolusioner (*revolutions*) adalah gerakan penentangan yang menginginkan perubahan sosial secara cepat atas suatu keadaan tertentu.
- f. Perang adalah bentuk konflik antar negara yang sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat dunia karena dampaknya yang sangat luas terhadap kemanusiaan.

Konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan telah mencapai tahap pemberontakan dan aksi radikalisme. Sedangkan mengenai penyebab konflik di Thailand Selatan bisa dianalisis dari beberapa teori utama mengenai sebab-sebab konflik yaitu:

a. Teori Hubungan Masyarakat

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran: meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya. Dalam kasus konflik Thailand Selatan terlihat adanya unsur distrust dari masyarakat Muslim Pattani terhadap pemerintah kerajaan Thailand, bahkan dalam ruang lingkup interaksi antara masyarakat Thai-Budhis dan Muslim Melayu pun masih diliputi unsur tidak percaya bahkan saling membenci.

b. Teori Identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran: melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat

mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Kondisi masyarakat “Muslim Pattani” yang merupakan kaum minoritas di wilayah Thailand menciptakan rasa tidak aman dan selalu merasa terancam akan eksistensi masyarakat Thai-Budhis yang mendominasi hampir seluruh aspek di wilayah Thailand. Perasaan terancam inilah yang cenderung akan mendorong dari masyarakat Muslim Pattani untuk berjuang mempertahankan eksistensinya, terlebih ternyata kebijakan pemerintah Thailand justru cenderung mendiskriminasi keberadaan mereka.

c. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran: menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya. Stereotip dan Stigma yang negatif antara Muslim-Melayu dan Thai-Budhist akan tetap menjadi potensi pendorong konflik jika hal tersebut tidak dapat dihilangkan. Untuk mengatasinya diperlukan suatu komunikasi antar budaya yang intens serta interaksi yang positif di antara kedua pihak.

d. Teori Transformasi Konflik

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran: mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antar pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan. Sejak terintegrasi dengan kerajaan Siam, masyarakat “Muslim Pattani” memang mengalami kondisi yang memprihatinkan karena perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah Kerajaan Thailand. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan itulah yang

menjadi latar belakang pergerakan masyarakat Muslim di Thailand Selatan.

2.5.1 Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.

2.6 Teori Integrasi Nasional

Kata *integrasi* atau *integratia* (Bahasa Belanda) di dalam kamus populer, mengandung arti menjadikan satu, menyatukan dari usaha-usaha yang terpecah-pecah²⁵. Sedangkan di dalam Kamus Inggris-Indonesia, kata *integration* mengandung arti penggabungan. Integrasi pada dasarnya merupakan proses panjang dan sulit. Sebagian pengamat berpendapat bahwa integrasi melalui suatu toleransi, namun pengamat lain umumnya

²⁵ Habeyb. *Kamus Populer*. Jakarta: Penerbit Centra. 1981. hal. 169

beranggapan bahwa integrasi adalah suatu proses uji coba secara terus menerus, berdasarkan suatu keberhasilan menuju keberhasilan berikutnya²⁶.

Pengertian integrasi nasional dapat dilihat pada pendapat Harsja W. Bachtiar yang menyebut integrasi nasional sebagai suatu keadaan di mana masing-masing golongan, penduduk tetap dapat mempertahankan identitasnya tersebut (suku, agama, golongan) dalam berinteraksi dengan golongan lain tanpa satu golongan pun yang dirugikan. Dalam hubungan tersebut mereka justru saling mendukung keberadaan masing-masing sebagai sesama bangsa²⁷.

Burhan D. Magenda mengutip Clifford Geertz, menyebutkan sejak awal 1960-an, negara-negara yang baru merdeka, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mewujudkan integrasi nasional dalam apa yang disebutnya sebagai suatu proses *the integrative revolution* (Magenda: 1986.1.). Proses itu mencakup perubahan dari sentimen atau perasaan yang bersifat primordial menjadi suatu civil society. Sedang sentimen primordial tersebut oleh Geertz meliputi enam hal yaitu pertalian darah, masalah ras, masalah bahasa, masalah wilayah, masalah agama dan masalah kebiasaan²⁸.

Setelah dikuasai oleh kerajaan Siam, wilayah Pattani menjadi daerah yang merupakan wilayah bangsa Thai yang beragama Budha. Hal didasarkan atas perjanjian penentuan daerah antara Kerajaan Muangthai pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn dengan Pemerintahan Kolonial Inggris di Malaya yang mengharuskan wilayah Pattani dan sekitarnya menjadi wilayah kekuasaan Thailand di tahun 1902. Sebenarnya, masyarakat Muslim di Thailand itu lebih suka bergabung dengan Malaya, sekalipun di bawah pemerintahan Inggris, karena dengan begitu mereka bisa hidup bersama dengan suku-suku bangsa seagama.

²⁶ May, T. Rudy. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika. 2002. hal. 86.

²⁷ Ibid. Hal. 90

²⁸ Burhan D Magenda dalam "Peranan Aparatur Pemerintahan Dalam Proses Integrasi Nasional" mengutip pendapat Clifford Geertz dalam artikelnya "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States" dalam Clifford Geertz (ed) "Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa" The Free Press, 1963.

Di bawah pemerintahan Muangthai yang notabene mayoritas beragama Buddha, masyarakat “Muslim Pattani” merasa diperlakukan diskriminatif sebagai kelompok minoritas. Birokrasi negara yang berorientasi *Thai-Buddhist* mengisolasi mereka bukan hanya dalam proses politik akan tetapi juga menghalangi penduduk Muslim untuk melakukan kewajiban-kewajiban keagamaannya. Sebab, birokrasi negara rupanya memiliki kekuasaan untuk mengubah nilai-nilai dan lembaga-lembaga sosial dan budaya, termasuk nilai-nilai keagamaan untuk disesuaikan dengan kebutuhan integrasi nasional.

Nilai-nilai dasar yang cenderung berbeda di kelompok masyarakat “Muslim Pattani” inilah yang cenderung menghalangi tumbuhnya rasa nasionalisme mereka terhadap Kerajaan Thailand, terlebih dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand yang cenderung represif, sehingga menjadi kontra-produktif, dimana justru etnonasionalis Muslim Pattani lah yang tumbuh bukan rasa nasionalisme sebagai bagian dari kerajaan Thailand.

Nasionalisme biasanya terbentuk dari pengalaman historis yang sama. Nasionalisme²⁹ adalah suatu paham yang mengajarkan bangsa dan negara yang dibangun dari masyarakat yang majemuk, dan warganya tersebut sungguh-sungguh bertekad untuk membangun masa depan secara bersama, dengan terlepas dari berbagai perbedaan ras, etnik, dan agama atau misalnya, dari ikatan kesetiaan yang melekat sejak lahir suku daerah kelahirannya. Suatu negara akan berfungsi dengan baik apabila memiliki dukungan ideologi nasionalisme, dan juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan demokrasi.

Menurut *Ernest Renan*, seorang pujangga dari Perancis berpendapat tentang paham “bangsa”, yang menurutnya di dalam “bangsa” ada suatu nyawa, suatu asas akal yang terjadi dari dua hal yaitu: *pertama*, rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat; *kedua*, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya persamaan bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan “bangsa” itu³⁰. Kehendak akan bersatu (*Le desire d'entre ensemble*) itulah

²⁹ E Gellner. *Nations and Nationalism*. Oxford : Blackwell 1983 , h. 1

³⁰ Soekarno, *Islam Nasionalisme Marxisme*. Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2000. hal. 7

yang menjadi syarat untuk menjadi sebuah bangsa. Sedangkan *Otto Bauer* dalam bukunya "*Die Nationalitäten Frage*" mendefinisikan bangsa sebagai satu persatuan nasib.

Nasionalisme dibangun dari semangat rakyat untuk bersatu, sedangkan demokrasi menjamin jati diri rakyat, penghormatan dan perlindungannya. Dalam hal ini keikutsertaan dalam kehidupan bernegara diwajibkan, sehingga semangat nasionalisme dan demokrasi dapat dibangun dengan baik yang diharapkan akan tercipta suatu stabilitas nasional yang tangguh. sekalipun dalam negara demokrasi berbagai kepentingan tidak akan hilang tetapi dapat ditekan atau larut dalam berbagai organisasi politik yang ada. Semua itu dapat tercapai apabila pemerintahan itu baik, seperti menegakkan keadilan dalam mengalokasikan sumberdaya nasional, baik antar sektor maupun antar wilayah, sehingga etnik diperlakukan dengan adil, dapat hidup dengan tenang, aman, serta dapat melaksanakan seluruh kegiatan kehidupan sosial dengan baik. Tetapi sebaliknya bila pemerintah mengalami kemunduran dalam kinerjanya, maka masing-masing golongan yang ada dalam masyarakat akan berjuang untuk memperoleh hak, serta akan memenuhi aspirasi sebagai kepentingan yang syah, maka demikian akan timbul kebangkitan etnik, dan lebih jauhnya lagi akan terjadi suatu gejolak di masyarakat.

Integrasi mempunyai dua dimensi, antara lain: integrasi horizontal dan integrasi vertikal. Dimensi vertikal dalam integrasi nasional bertujuan mengintegrasikan persepsi dan perilaku elite dan masa dengan cara menghilangkan, mengurangi perbedaan kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dengan yang dipengaruhi. Sedangkan dimensi horizontal mengintegrasikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, dengan cara menjembatani perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor teritorial/kultur dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh factor-faktor tersebut.

Integrasi lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial, ekonomi, politik. Kelompok-kelompok sosial tersebut bisa terwujud atas dasar agama dan

kepercayaan, suku, ras dan kelas. Konsepsi tersebut mengisyaratkan bahwa integrasi tercipta melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif dengan tetap mengakui adanya perbedaan. Kemudian jalan menuju proses integrasi tidak selalu lancar atau mulus seringkali menemukan hambatan-hambatan, itu jelas ada seperti adanya primordialisme, suku, ras, agama dan bahasa. Dalam setiap kebijakan pemerintah selalu ada reaksi setuju dan tidak setuju, hal tersebut adalah wajar apabila suatu negara dibentuk dari suatu masyarakat yang majemuk, ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Kelompok yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut akan merasa tidak puas maka kelompok tersebut akan menyalurkan kekecewaannya dalam masyarakat melalui kelompok-kelompok yang ada didalamnya.

Proses integrasi disebabkan adanya kebersamaan sejarah, ada ancaman dari luar yang dapat mengganggu keutuhan negara, adanya kesepakatan pemimpin, homogenitas sosial budaya serta agama, dan adanya saling ketergantungan dalam bidang politik dan ekonomi. Istilah integrasi nasional merujuk kepada perpaduan seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi sosial, budaya, ekonomi. Pengertian integrasi nasional menekankan pada persatuan persepsi dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sementara itu, dalam kasus integrasi wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat terlihat bahwa secara historis wilayah Thailand Selatan (Pattani, Yala, dan Narathiwat) tidak mengalami kondisi historis yang sama, Kondisi Pattani saat itu persis dengan beberapa wilayah sekitarnya seperti Perlis, Kelantan, dan lainnya yang terletak di Malaysia. Tahun 1875, Thailand pertama kali datang ke Pattani dan langsung menduduki daerah itu. Kedatangan Inggris ke Semenanjung Malaka menghasilkan perjanjian dengan Thailand, yaitu Pattani dikuasai oleh Thailand dan Perlis dan wilayah lainnya dimiliki oleh Inggris. Kemudian hari Inggris menyebut daerah jajahannya dengan sebutan Malaysia. Muslim Pattani saat itu dipaksa untuk menjadi bagian dari Thailand atau ketika itu masih bernama kerajaan Siam. Namun, karena pendudukan itu, tak pelak terjadi pergolakan di daerah Pattani sampai sekarang. Sebuah reaksi yang wajar bila Muslim Pattani terus melawan para

penjajah tersebut mengingat secara historis wilayah Thailand Selatan memiliki etnis dan kultur yang berbeda dengan wilayah Thailand lain pada umumnya. Hal ini jugalah yang menjadi faktor penyebab sulitnya wilayah Thailand Selatan terintegrasi secara utuh ke dalam wilayah Thailand.

Nazaruddin Syamsuddin mengungkapkan bahwa integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok yaitu³¹ :

- a. Bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan-tuntutan negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara.
- b. Bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat, konsensus ini tumbuh dan berkembang diatas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa secara keseluruhan. Sedangkan menurut pakar sosiologi, Maurice Duverger dalam bukunya³², mengatakan sebagai berikut: Integrasi didefinisikan sebagai dibangunnya interdependensi yang lebih erat antara bagian-bagian organisme hidup atau antar anggota-anggota dalam masyarakat” sehingga integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya.

Dari dua pengertian tersebut di atas pada hakekatnya integrasi merupakan upaya politik/kekuasaan untuk menyatukan semua unsur masyarakat yang majemuk harus tunduk kepada aturan-aturan kebijakan politik yang dibangun dari nilai-nilai kultur yang ada dalam masyarakat majemuk tadi, sehingga terjadi kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan tujuan nasional dimasa depan untuk kepentingan bersama.

Di wilayah Thailand Selatan dua hal tersebut belum terpenuhi, masyarakat masih belum mau tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Negara, karena masih kentalnya unsur diskriminasi dari

³¹ Nazaruddin Syamsyuddin. *Integrasi dan Ketahanan Nasional di Indonesia*, Lemhanas, Jakarta 1994

³² Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. H. 310

kebijakan pemerintah Thailand terhadap keberadaan eksistensi “Muslim Pattani”, selain itu tidak adanya interdependensi yang harmonis antar pemerintah dan masyarakat Muslim di Thailand Selatan menjadi masalah dalam proses integrasi wilayah Thailand Selatan (Yala, Pattani, Narathiwat) ke dalam wilayah Kerajaan Thailand.

Integrasi masyarakat dalam negara dapat tercapai apabila :

- a. Tercipta kesepakatan dari sebagian besar anggota masyarakat terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial
- b. Sebagian besar anggota masyarakat terhimpun dalam berbagai unit sosial yang saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial.
- c. Terjadinya saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun didalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara menyeluruh.

Ketiga hal tersebut menjadi tugas bagi pemerintah Kerajaan Thailand supaya integrasi dapat berlangsung secara menyeluruh sehingga mampu meredam gejolak konflik di wilayah Thailand Selatan.

Dalam konteks pengintegrasian bangsa *Myron Weiner* melihat ada beberapa kebijakan pemerintah pusat untuk menyatukan seluruh masyarakat kepada satu negara nasional yakni: *Pertama*, penghapusan sifat kultural utama dari kelompok minoritas dan mengembangkan semacam kebudayaan nasional, biasanya kebudayaan kelompok suku bangsa yang dominan dan kebijakan inilah yang disebut dengan asimilasi. *Kedua*, pembentukan kebudayaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan kelompok kecil.

Disamping kedua jenis integrasi tersebut, *salah satu cara yang revolusioner* untuk mengintegrasikan masyarakat agar menyatu dengan negara-bangsa adalah dengan cara *intimidasi militer*. Tidak sedikit pula negara-negara baru yang otoriter menggunakan cara ini untuk memaksa rakyat dari suatu masyarakat yang kebanyakan penduduknya buta huruf itu agar setia kepada negaranya. Negara yang menggunakan cara kekerasan ini akan memicu pula benih-benih separatisme sebagai ungkapan kekecewaan mereka. Cara-cara yang diungkapkan oleh Weiner merupakan konsep *State Preceded Nation*, dimana negara membentuk suatu bangsa

Sejalan dengan *Myron Weiner* adalah pendapat *Howard Wrigings*, yang pendapatnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, bahwa *Integrasi Bangsa*³³ diartikan :

- a. Merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa”.
- b. Menunjuk kepada kemampuan pemerintah yang makin meningkat untuk menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayahnya.

Wrigings mengemukakan dua asumsi dasar dalam menelaah integrasi bangsa, yaitu :

- a. Dengan menghapus rasa saling curiga yang kuat di antara kelompok etnik maka integrasi bangsa yang berdasarkan perasaan kebersamaan dapat tercapai dan kebersamaan itu merupakan landasan dari negara yang sehat.
- b. Asumsi lain adalah tidak mungkin memusnahkan seluruh perbedaan yang ada pada setiap kelompok etnik hanya untuk menimbulkan dan mengembangkan rasa kebersamaan, tetapi perlu adanya kompromi untuk mengatasi konflik.

Berdasarkan asumsi ini *Wrigings* hendak mengatakan bahwa untuk mengurangi konflik dan membantu kelancaran proses integrasi bangsa mutlak diperlukan kebijakan pemerintah yang tegas dengan tidak membedakan kelompok etnik satu dengan lain. Hal ini sejalan dengan strategi Bhineka Tunggal Ika, selain itu juga mengembangkan musyawarah untuk mengatasi konflik etnik jika hal itu terjadi³⁴.

Lebih lanjut *Wrigings* memberikan lima strategi untuk mewujudkan *integrasi bangsa*, yaitu :

³³ Howard Wrigings dalam Yahya Muhaimin Dan Colin Mac Andrews, *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995. hal. 51

³⁴ Endang Purwaningsih, “Pembinaan Bela Negara dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa” Tesis Pascasarjana PKN UI, 2005. hal. 65

a. *Penciptaan musuh dari luar*

Rasa kebersamaan, senasib sepenanggungan akan lebih mudah tercipta apabila ada rasa takut terhadap serangan dari luar. Rasa takut itu akan mengalahkan perasaan kedaerahan, kesukuan, kelas social, dan sebagainya, sehingga memudahkan integrasi diantara mereka. Namun demikian akan timbul masalah apabila musuh telah dapat disingkirkan, yaitu: apakah kebersamaan itu masih dapat dipertahankan? Atau dengan menciptakan musuh-musuh fiktif akan dapat menciptakan kebersamaan seperti pada saat menghadapi musuh yang sebenarnya? Selain itu apakah penciptaan musuh dari dalam juga dapat menciptakan kebersamaan?

b. *Gaya Politik Para Pemimpin*

Pemimpin yang mampu membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan pada seluruh aspek kehidupan nasional yang tidak membedakan berdasarkan etnik, maka akan dapat menciptakan integrasi bangsa yang sehat. Oleh karena itu para pemimpin seyogyanya mempelajari karakteristik dari kelompok etnik yang dipimpinnya.

c. *Birokrasi Nasional yang sehat*

Birokrasi yang berjalan baik, tertib, dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada birokrasi tersebut. Sebagaimana dicontohkan dalam bidang kemiliteran dimana anggotanya didasarkan atas pertimbangan nasional, dan bukan atas dasar kedaerahan. Begitupun dengan birokrasi sipil maupun di dalam lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, serta system pendidikan dan jaringan komunikasi publik.

d. *Ideologi nasional*

Menurut Wriggins ideologi adalah serangkaian ide-ide yang saling berhubungan yang menetapkan tujuan masyarakat dan memberikan beberapa cara untuk mencapai tujuan itu. Ideologi akan memiliki kekuatan integratif apabila digali dari akar-akar nilai budaya masyarakat, dengan demikian akan senantiasa dijadikan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara serta akan di pertahankan keberadaannya.

e. *Kesempatan*

Wrigings memandang faktor kesempatan sebagai suatu kekuatan yang paling penting untuk menciptakan integrasi bangsa. Dicontohkan seperti terbukanya jenjang karir bagi mereka yang berprestasi, terbukanya kesempatan dalam bidang perekonomian, dan sebagainya. Dalam hal ini para pemimpin dapat memberikan kontribusi yang seluas-luasnya dengan memberikan berbagai kesempatan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sebagian pakar menyebut integrasi bangsa sebagai integrasi nasional, yang secara fundamental persoalan yang muncul dalam proses *integrasi nasional* bersumber pada terjadinya pergeseran-pergeseran di dalam struktur kekuasaan yang diakibatkan oleh berdirinya suatu negara-bangsa. Oleh sebab itu, *integrasi nasional* sebenarnya melibatkan persoalan kedaulatan, terutama menyangkut bagaimana kekuasaan beralih dalam kelompok-kelompok masyarakat dan bagaimana mereka membagi dan menggunakan kekuasaan diantara mereka³⁵.

2.7 Konsep Self Determination dalam Gagasan Sovereignty

Prinsip *self determination* atau penentuan nasib sendiri merupakan tantangan terhadap prinsip integritas teritorial dan prinsip kedaulatan negara karena kemauan rakyat (*people will*) lah yang menjadi legitimasi dari sebuah negara. Prinsip *self determination* menekankan pada kebebasan masyarakat untuk memilih negara dan batas teritorialnya. Bagaimanapun juga jumlah bangsa yang mengidentifikasi dirinya sendiri (*self identified*) lebih banyak dari jumlah negara yang ada saat ini.

Pavkovic dan Radan menggambarkan tiga teori Hubungan Internasional yang relevan terhadap konsep penentuan nasib sendiri, yaitu:

1. Realis, menegaskan bahwa kedaulatan teritorial lebih penting daripada penentuan nasib sendiri. Kebijakan ini banyak ditempuh oleh negara-negara besar selama perang dingin.

³⁵ John T. McAlister, Jr. Introduction. Dalam *Southeast Asia, The Politics of National Integration*, New York: Random House, 1973. hal. 6

2. Liberalis, memberikan pengakuan terhadap hak-hak individu serta penentuan nasib sendiri (self determination), pandangan liberalis menjadi alternatif yang berkembang pasca perang dingin yaitu diusungnya penghapusan perang antar negara, meningkatnya kebebasan individu serta mengurangi pentingnya integritas teritorial.
3. Liberalisme Kosmopolitan, mengusung pergeseran kekuasaan politik menjadi pemerintahan dunia, akibatnya pemisahan dan perubahan batas akan menjadi relatif lebih mudah dan juga akan berarti berakhirnya secara *de facto* "penentuan nasib sendiri"

Allen Buchanan memandang bahwa integritas teritorial sebagai aspek moral dan hukum demokrasi konstitusional. Namun, ia juga mengajukan konsep "*Remedial Rights Only Theory*" dimana kelompok memiliki hak untuk memisahkan diri jika dan hanya jika telah menderita ketidakadilan tertentu, dan pemisahan diri tersebut adalah langkah terakhir yang paling mungkin ditempuh. Konsep self determinasi merupakan awal dari konsep *Nation Preceded State* dimana sebuah bangsa yang hidup bersama dan memiliki persamaan nasib akan membentuk suatu organisasi Negara.

Dalam kasus integrasi Pattani kedalam wilayah Kerajaan Thailand konsep self determination mencuat dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat represif dan diskriminatif sehingga masyarakat Pattani yang sejak awal memang tidak mengharapkan proses integrasi tersebut semakin resistan dan akhirnya melakukan pergerakan-pergerakan separatis dengan tujuan untuk memisahkan diri dari kerajaan Thailand.

BAB 3

DINAMIKA SEPARATISME DI THAILAND SELATAN

Pada Bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum wilayah Thailand dan Thailand Selatan khususnya, serta memberikan gambaran sejarah keberadaan Muslim Pattani di Thailand Selatan dan insiden/konflik yang pernah berlangsung.

3.1 Gambaran Umum Wilayah Thailand

Gambar 3.1 Peta Wilayah Thailand



Thailand merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Thailand memiliki keunikan pada kelompok etnis, pemerintah, agama, bahasa dan budaya. Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand

dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.

Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.

3.1.1 Kondisi Geografis

Thailand berada di antara garis 5° dan 21° Lintang Utara serta 97° dan 106° Bujur Timur, Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat dan dengan Laos dan Kamboja di timur. Thailand terdiri atas empat wilayah yakni wilayah tengah, wilayah timur laut, wilayah utara dan wilayah selatan. Keempat wilayah tersebut dibagi menjadi 76 Propinsi (Changwats).

Ditinjau dari kedudukan geografinya, Thailand dapat dikategorikan sebagai negara yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari wilayahnya yang merupakan bagian dari daratan benua Asia yang tidak terpisah-pisah dan posisinya yang menghadap ke Laut China Selatan merupakan *Sea Lane of Communication (SLOC)*. Thailand juga merupakan negara subur dan kaya sumber alam serta

memiliki potensi laut yang dapat menunjang pembangunan negaranya. Namun demikian posisi tersebut juga mengandung kerawanan dari segi keamanan karena berbatasan darat dengan beberapa negara tetangga yakni Malaysia, Myanmar, Laos dan Kamboja.

Wilayah geografis di Thailand memiliki variasi yang berbeda-beda³⁶. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu.

Cuaca setempat adalah tropis dan bercirikan monsun. Ada monsun hujan, hangat dan berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta monsun yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari November hingga pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan selalu panas dan lembab. Kota-kota besar selain ibu kota Bangkok termasuk Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Chiang Mai, dan Songkhla.

3.1.2 Kondisi Demografi

Populasi penduduk di Thailand pada tahun 2002 berkisar 62.799.872 jiwa. Thailand merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi, hal ini dikarenakan angka kematian di Thailand sangat kecil. Pertumbuhan penduduk di Thailand sebesar 1.5% per tahun.

Populasi Thailand didominasi etnis Thai dan Lao, yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu juga terdapat komunitas besar etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang

³⁶ <http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand> diakses tanggal 26 oktober 2010

peranan yang besar dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer dan berbagai suku orang bukit.

Agama merupakan hal yang penting bagi masyarakat Thailand. Agama merupakan hal paling pertama yang harus dipahami. Hampir 95% penduduk Thailand beragama Budha, 4% beragama Islam, 1% Kristen, Hindu, Sikh, Tao dan animisme³⁷.

Ajaran Budha telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Thailand sejak ratusan tahun yang lalu. Hampir seluruh desa di wilayah Thailand memiliki paling sedikit satu buah kuil untuk beribadah umat Budha sekaligus sebagai pusat keagamaan, tempat pendidikan dan tempat upacara pemakaman. Salah satu indikator yang membuat masyarakat Thailand sangat menghargai agama Budha adalah hampir 80-90% dari anak laki-laki yang beragama Budha menjadi Biksu dan selama beberapa bulan mereka tinggal di kuil. Biasanya mereka memutuskan untuk menjadi biksu pada usia belasan tahun hingga dua puluh tahun.

Kebanyakan penduduk kristiani tinggal di provinsi Chiang Mai, sebagian lagi di Bangkok dan sebagian lainnya di Utara. Umat kristen di Thailand termasuk Kristen Katolik dan Protestan. Sedangkan penganut animisme diikuti oleh sekitar 500.000-600.000 penduduk suku Chao Kao. Untuk umat Hindu dan Sikh hanya berkisar 19.000 orang pemeluk.

Kebebasan beragama di Thailand dilindungi oleh undang-undang dan pemerintah menghormati hak-hak tiap agama untuk menjalankan aktivitasnya, walaupun kadang-kadang pemerintah membatasi kegiatan beberapa kelompok tertentu.

Islam merupakan agama minoritas di Thailand, dengan pemeluk terbanyak terdapat di sebelah selatan Thailand. Islam masuk ke wilayah Thailand Selatan melalui para pedagang Arab

³⁷ Thailand into The 2000's, published by National Identity Board Office of The Prime Minister, Kingdom of Thailand, h. 107.

dan India pada abad ke 13. Hubungan dagang antara Melayu dan Thai di selatan juga membantu penyebaran agama Islam³⁸.

Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional Thailand, yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada banyak juga bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di sekolah. Populasi Muslim di Thailand berkisar 5% dari skala nasional dan 90% nya berada di 3 provinsi tersebut. Sementara itu populasi Thailand didominasi oleh etnis Thai dan Lao (75%) dan sekitar 95%

Penggunaan bahasa Melayu menurut statistik nasional Thailand juga sangat kuat di wilayah Yala, Pattani dan Narathiwat yaitu 70 %, dibandingkan dengan provinsi lain di Selatan: Satun dan Songkhla. Tetapi bahasa Melayu 'dilarang' digunakan sebagai bahasa resmi di perkantoran, lembaga pendidikan pemerintah, dan tempat atau acara resmi lainnya. Larangan ini tidak menyurutkan masyarakat untuk menggunakan bahasa Melayu, karena bahasa ini memberi spirit identitas mereka, yang berbeda dengan mayoritas warga Thailand, yang berbahasa Thai dan beragama Buddha.

Apabila dilihat dari komposisi berdasarkan penggunaan bahasa dan agama, maka Thailand dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar yaitu:

- a. Yang beragama Budha dan menggunakan bahasa Thailand, tinggal hampir di seluruh daerah Thailand.
- b. Yang beragama Islam dan menggunakan bahasa Thailand, tinggal di Bangkok.
- c. Yang beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu, tinggal di Pattani, Yala, Narathiwat dan Santun.

Masing-masing pengelompokan tersebut mempunyai implikasi yang berbeda atas persoalan mayoritas-minoritas di Thailand.

³⁸ Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A, Ed, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara*, No. 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, hal. 466

Kelompok pertama, menduduki posisi mayoritas, beserta kecenderungan yang umumnya berkaitan dengan dominasi dan kekuasaan. Kelompok kedua mempunyai identitas yang merupakan hasil pengadopsian dari berbagai perilaku, kebiasaan dan nilai umum yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Budha. Hal ini dimungkinkan karena adanya nilai akulturasi dari kelompok kedua ini cukup tinggi³⁹.

Kelompok ketiga inilah yang menjadi kelompok yang unik, karena tetap menjaga identitas aslinya karena agama dan mekanisme internal kelompok yaitu adanya kepemilikan bersama atas nenek moyang yang keturunan bangsa Melayu. Karena merasa menjadi bagian dari bangsa Melayu inilah, mereka menolak ide pembauran politik dan akulturasi budaya. Orang Thailand Islam yang berbahasa Melayu mengidentikan dirinya sebagai orang Islam Malaysia dan terkonsentrasi di suatu daerah, sehingga mereka menjaga jarak sosial dan mengisolasi diri dari pemeluk agama Budha, bahkan dengan pemeluk agama Islam yang berbahasa Thailand. Hal ini dimungkinkan juga karena kelompok ini jarang menjalin hubungan dengan pemeluk Budha⁴⁰.

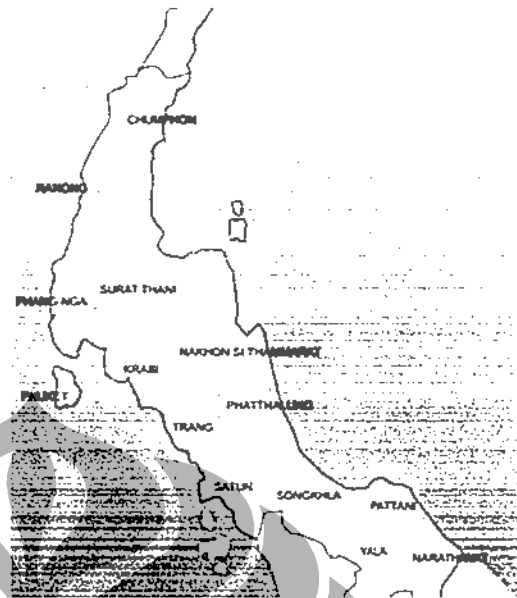
3.2 Gambaran Umum Wilayah Thailand Selatan

Wilayah Thailand Selatan secara suku, etnis, bahasa dan budaya cenderung lebih identik dengan wilayah Malaysia, secara geografis pun posisi wilayah Thailand Selatan sangat dekat dengan Malaysia Barat, sehingga memudahkan terjadinya komunikasi

³⁹ Riza Sihbudi, *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara*, Puslitbang Politik LIPI. 2003, h. 69

⁴⁰ Riza Sihbudi, *Ibid* h.69

Gambar 3.2 Peta Wilayah Thailand Selatan



3.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi wilayah Thailand Selatan

Thailand Selatan terdiri dari lima provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla, dengan total penduduk 6.326.732. Mayoritas penduduk Muslim terdapat di empat provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun, yaitu sekitar 71% di perkotaan, dan 86% di pedesaan, sedangkan di Songkhla, Muslim sekitar 19 %, minoritas, dan 76.6 % Buddha. Sementara mayoritas penduduk yang berbahasa Melayu, rata-rata 70 persen berada di tiga provinsi: Pattani, Yala dan Narathiwat, sementara penduduk berbahasa China, ada di tiga provinsi: Narathiwat, 0.3 %, Pattani, 1.0 %, dan Yala, 3.0%⁴¹.

Jumlah penduduk Muslim di Thailand sekitar 15 persen, dibandingkan penganut Buddha, sekitar 80 persen. Mayoritas Muslim tinggal di Selatan Thailand, sekitar 1,5 juta jiwa, atau 80 persen dari total penduduk, khususnya di Pattani, Yala dan Narathiwat, tiga provinsi yang sangat mewarnai dinamika di

⁴¹ Sensus Penduduk, Thailand, 2000

Thailand Selatan. Tradisi Muslim di wilayah ini mengakar sejak kerajaan Sri Vijaya yang menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand Selatan.

Tabel 3.1

Jumlah Muslim di wilayah Thailand Selatan

Provinsi	Area (km ²)	Populasi	Rural (%)	Muslim (%)
Pattani	2,109	472,363	85	78
Narathiwat	4,227	460,060	79	80
Yala	4,716	287,470	75	60
Satun	2,669	174,076	78	70

Sumber: National Statistic Office, Statistical Reports of Changwat, Office of the Prime minister, Thailand, 1938

Songkhla adalah provinsi terbesar di Thailand Selatan, yang memiliki bandara internasional, dan sebagai pusat perdagangan di Selatan. Masyarakat Buddha etnis Thai kebanyakan tinggal di perkotaan. Meskipun mereka minoritas di Selatan, mereka termasuk kelompok ekonomi menengah, sebagai pegawai pemerintah dan pengusaha.

3.2.2 Kondisi Sosial-Politik Masyarakat di Thailand Selatan

Selama masa integrasi Pattani, istilah untuk keempat provinsi yang mayoritas Muslim, masyarakat Thai Buddhis mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Karena mereka selalu mendominasi sebagai pemimpin utama lembaga-lembaga pemerintah Thailand Selatan. Sementara etnis minoritas lain, China kebanyakan juga tinggal di perkotaan sebagai pedagang. Kawasan 'pecinan' terbesar di Selatan adalah di Kabupaten Betong, Provinsi Yala. Sementara penduduk etnis Thai di pedesaan kehidupan ekonomi dan kedudukannya sama dengan kebanyakan Muslim, sebagai petani, nelayan atau pedagang kecil.

Sejak 1906, sesuai dengan perjanjian Inggris-Siam secara resmi mengambil alih negara-negara di Melayu Utara: Pattani, Narathiwat, Songkhla, Satun dan Yala, yang kemudian menjadi provinsi di Thailand. Sementara negara di Melayu utara yang lain: Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu oleh Inggris dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia (Yusuf, 2006: 170). Sejak penyatuan kelima negara di wilayah Melayu Utara ke dalam bagian dari Thailand, terjadi benturan budaya antara Muslim Melayu dan Buddis Thailand. Pada awal pemerintahan Thailand yang dikuasai oleh tentara Jenderal Luang Pibulsongkram, yang memimpin 1938-1944, Marshal Sarit Thanarat, 1958-1963 dan pemimpin jenderal lainnya, kebijakan nasionalisme budaya Thailand menjadi kebijakan utama.

Thaisasi – upaya penggunaan budaya dan bahasa Thai- secara kuat di seluruh Thailand, termasuk wilayah Selatan, membuat benturan budaya yang keras, yang menimbulkan resistensi sangat kuat bagi Muslim Melayu di Thailand Selatan.

Di Thailand Selatan, kerukunan antar-agama jarang terlihat. Dulu, “Muslim Pattani” sering memberikan makanan kepada para Biksu. Namun kini hal itu tidak terjadi. Itu karena perlakuan buruk yang sering diterima oleh Muslim Pattani.

Perlakuan pemerintah Thailand terhadap “Muslim Pattani” memang buruk. Mereka diharamkan untuk menyimpan buku-buku sejarah Pattani. Kesadaran historis mereka dilenyapkan oleh tangan besi pemerintah dan militer Thailand yang sangat khawatir kalau warga Muslim ini sadar bahwa mereka adalah orang-orang Melayu, dan bukan orang Thailand. Mereka dilarang keras berbicara dalam bahasa Melayu. Semua hal harus di-Thailandkan: bahasa sehari-hari, bahasa pengantar di sekolah-sekolah, dan nama-nama mereka. Tidak boleh memakai bahasa Melayu. Semuanya harus menggunakan bahasa Siam (Buddha), bahasa Kerajaan Thailand. Selain masalah bahasa dan sejarah, mereka juga dikondisikan dalam

keadaan selalu mencekam. Di setiap sudut jalan, selalu ada tentara berseragam militer lengkap dengan senjata otomatisnya.

3.3 Muslim Pattani

Wilayah kekuasaan Kerajaan Pattani adalah wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat. Dulu, wilayah ini dikenal dengan Pattani Raya. Struktur pemerintahan di Pattani tidak berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung Melayu. Penguasa tertinggi berada di tangan raja. Untuk menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh para menteri. Sejarah panjang rakyat Pattani diwarnai perang dan damai; dua keadaan ini datang silih berganti. Namun, apapun kondisinya, ternyata rakyat Pattani tetap memiliki kehidupan sosial budaya yang tidak jauh berbeda dengan kawasan Melayu lainnya. Di Pattani, ternyata juga berkembang berbagai pertunjukan dan permainan rakyat, seperti Makyong, mengarak burung, congkak, wayang Pattani adalah negeri Melayu yang terletak di tanah genting Kra, selatan Thailand.

Gambar 3.3 Bekas Wilayah Kerajaan Pattani



3.3.1 Sejarah Kerajaan Pattani

Saat ini, daerah yang dulu disebut Pattani ini telah terpecah menjadi 3 propinsi, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat. Istilah Pattani yang dipakai dalam tulisan ini merujuk pada Pattani di masa lalu, saat belum dipecah menjadi tiga propinsi. Di era kejayaan Sriwijaya, Pattani dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang terdapat

di daerah Semenanjung Melayu dan Sumatera berada dalam kekuasaan Sriwijaya. Dari abad ke-7 M hingga awal abad ke-13 M, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, dan menarik pajak dari para pedagang yang lewat dan berdagang di kawasan itu.

Pada abad ke-11 M, Islam sudah mulai tersebar luas di Pattani. Seiring perkembangan, kemudian Raja Pattani, Phya Tu Antara masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Ismail Syah Zhillullah fi al-Ardl. Pengislaman Raja Phya Tu Antara dilakukan oleh seorang ulama dari Pasai, Aceh, bernama Syaikh Said. Pada abad ke-13 M, Pattani ditaklukkan oleh kerajaan Ayuthaya. Namun, kemenangan Ayuthaya menaklukkan Pattani ini hanya berlaku secara militer, secara sosial budaya, masyarakat Pattani tetap tidak terpengaruh dengan kebudayaan Budha Ayuthaya. Pendudukan Ayuthaya atas Pattani tidak berlangsung lama. Pada abad ke-14 M, kerajaan Pattani telah independen dan berhasil mengembangkan diri menjadi kerajaan yang besar dan maju. Pada abad ke-15, hampir keseluruhan wilayah Pattani telah memeluk agama Islam. Dalam perkembangannya, kemudian banyak lahir ulama-ulama besar dari daerah ini, di antaranya adalah Syaikh Daud al-Fattani. Dengan tersebarnya Islam secara luas di Pattani, maka kemudian terbentuk dua wilayah kebudayaan di kawasan tanah genting Kra, yang dibedakan oleh dua agama: Islam dan Budha.

Di samping kemakmuran dan kedamaian, sejarah Pattani juga diwarnai konflik panjang, baik internal maupun eksternal. Berkaitan dengan tahta kerajaan, telah terjadi beberapa kali kekacauan akibat keluarga kerajaan berebut ingin menguasai tahta. Ketika Sultan Manzur Syah meninggal dunia tahun 1572 M, para pewaris kerajaan berebut ingin menguasai tahta, sehingga terjadi konflik berdarah. Dalam konflik tersebut, seluruh ahli waris tahta kerajaan yang laki-laki tewas terbunuh. Sebagai gantinya, maka kemudian naik raja perempuan (ratu). Ratu Ijau merupakan ratu pertama dalam sejarah

Pattani, dan dengan sukses, ia berhasil mempersiapkan saudara perempuannya yang lain (Ratu Biru) menggantikannya, dan seterusnya Ratu Ungu dan Kuning.

Berkenaan dengan kekuasaan para ratu ini, seorang pengembara Perancis, Nicholas Gervaise menulis pandangan yang berbeda pada tahun 1860 M. menurutnya, kekuasaan para ratu Pattani tersebut hanya bersifat simbolik. Kekuasaan yang sebenarnya tetap berada di tangan pejabat istana yang laki-laki. Gervaise menulis, walaupun Ratu Ijau adalah penguasa tertinggi kerajaan, namun ia tetap tidak diizinkan oleh para menteri untuk masuk ke dalam ruang-ruang tertentu dalam istana. Ini menunjukkan bahwa, kekuasaan ratu sangat lemah. Jika benar ratu Ijau sangat lemah, pertanyaannya adalah: bagaimana ia bisa mempersiapkan ratu-ratu berikutnya yang menggantikannya? Logikanya, dengan tradisi konflik berebut tahta yang cukup panjang di Pattani, maka, besar kemungkinan para menteri akan berebut tahta ketika Ratu Ijau meninggal dunia. Namun realitanya, Ratu Ijau berhasil mempersiapkan Ratu Biru sebagai pengganti, dan selanjutnya Ratu Ungu. Realitas ini menunjukkan bahwa, sebenarnya para ratu tersebut memiliki kekuasaan yang besar.

Selama pemerintahan Ratu Ungu, ia menerapkan kebijakan yang tidak bersahabat dengan Thailand. Pada masa pemerintahannya juga, Pattani berkembang pesat dan rakyatnya hidup aman sejahtera. Sepeninggal Ratu Ungu, anaknya, Ratu Kuning naik tahta menggantikannya. Di masa Ratu Kuning ini, Pattani bersahabat baik dengan Siam, dan Ratu Kuning sempat berkunjung ke Siam pada tahun 1641 M, sebagai simbol persahabatan. Saat itu, Ratu Kuning disambut oleh Raja Prasat Thong. Selama pemerintahan Ratu Kuning, Pattani mencapai zaman keemasannya. Digambarkan, saat itu, perdagangan internasional sangat ramai, sehingga setiap malam pelabuhan Pattani selalu diterangi cahaya lampu dari kapal-kapal pedagang

Pada tahun 1651 M, Raja Sakti dari Kelantan memaksa Ratu Kuning turun tahta. Ratu Kuning kemudian mengungsi ke Johor, namun, belum sampai ke Johor, ia meninggal dunia di Kampung Pancor, Kelantan. Sepeninggal Ratu Kuning, kekacauan dan konflik kembali terjadi karena adanya perebutan kekuasaan. Keadaan ini menyebabkan Pattani tenggelam dalam kemunduran hingga ditaklukkan oleh Ayuthaya pada pertengahan abad ke-17 M. Sebagai simbol ketundukan tersebut, Pattani setiap tahun harus mengirim Bunga Mas ke Siam⁴² kulit Melayu dan seni musik nobat. Bahkan, permainan tradisional masyarakat Budha, yaitu *menora*, juga digemari oleh masyarakat Muslim Pattani. Dalam permainan *menora*, terdapat unsur ritual, nyanyian, tarian dan lakon. Berkaitan dengan alat-alat musik, yang berkembang luas di masyarakat adalah serunai, nafiri dan rebab. Sebagai bangsa yang dikuasai oleh bangsa lain, di Pattani tetap muncul suatu perlawanan

Pada tahun 1785 M, Pasukan Siam (Ayuthaya) di bawah pimpinan Phraya Chakri kembali menyerang Pattani. Menurut catatan sejarah rakyat Pattani, serangan pada tahun 1785 M ini merupakan serangan Ayuthaya yang kelima. Empat kali serangan sebelumnya selalu dipatahkan Pattani, sehingga Pattani berhasil mempertahankan wilayahnya. Perang yang kelima ini berlangsung dalam waktu lama, walaupun akhirnya Pattani mengalami kekalahan pada bulan November 1786 M. Kekalahan ini benar-benar menghancurkan harkat dan martabat rakyat dan kerajaan Pattani. Saat itu, berdasarkan cerita dalam Hikayat Kerajaan Melayu Pattani, digambarkan kebrutalan pasukan Siam terhadap rakyat Pattani. Tindakan pertama yang dilakukan oleh tentara Siam adalah menangkap dan membunuh orang-orang Pattani yang tidak bersenjata, termasuk perempuan dan anak-anak. Seluruh harta benda dan senjata mereka rampas, istana sultan mereka bakar hingga rata dengan tanah, dan sistem kesultanan mereka hapuskan.

⁴² Gilquin, Michael. *The Muslims of Thailand*. 2005

Selanjutnya, tentara Siam membuat sistem pemerintahan sendiri di Pattani dan menempatkan orang-orang mereka. Setelah semua ini terbentuk, pasukan Siam kembali ke Bangkok dengan membawa banyak tawanan dan senjata.

Seorang pejabat Inggris, Sir Francis Light yang baru tiba di Pulau Pinang, menulis surat bertarikh 12 September 1786 kepada jenderal Inggris Lord Cornwallis di India. Dalam surat itu, Light menceritakan mengenai kekejaman tentara Siam di Pattani. Laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa diikat kaki dan tangan mereka, kemudian dihempaskan ke tanah dan diinjak-injak sampai mati dengan gajah.

Bukti-bukti kekejaman tersebut juga dicatat dalam sejarah Thai sendiri, di antaranya buku *Phrarachphong sawadarn Krung Rattanakosin Rama I*, yang menceritakan titah Raja Muda Maha Surasinghnath agar para tawanan Melayu, harta benda dan senjata mereka dimasukkan ke dalam kapal perang. Kemudian, para tawanan tersebut dibagi-bagikan pada tiap-tiap negeri. Raja Muda juga melantik Phra Cana, seorang yang bertanggung jawab dalam perang Thai-Pattani, menjadi *Chau Muang* (gubernur) di Pattani. Selain itu, Raja Muda juga memerintahkan agar tentaranya merampas semua bahan makanan di Pattani untuk dibawa ke Bangkok, sehingga orang Pattani kehabisan bahan makanan dan terpaksa makan sagu.

Setelah sekian lama berperang, akhirnya Pattani dikalahkan oleh Siam. Pada mengakui kekuasaan Siam atas Pattani. Pada tahun 1902 M, Siam melaksanakan kebijakan *Thesaphiban* yang menghapus seluruh sistem pemerintahan kesultanan Melayu di Pattani. Sejak penghapusan kesultanan Melayu tersebut, kerajaan Pattani semakin lemah dan tertekan. Konsul Inggris di Songkhla saat itu, W.A.R. Wood mengatakan bahwa, rakyat Pattani telah menjadi korban dari pemerintahan kerajaan yang salah atur (*misgoverned*).

Menurut Nureeyan Saleh, kekalahan Pattani dalam perang kelima ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu⁴³:

- Rahasia pertahanan Pattani dibocorkan oleh Nai Can Tong kepada panglima pasukan Thai. Nai Can Tong adalah pegawai istana Pattani keturunan Siam yang mendapat kepercayaan Sultan Pattani, Muhammad. Pengkhianatan Nai Can Thong telah membawa kehancuran total bagi rakyat Pattani.
- Tewasnya Sultan Muhammad ketika perang sedang berlangsung, sehingga semangat orang-orang Pattani jadi menurun.
- Jumlah tentara Thai lebih banyak dengan persenjataan yang lebih lengkap.

Sebagai response atas kekacauan dan kemunduran yang terjadi selama dalam kekuasaan Siam, pada tahun 1923 M, Tengku Abdul Kadir Kamaruddin, mantan raja kerajaan Melayu Pattani memimpin rakyat melakukan perlawanan untuk membebaskan Pattani dari kekuasaan Siam. Suasana perlawanan yang berlangsung begitu lama menjadikan keadaan bertambah kacau.

Keadaan bertambah buruk ketika Phibul Songkram naik tahta di kerajaan Siam (berkuasa dari tahun 1939 hingga 1944 M). Ia menerapkan kebijakan yang rasialis: *Thai Ratanium* (negara Thailand hanya untuk rakyat Thailand). Dengan segala cara, Phibul gencar menghapus identitas kemelayuan rakyat Pattani. Saat itu, nama-nama Melayu dan Arab harus diganti dengan nama Thai, bahkan kaum Muslim Pattani juga diwajibkan menyembah patung.

Ketika Perang Dunia II meletus, Siam berpihak pada Jepang. Saat itu, Tengku Mahmud Muhyiddin, salah seorang putera mantan raja Pattani, berdinasi dalam ketentaraan Inggris dengan pangkat mayor. Ia kemudian membujuk penguasa Inggris di India agar

⁴³ Adi Saputra dan Syahril Syarbaini, "Sebab-sebab Munculnya Konflik Separatis di Thailand Selatan" diakses dari <http://jurnal.budiluhur.ac.id/?p=231> pada tanggal 3 Oktober 2010.

mengambil alih Pattani dan menggabungkannya dengan Semenanjung Melayu. Pada 1 November 1945, sekumpulan tokoh Pattani dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil menyampaikan petisi pada Inggris agar empat wilayah di daerah selatan Siam dibebaskan dari kekuasaan Siam dan digabungkan dengan Semenanjung Melayu.

Dalam perkembangannya, ternyata Inggris tetap menjadikan kepentingan dirinya sendiri sebagai tolok ukur dalam mengambil keputusan. Dengan alasan tergantung pada pasokan beras dari Siam, maka kemudian Inggris memilih tetap mendukung pendudukan Siam atas Pattani. Pada tahun 1909 M, Inggris dan Siam menandatangani perjanjian yang berisi pengakuan Inggris terhadap kekuasaan Siam di Pattani. Dalam perjanjian itu, juga dijelaskan mengenai batas wilayah kerajaan Siam dan Semenanjung Melayu. Garis batas yang disepakati dalam perjanjian tersebut sekarang menjadi daerah batas Malaysia dan Thailand.

3.3.2 Perlawanan “Muslim Pattani” Terhadap Kerajaan Thailand

Terjadi banyak sekali pergerakan dan perlawanan untuk membebaskan Pattani dari cengkeram Thailand. Maka tidak heran jika hal ini selalu memunculkan berbagai kelompok pergerakan yang umumnya dimotori oleh ulama Pattani. Dalam sejarah perjuangannya, setidaknya ada tiga golongan ulama⁴⁴.

Ulama yang pertama adalah mereka yang terjun langsung mengangkat senjata. Di siang hari, mereka berprofesi sebagai pendidik, pengacara, pebisnis atau profesi lainnya. Namun pada malam hari mereka menenteng senjata dan terjun langsung ke medan pertempuran. Ciri-ciri gerakan ini adalah, mereka menitikberatkan pada ajaran-ajaran (ayat-ayat) yang mengandung Jihad. Mereka juga menolak pembangunan atau rencana

⁴⁴ <http://www.eraMuslim.com/berita/gerakan-dakwah/derita-Muslim-pattani-vang-terlupakan.htm>
diakses tanggal 26 Oktober 2010

pembangunan dari pemerintah Thailand. Kelompok ulama ini menjunjung tinggi pejuang-pejuang revolusi dunia, salah satu contohnya adalah Presiden pertama RI, Ir. Soekarno.

Ulama yang kedua adalah mereka yang pro terhadap pemerintah Thailand. Hal ini dilandasi prinsip bahwa mereka tidak merasa ditindas oleh kerajaan Siam. Memang, Thailand menganut sistem bebas menganut agama apapun, ini terbukti dengan berbagai ritual peribadatan juga dibolehkan di sana. Kelompok ulama ini memilih bekerja sama dengan Thailand, bahkan tidak jarang menjadi kaki tangan kerajaan Siam ketika ada rencana pembangunan di Provinsi Pattani. Mereka berpendirian bahwa Islam menjunjung tinggi perdamaian, sehingga menghindari konflik dengan pemerintah. Mirip seperti di Indonesia.

Kemudian tipe ulama yang ketiga adalah mereka yang berada di antara dua kelompok ulama lainnya. Mereka akan bereaksi menentang pemerintah Thailand jika terjadi pembantaian terhadap Muslim. Namun mereka akan diam jika merasa tidak terjadi apa-apa. Saat ini fakta bahwa tidak ada seorangpun yang secara terang-terangan mengaku menjadi pejuang, perjuangan dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*underground*).

Sejak awal, perlawanan terhadap kekuasaan Thai mengambil bentuk pemberontakan-pemberontakan keagamaan yang berusaha menghalau kekuasaan politik asing dari daerah itu. Pemberontakan besar di bawah pimpinan beberapa ulama dan bangsawan Melayu yang telah kehilangan kekuasaan, meletus pada tahun 1922. Pemberontakan itu disemangati oleh bekas raja Pattani, Abdul Kadir, yang memperoleh simpati dan dukungan materiil dari kaum bangsawan dan kaum ulama Melayu di Kelantan. Raja Abdul Kadir mendapat simpati dari kedua golongan itu karena ia dapat meyakinkan raja-raja Melayu dengan alasan bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membebaskan sesama Melayu yang sedang ditindas di seberang perbatasan. Kepada para ulama ia

mengingatkan akan kewajiban untuk membebaskan sesama Muslim dari kekuasaan Thai-Buddhis. Dengan demikian, bergabunglah sentimen keagamaan dan aspirasi politik dari lintas perbatasan untuk melancarkan suatu gerakan pembebasan rakyat Pattani Raya untuk pertama kalinya yang mencakup seluruh daerah itu. Dukungan dan simpati yang telah berhasil ia kerahkan dalam tahun 1922, sudah cukup untuk menghentikan kampanye pemerintah Thai (Thailand) untuk men-Thai-kan propinsi-propinsi di bagian selatan negara itu⁴⁵.

Bangkitnya kesadaran nasionalisme Melayu di kalangan rakyat negeri-negeri bagian utara Malaya (kini Malaysia) dan kesediaan mereka untuk memberi dukungan materiil dan politik kepada sesama Melayu di bawah penindasan kekuasaan Thai, menyadarkan para pejabat Thai bahwa penindasan identitas etnik dan kebudayaan hanya akan memancing reaksi-reaksi kekerasan. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan membina loyalitas politik, melegitimasi kekuasaan melalui partisipasi dan perwakilan dan usaha-usaha yang terus menerus untuk mengembangkan perekonomian. Cara pendekatan itu ditempuh dalam tahun 1932, ketika negara Thailand mengalami suatu transformasi konstitusi yang mengakhiri monarki absolut dan melahirkan suatu bentuk pemerintahan representatif⁴⁶.

Peristiwa penting dalam periode ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Patronase Islam 1945⁴⁷, yang bertujuan untuk memasukkan pimpinan agama ke dalam wewenang pemerintah. Akibatnya, para ulama mengambil alih pimpinan dan untuk

⁴⁵ Pitsuwan, *Islam and Malay Nationalism*, h. 49-53

⁴⁶ Peristiwa kudeta yang dilancarkan oleh Partai Rakyat (Khana rasdr) pada 24 Juni 1932 yang menjanjikan suatu permulaan baru dalam proses evolusi politik di Negara Thai, yaitu perubahan bentuk pemerintahan.

⁴⁷ Merupakan undang-undang yang diberlakukan pada masa Pridi Phanomyong yang saat itu menjabat sebagai wali negeri. UU ini mencoba menembus jalan buntu dalam hubungan antara pemerintah dan kaum ulama yang sangat berpengaruh.

keseharian kalinya membangkitkan orang-orang Melayu-Muslim yang berorientasi kepada tradisi untuk bersatu menentang kebijakan asimilasionis pemerintah yang dikenal dengan sebutan Peraturan-peraturan Kebudayaan (Kot Wattanatham) di bawah rezim Phibul Songkram.

3.3.2.1 Periode 1945-1957

Dalam periode ini, pemerintah Thai (Thailand) dengan sikap agresif berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya atas urusan sosialkeagamaan golongan Melayu-Muslim. Persoalan yang sangat peka adalah intervensi pemerintah Thai dalam bidang hukum agama yang dianggap sakral. Pengkodifikasian dan penerjemahan hukum-hukum Islam⁴⁸ mengenai perkawinan dan warisan agar seragam dan konsisten, pembentukan pengadilan-pengadilan Syaria'ah di propinsi-propinsi Melayu-Muslim dan pengangkatan hakim-hakim Muslim yang diangkat untuk mendampingi hakim-hakim Thai dalam mengadili perkara yang menyangkut urusan keluarga telah menimbulkan serangkaian protes terhadap intervensi pemerintah. kondisi ini juga yang pada akhirnya mencetuskan penentangan dan pemberontakan. Meskipun puncak pemberontakan dan tindakan kekerasan baru terjadi setelah Phibul Songkram kembali memegang jabatan Perdana Menteri pada 8 April 1948.

Adanya kecurigaan mendalam dan pengalaman getir orang-orang Melayu-Muslim akibat kebijakan asimilasi paksaan sebelum dan di masa Perang Dunia II, secara otomatis mencetuskan pemberontakan-pemberontakan yang hampir spontan di daerah Selatan Thai. Bentrok kekerasan dengan polisi dan pasukan

⁴⁸ Peran para ulama dengan sendirinya memegang pimpinan dalam periode ini. Mereka menuntut pembaruan yang besar termasuk penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di samping bahasa Thai, pembentukan sebuah majelis agama, kontrol atas urusan keuangan daerah dan tuntutan lain yang jika dipenuhi akan menghasilkan suatu tingkat otonomi yang sangat tinggi

keamanan terjadi di empat propinsi di Thailand Selatan yang mengakibatkan ratusan orang terbunuh dan ribuan lainnya mengungsi ke Malaya (Malaysia). Bentrokan paling hebat terjadi di sebuah kampung bernama Dusong Nyor di propinsi Narathiwat yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahman, memimpin lebih dari seribu orang menghadapi pasukan pemerintah dalam suatu pertempuran terbuka sehingga mengakibatkan seratus orang tewas dipihak orang Melayu. Pemberontakan Dusong Nyor yang terjadi pada tanggal 26-27 April itu hingga sekarang merupakan lambang semangat perlawanan Melayu dan masih terus mengilhami gerakan-gerakan kemerdekaan hingga kini⁴⁹.

Sementara itu, tekanan internasional bertambah besar dan peristiwa Haji Sulong⁵⁰ menyebabkan masalah Pattani mendapat perhatian Liga Arab dan PBB. Tapi, yang paling ampuh dari semua koalisi internasional yang terbentuk untuk mendukung perjuangan Melayu-Muslim itu adalah Gabungan Melayu Pattani Raya (GAMPAR) yang terbentuk dalam bulan Februari 1944. GAMPAR menjadi sebuah organisasi yang mengkoordinasikan berbagai unsur yang bekerja untuk pembebasan Pattani Raya. Organisasi ini memperoleh dukungan dari berbagai golongan dan partai politik di Malaya. GAMPAR juga berhasil menarik dukungan pimpinan Malay Nationalist Party (MNP, atau Partai Nasionalis Melayu) yang bercita-citakan penyatuan semua rakyat Melayu ke dalam Indonesia Raya. Tengku Muhyiddin, yang mengkoordinasikan

⁴⁹ Pituwan, *Ibid*, h. 124-125

⁵⁰ Haji Sulong ditangkap pada tanggal 16 Januari 1948, bersama-sama anak laki-lakinya dan tiga rekannya dengan tuduhan "sedang mempersiapkan dan berkomplot untuk mengubah pemerintahan kerajaannya yang tradisional, dan mengancam kedaulatan dan keamanan nasional dengan kekuatan-kekuatan dari luar". Persoalan Haji Sulong baru dapat diselesaikan pada tahun 1952, ketika beliau dibebaskan dari penjara setelah ditahan selama empat tahun.

bagian terbesar upaya internasional untuk meredakan ketegangan di Thailand Selatan.

Kematian Haji Sulong menandai berakhirnya pemberontakan umum yang dipimpin oleh para ulama. Kematian misterius Haji Sulong dan anak laki-lakinya, Ahmad To' mina tahun 1954 adalah merupakan suatu pengakuan kegagalan di pihak pemerintah, bahwa mereka tidak mampu mengintegrasikan golongan minoritas paling besar ke dalam negara Thai, sebagaimana yang dilakukannya pada golongan etnik di daerah lainnya. Kekuatan pengikat yang diberikan Islam kepada golongan Melayu-Muslim di Pattani Raya telah berfungsi untuk menciptakan apa yang oleh Ibn Khaldun dinamakan "kesetiakawan sosial" (ashabiyah) di kalangan masyarakat Melayu-Muslim dan memperkokoh loyalitas mereka dalam menghadapi kekuasaan negara yang semakin besar⁵¹.

3.3.2.2 Periode 1973-1982

Jatuhnya pemerintahan militer tahun 1973 dan ditegakkannya demokrasi yang berlangsung selama tiga tahun, seolah-olah mendatangkan suatu era baru dalam politik Thailand. Setiap lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Akan tetapi, seperti yang dikemukakan oleh Arong Suthasat yang dikutip oleh Surin Pitsuwan bahwa "akar konflik yang terjadi di keempat propinsi (Melayu-Muslim) itu adalah perbedaan kebudayaan dan rasa benci (antara yang memerintah dan yang diperintah)". Dengan demikian, setiap perubahan dalam kepemimpinan tentunya akan menimbulkan perubahan dalam taktik dan bahkan dalam ideologi perjuangan komunitas Melayu-Muslim untuk memperoleh hak menentukan nasib sendiri. Berbagai imbauan dan protes dalam periode ini, lebih didasarkan atas asas-asas yang diserukan oleh pemerintah Thailand sendiri seperti

⁵¹ Pitsuwan, *Ibid*, h. 127-128

kebebasan, persamaan, dan jaminan hak-hak politik⁵² bagi semua warga negara Thailand tanpa memandang asal-usul ras.

Perubahan paling penting yang terjadi pada golongan Melayu-Muslim di Thailand adalah terbentuknya berbagai kelompok militan yang secara terang-terangan bertujuan membebaskan daerah Melayu dari kekuasaan Thai, seperti Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP)⁵³, Barisan Revolusi Nasional (BRN)⁵⁴ dan Pertubohan Persatuan Pembebasan Pattani (PPPP) atau Pattani United Liberation Organization (PULO)⁵⁵ yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik perjuangan yang berbeda-beda meskipun mempunyai tujuan yang sama, yaitu membebaskan daerah Melayu-Muslim dari kekuasaan pemerintah Thailand⁵⁶.

Kecemasan mengenai kehancuran Islam dan identitas Melayu sebagai akibat proses asimilasi melalui kebijakan integrasi nasional⁵⁷ oleh pemerintah Thailand itu telah mendorong banyak orang untuk menggunakan cara-cara kekerasan untuk melawan. Munculnya berbagai kelompok gerakan separatis semakin

⁵² Tidak semua pemimpin muda golongan Melayu-Muslim menerima status quo di bawah pengawasan Thai melalui upaya pengintegrasian pendidikan sekuler moderen yang ditawarkan pemerintah. Tapi, ada juga di kalangan pemimpin muda tradisional (menimba ilmu di Timur Tengah) dan memperoleh indoktrinasi ideologi Islam yang mereka serap dari lembaga lembaga Islam di sana. Sebab Munculnya Konflik Separatis Di Thailand Selatan.

⁵³ Atau National Liberation Front of Pattani (NLFP), merupakan organisasi separatis paling tua di antara organisasi separatis yang lain. Didirikan oleh Tengku Mayiddin, putra Raja Abdul Kadir.

⁵⁴ Barisan Revolusi Nasional (BRN) atau Liberation Front of Republic Pattani (LFRP) adalah organisasi pembebasan yang dipimpin oleh seorang guru pondok, Ustadz Karim Haji Hassan.

⁵⁵ PULO/PPPP merupakan kelompok gerilya paling efektif dan paling baik organisasinya. Dibentuk pada tahun 1968 dan menjadi organisasi induk yang mengkoordinasikan banyak kelompok gerilya.

⁵⁶ Pitsuwan, *Ibid.* h. 167-181

⁵⁷ Kebijakan pasca kudeta militer tanggal 16 September 1957, dipimpin oleh Marsekal Sarit Thanarat yang mengharuskan setiap warga negara menempuh pendidikan Thai, mempunyai nama Thai dan berkebudayaan Thai.

meningkatkan intensitas kekerasan secara nyata. Selain itu, faktor ideologis telah menambah eskalasi konflik di Thailand Selatan ketika yang diserukan bukan hanya Islam saja, melainkan sosialisme Islam yang hendak ditegakkan dengan cara kekerasan. Kebangkitan fundamentalisme Islam juga semakin mempengaruhi gelombang kekerasan di mana seruan untuk menjalankan dengan ketat ajaran-ajaran Islam guna meningkatkan kesadaran beragama dan mempererat identitas etnik masyarakat Melayu-Muslim dalam periode ini.

Pada tahun 1975-1976, demonstrasi besar menjadi peristiwa penting dalam membantu kesadaran politik di kalangan massa rakyat Melayu-Muslim. Demonstrasi yang dimulai pada tanggal 11 Desember 1975⁵⁸ sampai dengan 24 Januari 1976 kian membuktikan kemahiran PULO dalam soal politik dan taktik. Antara tahun 1977 sampai tahun 1982, bentuk kekerasan paling umum terjadi adalah taktik pemerasan atau uang perlindungan, penutupan perkebunan karet, dan penculikan serta pembunuhan di empat wilayah Thailand Selatan. Kampanye teror ini sepertinya memiliki tujuan lain selain uang, yaitu perasaan tidak aman dan tidak adanya perlindungan dari pihak pemerintah setidaknya akan membuat orang-orang Thai-Buddhis keluar dari daerah konflik tersebut⁵⁹.

Tindakan perlawanan lain yang dilakukan oleh kelompok separatis adalah aksi-aksi penyerangan dan sabotase terhadap fasilitas-fasilitas infrastruktur milik pemerintah, seperti penyerangan pada para pejabat pemerintah, pusat-pusat komunikasi internasional, fungsi-fungsi raja, perusakan dan pembakaran gedung sekolah, penembakan terhadap guru sekolah, pemboman

⁵⁸ Demonstrasi 11 Desember 1975 dilakukan untuk mengutuk kekejaman dan keadilan dari pemerintah pusat terkait dengan tragedi demonstrasi 29 November 1975 di mana menimbulkan korban jiwa sebanyak 12 orang tewas dan 40 orang lainnya luka-luka

⁵⁹ Pitsuwan, *Ibid*, h. 182-187.

jembatan dan gedung-gedung pemerintah serta kantor polisi. Adapun tujuan dari aksi-aksi adalah menghalangi upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan integrasi nasional di daerah Pattani Raya. Sedangkan tujuan utamanya adalah internasionalisasi isu Pattani Raya di Thailand Selatan melalui media-media internasional sebagai akibat tindakan balasan dari pihak pemerintah yang dilakukan melalui operasi-operasi militer yang represif untuk meredam gejolak kekerasan yang sedang berlangsung, seperti : pemboman di Bandar Udara Internasional Don Muang, Bangkok, pada tanggal 4 Juni 1977, serangan bom pada saat raja sedang mengunjungi propinsi Yala pada 22 September 1977, dan pemboman stasium kereta api Had Yai (yang menghubungkan Thailand Selatan dengan Malaysia dan Singapura) pada 8 Februari 1980. Ketiga kasus di atas telah berhasil menarik perhatian luas di dunia internasional.

3.3.2.3 Periode 1995-2007

Berakhirnya perang antara Uni Soviet dan Afghanistan juga telah mempunyai suatu dampak tidak langsung atas upaya pemisahan diri di Thailand Selatan. Munculnya gerakan-gerakan separatisme baru yang dibentuk oleh para mantan veteran-veteran perang tersebut untuk kembali memperjuangkan cita-cita pendirian negara merdeka di bekas daerah kerajaan Pattani Raya. Pada tahun 1995, berdiri Gerakan Mujahideen Islam Pattani (GMIP) yang dibentuk oleh Nasori Saesaeng, seorang veteran perang Afghanistan. Tujuan dari gerakan ini sama seperti halnya PULO, yaitu untuk menciptakan sebuah negara Islam di Thailand selatan. Namun, GMIP juga mendukung Osama bin Laden yang di cap sebagai pimpinan jaringan terorisme Al-Qaeda dan memiliki hubungan dengan kelompok jaringan Jamaah Islamiyah. Selain itu, muncul juga organisasi perlawanan Bersatu walaupun tujuan dan arah perjuangan mereka masih dianggap belum jelas.

Di tahun 1995, terjadi perpecahan di antara para pemimpin inti PULO sehingga memunculkan pergerakan baru yaitu New PULO atau PULO 88 atau Abu Jihad PULO yang dipimpin oleh Dr. A-Rong Muleng sementara Haji Habeng Abdul Rohman memimpin PULO dengan sayap Sebab Sebab Timbulnya Konflik Separatisme Di Thailand Selatan militernya " Caddan Angkatan Perang." Dalam pada itu, kaum tua PULO di bawah kepemimpinan Tuanku Biyo kodoniyo masih mempertahankan keadaan tetap dan tujuan awal PULO hingga tiba saat yang tepat. Setelah beberapa para pemimpin kaum tua dan New PULO ditangkap di awal tahun 1998, dengan seketika kebimbangan terjadi di dalam organisasi ini. Sebagai hasilnya, membuat moral sebagian anggotanya menjadi begitu rendah karena kehilangan pemimpinnya. Banyak anggota kelompok perlawanan ini yang menyerahkan diri mereka kepada pemerintah Thailand walau apa yang dilakukan kedua fraksi itu tidak sebesar perlawanan sebelumnya.

Gerakan perlawanan dari kelompok separatis yang sempat padam selama beberapa tahun, pada tahun awal Januari 2004 muncul kembali dengan adanya penyerbuan terhadap markas militer Distrik Arion di Narathiwat yang menewaskan empat tentara Thailand dan hilangnya 300 senapan lengkap beserta amunisinya. Sejak peristiwa itu hingga pertengahan tahun 2007, aksi-aksi kekerasan dan teror, pembunuhan, penculikan, dan peledakan bom terus-menerus mewarnai suasana di empat propinsi di Thailand Selatan termasuk propinsi Songkla telah mengakibatkan lebih dari dua ribu korban jiwa yang tewas.

Meskipun pemerintah telah meninjau ulang kebijakankebijakannya terhadap empat propinsi di Thailand Selatan terutama status darurat militer di sana dan menghidupkan kembali badan pusat mediasi nasional namun hingga saat ini, aksi-aksi penyerangan dan sabotase terhadap fasilitas infrastruktur milik pemerintah, seperti penyerangan pada para pejabat pemerintah,

pusat-pusat komunikasi internasional, pembakaran dan perusakan gedung sekolah, penembakan terhadap guru sekolah, pemboman jembatan dan gedung-gedung pemerintah serta kantor polisi belum juga berakhir. Aksi-aksi berupa kampanye teror untuk memberi kesan perasaan tidak aman dan tidak adanya perlindungan dari pihak pemerintah kembali terulang seperti tindakan yang dilakukan menjelang akhir tahun 1980-an dan dekade awal tahun 1990-an.

3.4 Insiden dan Konflik Pemerintah dengan "Muslim Pattani".

Pada tahun 2001, kekerasan kembali terjadi di Thailand Selatan, di tahun 2001 Menteri Dalam Negeri Thailand mencatat kenaikan jumlah kekerasan, seperti terbunuhnya 19 orang anggota Polisi Thailand dan juga tewasnya 50 orang anggota pemberontak yang terjadi di tiga provinsi utama di Thailand Selatan yakni Pattani, Yala dan Narathiwat. Jumlah kekerasan terus meningkat di tahun-tahun selanjutnya, di tahun 2002 misalnya sejumlah kantor polisi diserang oleh segerombolan gerliyan yang berhasil merebut sejumlah besar amunisi senjata dan bahan peledak, insiden ini terjadi 75 kali dalam tahun 2002 dan menewaskan 50 orang anggota polisi; di tahun 2003 insiden seperti ini terus bertambah dan tercatat sebanyak 119 insiden bersenjata terjadi di tahun 2003. Pada tanggal 25 Oktober 2004, pembunuhan 84 umat Muslim di kota Tak Bai semakin memperuncing konflik⁶⁰.

Tahun 2004 konflik dan insiden kembali meningkat intensitasnya di wilayah Thailand Selatan. Tren tersebut terus meningkat hingga tahun 2007 sebagai puncak dimana terjadi insiden dan konflik dengan jumlah yang paling besar. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah korban yang tewas maupun luka-luka akibat konflik atau insiden yang muncul tersebut. Namun di tahun 2008 intensitas konflik dan insiden mengalami tren

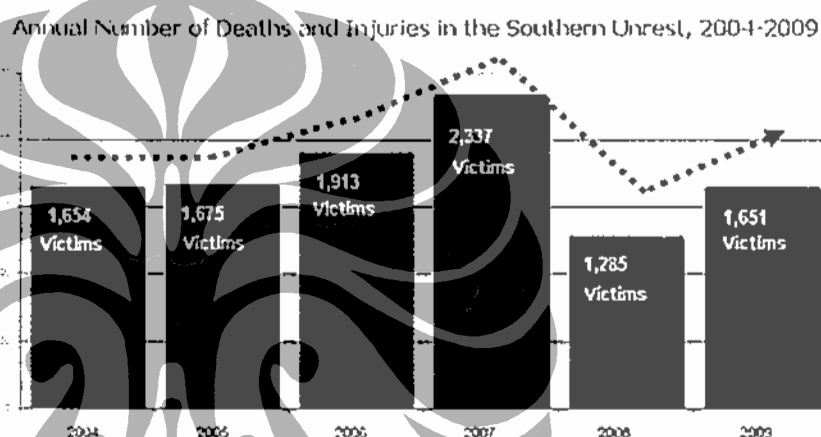
⁶⁰ Dikutip dari situs <http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2005/Feb/croissantfeb05.asp> pada tanggal 26 Oktober 2010

penurunan dan di tahun berikutnya yaitu 2009, intensitas konflik dan insiden kembali meningkat.

Berikut adalah diagram yang menggambarkan jumlah korban tewas dan luka-luka sebagai tolak ukur dari intensitas insiden dan konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan. Jumlah korban tewas dan luka-luka di hitung berdasarkan konflik dan insiden yang terjadi sejak tahun 2004 hingga 2009.

Diagram 3.1

Jumlah Korban Tewas dan Luka-luka per Tahun.



Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity, Prince of Songkla University, diakses dari www.deepsouthwatch.org/english

Dua peristiwa yang mengesankan pada tahun 2004 sangat menarik perhatian semua pihak baik di Thailand maupun di luar Thailand. Dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 2000 orang meninggal berkaitan dengan konflik di Thailand Selatan. Korban lebih banyak ditembak dan dibom oleh kelompok yang tidak dikenal, juga oleh pendekatan militer dan polisi terhadap Muslim. Pada April 2004, 30 pemuda Muslim ditembak oleh tentara di Masjid Kru Se. Masjid ini sangat bersejarah karena didirikan pada abad 15, masjid tertua di Thailand. Satu periode dengan masa kejayaan Islam pada Khalifah Abbasiyah.

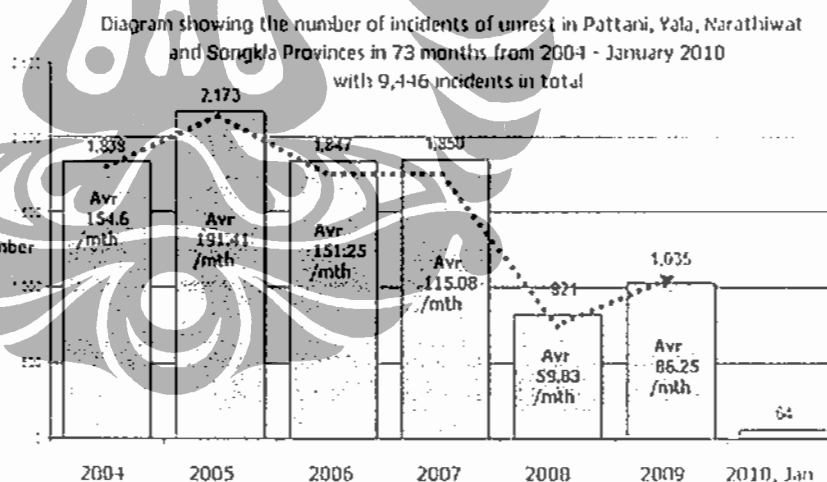
Peristiwa kedua adalah pada Oktober 2004, sekitar 175 Muslim Takbai meninggal di perjalanan, setelah mereka demonstrasi kepada pemerintah dan dimasukkan dalam truk dalam kondisi terikat tangan di belakang. Dua

peristiwa ini sangat membekas di hati Muslim, dan banyak pemuda dan masyarakat Muslim semakin menggiatkan penyerangan terhadap berbagai organ pemerintah maupun masyarakat Buddha. Reaksi Muslim selatan ini direspon negatif oleh pemerintah, dengan tetap memberlakukan darurat militer di kelima provinsi ini⁶¹.

Pada diagram sebelumnya telah diberikan gambaran tentang jumlah korban dan tewas dan luka-luka akibat insiden dan konflik yang terjadi di Thailand Selatan. Berikut adalah diagram yang menggambarkan jumlah insiden dan konflik yang terjadi di Thailand Selatan sejak 2004 hingga Januari 2010. Jika kita hubungan antara jumlah korban dengan jumlah insiden terlihat memiliki kecenderungan tren yang sama, meskipun jumlah insiden yang banyak belum tentu menimbulkan jumlah korban yang paling tinggi.

Diagram 3.2

Jumlah Insiden di Thailand Selatan tahun 2004-Januari 2010



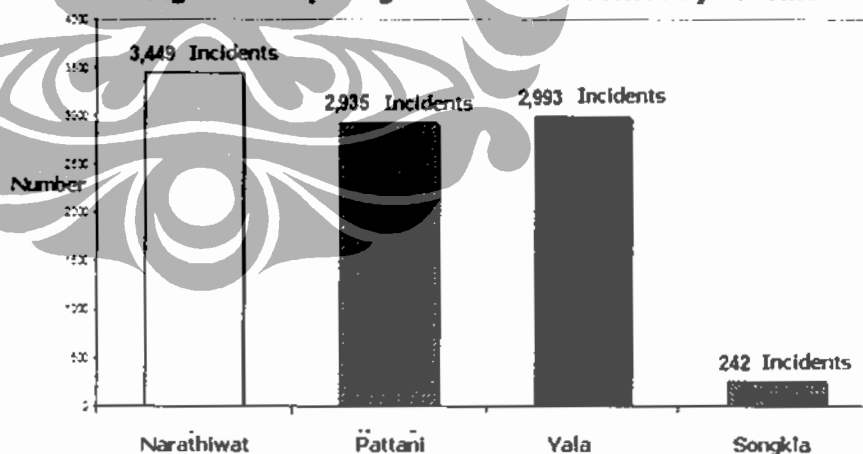
Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity, Prince of Songkla University, diakses dari www.deepsouthwatch.org/english

⁶¹ David K Wyatt, *Thailand: A Short History*. Yale University Press, 2003

Diantara kelima provinsi di Thailand Selatan, statistik enam tahun terakhir menunjukkan bahwa provinsi Narathiwat menjadi provinsi yang paling sering terjadi insiden, urutan selanjutnya diikuti provinsi Yala dan Pattani. Statistik dari kerusuhan sejak tahun 2004 hingga 2009 tercatat 3.499 insiden terjadi di Narathiwat, 2.993 insiden terjadi di Yala dan 2.935 insiden terjadi di Pattani. Perubahan dinamika insiden pun cukup menarik untuk disimak, pada tahun 2004-2005, Narathiwat menjadi provinsi dengan angka insiden paling tinggi, sedangkan pada tahun 2007-2008, Yala menjadi provinsi dengan angka insiden paling tinggi. Tercatat bahwa frekuensi insiden pada tahun 2007, menurun di semua provinsi. Namun demikian pada tahun 2009 ini, Pattani menjadi provinsi dengan angka insiden tertinggi sampai dengan awal Januari 2010. Perubahan taktik dari sektor keamanan dan situasi tertentu di tiap-tiap daerah menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika insiden tersebut.

Diagram 3.3
Perbandingan Jumlah Insiden di 4 Provinsi Thailand Selatan.

Diagram Comparing 6 Years of Incidence by Province

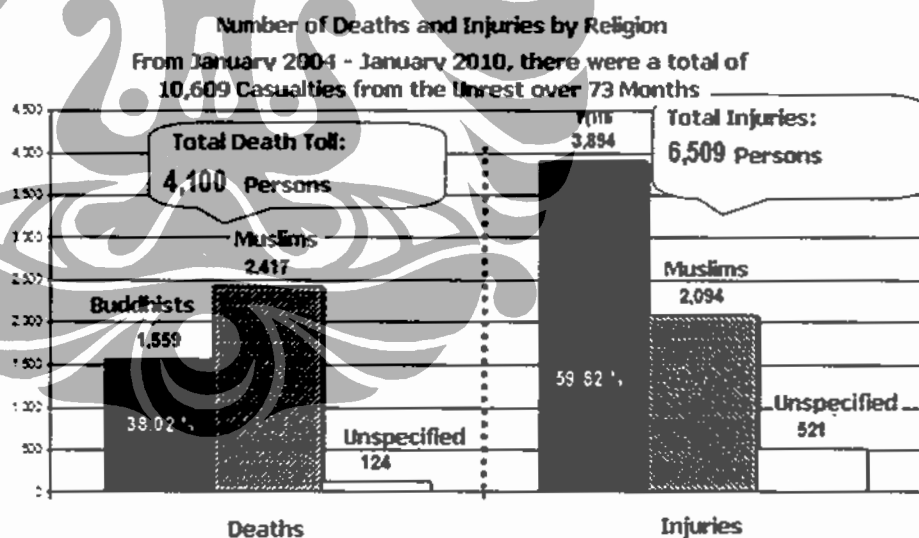


Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity, Prince of Songkla University, diakses dari www.deepsouthwatch.org/english

Peristiwa Takbai⁶² yang menewaskan Muslim sekitar 200 orang menimbulkan reaksi paling keras dari milisi Muslim, yang kemudian membalas dengan penembakan dan pemboman misterius yang menargetkan korban tentara, polisi, pegawai pemerintah Thai, etnis China dan pendeta Buddha. Hampir setiap bulan sejak peristiwa 2004, terjadi korban dipihak tentara atau Buddha. Kerusuhan ini sempat menjadi perhatian Amerika Serikat yang menawarkan bantuan keamanan untuk mengatasi 'gerilyawan' dari Selatan. Penderitaan yang dialami oleh warga Muslim di Thailand Selatan sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Warga minoritas Muslim tidak bisa hidup tenang karena berada di bawah bayang-bayang kecemasan dan drama kehidupan yang mencekam. Berikut adalah diagram yang menggambarkan jumlah korban berdasarkan agamanya:

Diagram 3.4

Jumlah Korban Berdasarkan Agama



Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity, Prince of Songkla University, diakses dari www.deepsouthwatch.org/english

⁶² Peristiwa berdarah Tak Bai yang berlangsung pada 24 Oktober 2004 merupakan peristiwa di mana ratusan orang penduduk Islam kehilangan nyawa semasa dalam tahanan tentera Thailand, dalam bulan Ramadan. Bagaimanapun kerajaan Thailand kemudiannya memutuskan bahwa tidak terdapat salah satu pihak pun yang bersalah dalam kejadian tersebut.

Selama ini sudah terjadi banyak pertumpahan darah di Thailand Selatan. Pembantaian "Muslim Pattani" hampir sama persis seperti yang terjadi di negara-negara Muslim terjajah lainnya. Misalnya saja, para Muslim Pattani dibunuh ketika sedang shalat di masjid. Selama ini tragedi berdarah di Thailand Selatan hampir jarang terdengar, ini karena pemerintah Thailand memang membatasi dan menguasai semua arus informasi tentang Thailand Selatan. Misalnya saja, orang banyak yang menganggap bahwa konflik di Thailand Selatan hanya sebuah masalah internal Thailand.

Kekerasan yang terjadi pada pertengahan tahun 2004 dan berlangsung hingga tahun 2007 memperlihatkan bahwa solusi alternatif terhadap konflik ini perlu ditemukan. Salah satunya adalah dengan meninjau ulang kebijakan asimilasi dan integrasi yang telah diterapkan pemerintah Thailand di kawasan selatan Negara itu selama puluhan tahun. Muslim Thailand yang beretnis Melayu telah tinggal di wilayah selatan Thailand sebelum Kerajaan Thai yang sekarang berdiri. Daerah tempat mereka tinggal dijadikan bagian Kerajaan tersebut pada paruh akhir abad ke-18. Muslim Melayu menentang penggabungan ini karena mereka memiliki kesultanan sendiri dan lebih suka bergabung dengan sebuah negara Melayu atau memerintah diri mereka sendiri. Kebijakan asimilasi besar-besaran yang diluncurkan oleh partai nasionalis pimpinan Pibul Songkhram pada 1940an menciptakan penolakan yang lebih besar dari kalangan Muslim Melayu. Pemerintahan Pibul mencoba memaksa orang Melayu untuk membuang jati diri mereka baik sebagai Melayu maupun Muslim. Mereka dilarang mengenakan *sarung* dan *kerudung* yang merupakan pakaian tradisional Melayu, tidak diperkenankan berbahasa Melayu dan dianjurkan untuk menggunakan nama-nama yang berbau etnis Thai. Mereka juga dilarang melaksanakan ajaran Islam karena dengan alasan agama Budha adalah agama utama di Thailand.⁶³

⁶³ Adi Saputra & Dr.Syahrial Sarbaini. 2007. Sebab-sebab Munculnya Konflik Separatis di Thailand Selatan: h. 41-59

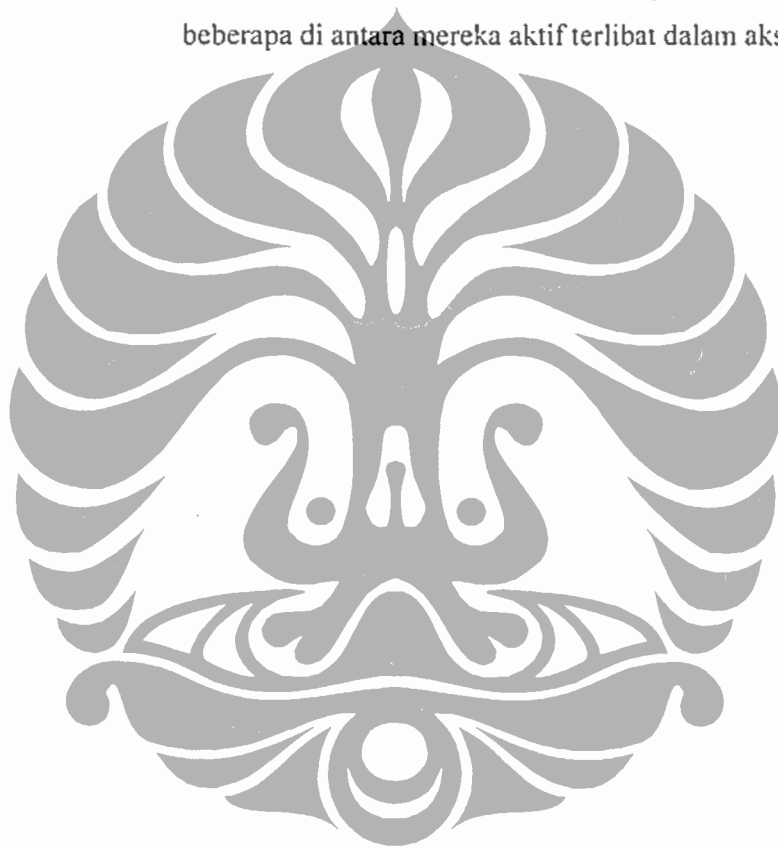
Insiden-insiden tersebut membuat seluruh dunia melihat situasi yang terjadi di wilayah Thailand Selatan. Meskipun sebagian orang tidak menyetujui adanya penggunaan kekerasan namun sebagian pihak lain menghargai pemberontakan tersebut sebagai upaya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sejak tahun 2004, pemerintah pusat memberi perhatian yang lebih kepada budget, dan hak budaya, dan memberikan kemudahan untuk mempelajari tulisan melayu dan jawi di sekolah, khususnya di pesantren.

Perubahan juga terjadi pada aspek hak asasi manusia, pada masa lalu hanya ada dua pilihan yaitu berkolaborasi dengan pemerintah atau bergabung dengan pemberontak, sekarang muncul beberapa NGO yang mengangkat berbagai isu termasuk inisiatif penggunaan bahasa melayu dalam lingkungan formal pemerintahan, yang merupakan salah satu aspirasi Muslim-melayu di Thailand Selatan.

Upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam lima tahun terakhir, dengan terbentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional yang mengantarkan dan memediasi perdamaian di Selatan. Kuatnya peran tentara di Thailand, membuat banyak rekomendasi komisi tidak bisa dijalankan. Pendidikan, pekerjaan dan fasilitas pemerintah lainnya tetap saja tidak leluasa dinikmati bagi Muslim Melayu. Persyaratan pemakaian ketat bahasa nasional Thai dan sikap yang mencerminkan nasionalisme – pro kebijakan pusat – menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah dilakukan baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komisi rekonsiliasi.

Kehadiran masyarakat internasional, antara lain Nahdlatul Ulama yang menjembatani ulama di Thailand Selatan dan pemerintah- kerajaan Thailand akan banyak membuahkan hasil jika pemerintah pusat mengakomodasi gagasan dan harapan Muslim Melayu di Selatan, yaitu penggunaan tradisi Muslim Melayu lebih terbuka, dan pengakuan pemerintah pusat atas tradisi ini, khususnya di Pattani, Yala, dan Narathiwat.

Tumbuhnya sikap anti pemerintah pusat yang dilakukan oleh Muslim di Selatan Thailand diakibatkan banyak hal. Kesenjangan ekonomi menjadi kunci atas terus berlangsungnya gerakan 'separatisme' atau dalam istilah David Brown sebagai 'separatisme etnis' atas dominasi kolonialisme internal Thailand. Kesenjangan ini telah berlangsung puluhan tahun. Akibatnya, masyarakat Muslim yang mendapat tekanan politis dan keamanan dari pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Sebagian dari mereka secara diam-diam mendukung gerakan anti-pemerintah. Bahkan beberapa di antara mereka aktif terlibat dalam aksi kekerasan.



BAB IV
ANATOMI GERAKAN SEPARATISME MUSLIM PATTANI,
RESPON PEMERINTAH DAN PROSPEK KONFLIK DI THAILAND
SELATAN

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai anatomi gerakan separatis Muslim Pattani di wilayah Thailand Selatan, organisasinya dan hubungannya dengan pihak internasional. Bab ini juga akan membahas kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Thailand terhadap masyarakat Muslim Pattani, implikasi dan faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut menjadi kontra produktif. Pada bagian akhir Bab ini akan diberikan gambaran bagaimana prospek konflik ini kedepannya serta beberapa skenario yang mungkin terjadi.

4.1 Anatomi Gerakan Separatisme Muslim Pattani di Thailand Selatan

Separatisme di Thailand Selatan, baik melalui cara legal ataupun ilegal, dapat dianggap sebagai upaya pemulihan identitas kultural dan agama Pattani yang semakin tersingkirkan oleh program asimilasi pemerintah Thailand. Munculnya gerakan separatis komunitas Muslim Pattani dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut⁶⁴:

- a. Sejarah dan penaklukan oleh Siam, dimana Pattani dulu adalah sebuah kerajaan yang termasyur dan pelabuhannya berkembang sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Penaklukan Pattani oleh Siam yang kemudian diikuti dengan penerapatan tata pemerintahan yang baru menjadi titik awal munculnya gerakan perlawanan. Masyarakat Muslim Pattani yang menyimpan kenangan sebagai kerajaan yang masyur dan menjadi pusat perdagangan yang paling ramai, menginginkan kondisi seperti dulu dan benturan kepentingan yang saling bertolak belakang inilah yang menyebabkan munculnya gerakan separatis. Akan tetapi, proses integrasi nasional tersebut terhambat karena proses tersebut dinilai sebagai bentuk disintegrasi budaya oleh para penduduk Melayu-Muslim.

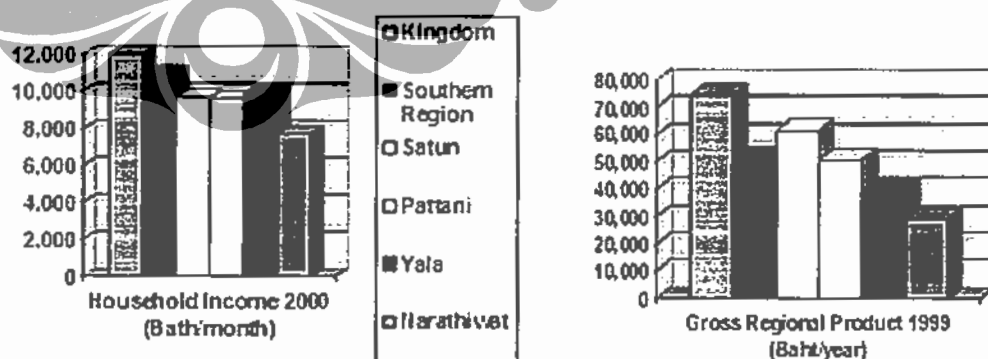
⁶⁴ David K Wyatt, *The Politics of Reform in Thailand*, 2007 diakses dari <http://journals.cambridge.org> pada tanggal 15 November 2010.

Berbagai usaha negara ke arah integrasi diterapkan pada penduduk Muslim walaupun pada kenyataannya, penduduk Muslim tersebut tidak menyetujuinya

- b. Penyebab lainnya adalah kepentingan ekonomi. Wilayah Selatan Thailand merupakan wilayah yang cukup kaya karena merupakan daerah penghasil minyak, pengembangan industri perikanan dan pengalengan ikan, dan sumber perekonomian lain. Namun demikian, dalam catatan kemiskinan tercatat bahwa masyarakat Muslim Pattani berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini dikarenakan sebagian besar akses ekonomi yang ada dinikmati anggota komunitas lain di wilayah Selatan, seperti orang Thailand yang beragama Budha dan keturunan China, sedangkan posisi ekonomi masyarakat Muslim Pattani hanyalah pelengkap bukan sebagai stakeholder.

Walaupun Thailand mempunyai track record yang bagus dalam perkembangan ekonomi antara tahun 1960-1997, perbedaan ekonomi yang begitu tajam terjadi antara daerah Selatan dengan wilayah pusat. Jika daerah termiskin di Utara Thailand dibandingkan dengan daerah selatan Thailand dalam pertumbuhan ekonomi maka daerah di selatan Thailand seperti Pattani, Yala dan Narathiwat mendapat ranking terakhir dalam pertumbuhan ekonomi.

Diagram 4.1 Pertumbuhan Ekonomi di Thailand Selatan



Sumber: UNDP, *Thailand Human Development Report 2003*, (Bangkok: UNDP, 2003).

Tabel berikut menggambarkan tingkat pendapatan perkapita wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat

Tabel 4.1 Pendapatan per Kapita Yala, Pattani dan Narathiwat

Wilayah	Pendapatan Per Kapita (2007)
Pattani	THB 59.618
Yala	THB 84.614
Narathiwat	THB 62.625

Sumber: International Monetary Fund <http://www.imf.org>

Pendapatan per kapita ketiga wilayah tersebut sangat minim dan berada jauh di bawah pendapatan rata-rata masyarakat Thailand yaitu THB 157.081 (2007). Data ini menggambarkan rendahnya tingkat perekonomian di wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat dan ketimpangan yang cukup besar jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Profesi masyarakat Muslim Pattani kebanyakan adalah nelayan, pedagang kecil, pekerja pada sektor transportasi dan buruh kasar. Dengan demikian masyarakat Muslim Pattani merasa tersingkir secara ekonomi. Masyarakat Muslim Pattani merasa hanya menerima imbas kerusakan ekologi dan kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil bumi yang diambil dari wilayahnya. Hal ini telah melahirkan perasaan tersingkir dari akses untuk memperoleh kesejahteraan secara ekonomis, yang akhirnya juga memunculkan perasaan anti pemerintah. Ditambah lagi dengan kesempatan bersaing dalam dalam lapangan kerja yang terbatas, terutama bagi mereka yang belajar di luar negeri, dengan alasan bahwa mereka tidak mengerti bahasa Thai dan sendi-sendi kehidupan masyarakat Thailand.

- c. Adanya program migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah Utara ke wilayah Selatan telah menciptakan kesenjangan ekonomi antara komunitas Muslim dengan non Muslim. Para penduduk ini dipindahkan ke Selatan dengan alasan pemerataan densitas penduduk, sekaligus meningkatkan taraf hidup penduduk, dimana setiap keluarga

diberi oleh pemerintah sebidang tanah garapan seluas 25 rai dan rumah seluas 5 rai. Tujuan sebenarnya dari program ini adalah untuk menyeimbangkan jumlah penduduk Muslim dan non Muslim di wilayah Selatan. Penduduk wilayah Utara yang dimigrasi sebagian besar adalah pegawai pemerintah di wilayah Utara dan Pusat yang diproyeksikan untuk mengisi jabatan-jabatan di wilayah Selatan. Pola ini juga memicu munculnya perlawanan masyarakat Muslim Pattani. Program tersebut telah berjalan kurang lebih 40 tahun dan dalam kurun waktu 75 tahun, proyek tersebut akan menghasilkan jumlah penduduk yang seimbang di wilayah Selatan antara penduduk Muslim dan penduduk Budha.

d. Penyebab terakhir adalah kegagalan pemerintah Thailand dalam mengakomodasi perbedaan identitas. Pada dasarnya persoalan perbedaan agama secara umum tidak menjadi begitu signifikan dalam menjelaskan munculnya perlawanan Muslim Pattani. Hal ini dikarenakan gerakan separatis yang dilakukan oleh kalangan Muslim di Thailand, hanya muncul di wilayah selatan. Namun demikian bagi wilayah Selatan, persoalan perbedaan agama menjadi salah satu faktor pemicu muncul dan menguatnya perlawanan. Hal ini tidak lepas dari penerapan kebijakan negara Thailand yang menyangkut penerapan kebijakan nasionalisme Thailand, khususnya pada masa pemerintahan Phibul Songkram dengan kebijakan yang ada berusaha untuk menerapkan konsep Ultra Chauvinistic yang menempatkan budaya Thai lebih tinggi bila dibandingkan dengan budaya lain yang memberikan efek jangka panjang bagi kelangsungan masyarakat Thailand yang multikultur, seperti banyak kasus yang menjadi contoh perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kalangan khususnya di Selatan, baik dalam bahasa, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya.

Pembangkangan terhadap Siam/Thailand dan perlawanan yang terus menerus dilancarkan oleh penduduk Muslim Pattani membuat perkembangan gerakan separatis menjadi semakin marak. Perlawanan sporadik banyak dilakukan oleh para penduduk Muslim Pattani, baik yang terorganisir maupun yang berupa gerakan bawah tanah, tanpa mempunyai afiliasi organisasi.

Gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Kerajaan Siam, yang rata-rata bertujuan untuk mengembalikan masyarakat Pattani seperti zaman keemasan dengan upaya memerdekakan masyarakat Muslim Pattani dari pengaruh Thailand. Berikut akan dibahas mengenai organisasi separatism tokoh-tokoh dan dukungan internasional terhadap pergerakan separatis Muslim Pattani di wilayah Thailand Selatan.

4.1.1 Organisasi Gerakan Separatis Masyarakat Muslim Pattani dan Dukungan Internasional

Gerakan-gerakan separatis di wilayah Thailand Selatan jumlahnya cukup banyak, sekitar 84 organisasi, namun dari sekian banyak organisasi tersebut ada tiga buah organisasi yang paling menonjol yaitu Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), Pattani United Liberation Organization (PULO) dan Barisan Revolusi Nasional (BRN).

Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP) didirikan oleh Tengku mahyiddir, anak terakhir Raja Pattani. Sejak 1977 organisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan Kesultanan Pattani sebagai kekuasaan otonom dalam Federasi Malaysia. Organisasi ini memiliki hubungan dekat dengan Partai Islam di Malaysia (Pan Malaysian Islamic Party-PMIP) ketika masih berkuasa di Kelantan. Namun BNPP berkurang pengaruhnya di tahun 1977 setelah pemimpinnya Tunku Yala Naser meninggal. Meski demikian organisasi ini berhasil membawa persoalan Pattani ke dunia Arab.

Pattani United Liberation Organization (PULO) merupakan badan organisasi yang berada di bawah kepemimpinan kaum intelektual muda. Organisasi ini mendapat dukungan finansial maupun militer dari negara Arab radikal, seperti Syria dan Libya⁶⁵. Salah satu pemimpinnya Tunku Bira Kotanila diketahui sering

⁶⁵ Pemerintah Thailand mencurigai Libya sebagai pemberi bantuan utama ke Partai Islam Se-Malaysia (PAS) yang bermarkas di Kelantan menjadi penyalur bantuan utama pada Muslim Pattani di Thailand Selatan.

berkunjung ke negara-negara Timur Tengah. Di tahun 1975 organisasi separatis ini berhasil menggerakkan 75.000 orang Melayu Pattani melakukan demonstrasi menentang pembunuhan 5 orang penduduk Melayu oleh Marinir Thai di Narathiwat. Dalam organisasi PULO terdapat tiga bidang kepemimpinan, pertama sebagai penentu Policy yang berkedudukan di Mekah Saudi Arabia. Kedua, kepemimpinan yang menangani urusan politik yang memiliki posisi di Kelantan. Ketiga, bagian yang menangani operasi-operasi militer. PULO merupakan organisasi yang sangat terlatih dibanding organisasi separatis lainnya. Kekuatan militer PULO tersebar di keempat provinsi wilayah Thailand Selatan.

Organisasi terbesar ketiga adalah Barisan Revolusi Nasional (BRN). Ini merupakan kelompok separatis Islam yang berhaluan sosialis. BRN yang beroperasi di provinsi Songkla dan Yala ingin mendirikan Republik dengan ideologi sosialisme Islam. Organisasi separatis ini dipimpin oleh seorang guru pondok, Abdul Karim Hasan, yang lebih dikenal dengan nama Ustadz Karim. Adapun yang menjadi komandan pasukannya adalah Mapiyoh Sadala. BRN memiliki hubungan dengan Partai Komunis Malaysia dan Thailand. Meskipun organisasi ini relatif kecil namun cukup mengusik pemerintah Thailand karena mendapat dukungan dari partai komunis di kedua tempat tersebut. Pada mulanya gerakan ini banyak mendapat dukungan domestik, yakni dari kalangan Muslim Pattani sendiri, maupun internasional, dari negara-negara Arab di Timur Tengah maupun Malaysia karena perjuangannya membebaskan agama dengan berlandaskan pada solidaritas etnis (Melayu) dan Islam. Namun karena organisasi ini lambat laun menjadi gerakan ideologis yang berhaluan sosialisme, maka banyak yang menarik dukungan terhadapnya baik dari kalangan Melayu Pattani, negara-negara Arab, maupun Malaysia.

Selain organisasi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula kelompok fundamentalis. Kelompok ini muncul seiring dengan

makin meningkatnya perasaan tidak aman akibat serangan terhadap Melayu Pattani. Perasaan tidak aman makin membangkitkan solidaritas etnik dan solidaritas keagamaan. Gerakan fundamentalis ini mewujudkan dirinya dalam gerakan dakwah dan tarekat. Gerakan ini meskipun sangat menekankan purifikasi Islam, namun sikap politiknya sangat keras dan radikal. Hal ini dikarenakan didalam kelompok fundamentalis terdapat pula kelompok militan seperti: Gerakan Islam Pattani, Sabilillah, dan Black December. Sabilillah dan Black December pernah melakukan pengeboman pelabuhan udara Don Muang pada 4 Juli 1977 dan pengeboman di Yala disaat kunjungan Raja Bumiphol dan Ratu Sirikit 22 September 1977.

Ketiga kelompok utama diatas menghenaki pemisahan provinsi-provinsi Selatan Thailand dan pembentukan Republik Pattani (kecuali BNPP, yang menginginkan bentuk Kesultanan Pattani) dalam suatu kerjasama ekonomi dan politik dengan Malaysia dan Indonesia. Aspirasi penyatuan dengan Malaysia lenyap seiring dengan tak adanya lagi dukungan dari negara Malaysia dan kemunduran PMIP-*Pan Malaysian Islamic Party*, yang telah berubah nama menjadi PAS-Parti Islam Se-Malaysia.

Berikut adalah gambaran faksi-faksi dari gerakan separatis muslim Pattani di Thailand Selatan⁶⁶:

Tabel 4.2 Faksi Organisasi Separatis di Thailand Selatan

Organisasi	Tahun Terbentuk	Karakteristik
BRN (Barisan Revolusi Nasional)	1960	BRN terbagi menjadi 3 sayap: BRN Congress (Sayap Militer Utama), BRN Coordinative Group (fokusnya pada agitasi politik dan sabotase), BRN Uleema (Faksi organisasi BRN yang paling terorganisir dan

⁶⁶ Dikutip dari situs <http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2005/Feb/croissantfeb05.asp> pada tanggal 04 30 Desember 2010

GMIP (Gerakan Mujahidin Islam Pattani)	1995	terbesar) Dibentuk oleh veteran Afghanistan sebagai penerus gerakan terdahulu yaitu Gerkan Mujahid Pattani, memiliki hubungan yang dekat dengan KMM (Kumpulan Mujahid Malay).
PULO (<i>Pattani United Liberation Organization</i>)	1968	Aktif dalam operasi gerilya hingga awal tahun 1990. Organisasi sekular dan diduga tidak memiliki kekuatan militer.
New PULO	1995	Terpecah dari PULO pada tahun 1995 karena perbedaan pendapat, namun dua tahun kemudian bergabung kembali dengan PULO membentuk aliansi.
BNPP/BIPP (Barisan Nasional Pembebasan Pattani-Barisan Islam Pembebasan Pattani)	1963	Memperoleh dukungan dari golongan aristokrat dan pemuka agama. Tujuan utamanya adalah kemerdekaan dan mendirikan negara Islam.
Bersatu (Barisan Kemerdekaan Pattani- <i>United Front for Independence of Pattani</i>)	1991	Tidak terkoordinir secara politik.

4.1.1.1 Barisan Revolusi Nasional

Barisan Revolusi Nasional atau BRN didirikan secara resmi pada tanggal 13 Maret 1960. Dalam perjuangannya BRN membina hubungan dengan berbagai negara. Aljazair adalah salah satu negara yang didekati oleh BRN. Di Aljazair, yang didekati adalah partai FLN (National Liberation Front) yang berkuasa disana. Kontak pertama dengan FLN dilakukan oleh Masari Savari pada 1974, ketika sedang mendapatkan beasiswa untuk studi di Aljazair. Setelah dia kembali ke Pattani, saudaranya yang bernama Sofian menggantikan posisinya. Sofian kemudian ditunjuk sebagai wakil BRN di Aljazair. Tahun 1975 Sofian beserta lima orang penerima beasiswa dari Aljazair kembali ke Pattani. Pada tahun-tahun berikutnya, ada beberapa mahasiswa yang dikirim ke Aljazair. Pengiriman ini kemudian terhenti setelah ada konflik internal di BRN tahun 1979.

Negara lain yang dianggap membantu BRN adalah Indonesia dan Malaysia. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung 1959 telah memberikan spirit kemerdekaan bagi seluruh bangsa di Asia dan Afrika. Akibatnya masyarakat Pattani menginginkan lepas dari penguasa Thailand. BRN itu sendiri berdiri sebagai manifestasi perjuangan yang dilancarkan oleh Presiden Sukarno melalui Dr. Burhanuddin Al Hilmi (Presiden PAS Malaysia).

Pada 1962, para pemuda Pattani dikirim ke Indonesia untuk latihan kemiliteran. Tahun 1964 mereka dikirim kembali akibat adanya konfrontasi militer antara Indonesia dan Malaysia. Mereka kemudian ditangkap oleh tentara Gurkha (Inggris) dan pasukan gabungan dari New Zealand dan Australia. Di Malaysia, BRN dianggap sebagai elemen anti nasional dan semenjak itu mereka selalu ditekan. Sementara itu Presiden Sukarno harus turun dari jabatannya akibat peristiwa G-30-S/PKI.

Pada 10 Oktober 1968, BRN mendirikan sayap militer yang diberi nama ABREP (Angkatan Bersenjata Revolusi Pattani-*The Revolutionary Armed Forces of Pattani*)⁶⁷ yang dipimpin oleh seorang Panglima bernama Idris.

Tahun 1970 adalah awal perpecahan BRN. Karena tidak puas dengan kepemimpinan BRN, pada 1970 Yusof Chapakiya menyatakan keluar dari BRN dan mendirikan organisasi baru yang bernama PRNS (Partai Revolusi Nasional Selatan – *National Revolutionary Party of South Thailand*). Tahun 1972, Tengku Jalal Nasir juga keluar dari BRN dan kemudian mendeklarasikan berdirinya BNPP (Barisan Nasional Pembebasan Pattani – *Pattani National Liberation Front*), dan Idris yang sebelumnya sebagai Panglima ABREP, kemudian bergabung dengan dia dalam BNPP sebagai Panglima.

Tahun 1973, Karim Hassan memimpin kampanye militer untuk menentang kekuasaan Thailand. Dia memimpin ABREP berperang secara gerilya melawan posisi militer Thailand di Pattani. Tahun 1975, sebuah brigade gerilya kota didirikan. Brigade ini dipimpin oleh Masari Savari dan Lukman Iskandar.

Tahun 1977, Lukman ditugaskan oleh Karim untuk memimpin kekuatan polisional yang diberi nama KOGAP. Tetapi kemudian Lukman ikut terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan pemerintah Malaysia secara tidak konstitusional. Dia bergabung dengan tentara Malaysia yang merencanakan mengambil alih kekuasaan pemerintah. Akibatnya, para pemimpin militer BRN di Malaysia ditangkap. Pemerintah Malaysia juga mengecam keterlibatan anggota BRN dan meminta pertanggungjawaban BRN. Dewan pusat BRN kemudian bersidang dan memutuskan bahwa penugasan Lukman (oleh Karim) dan berdirinya KOGAP adalah illegal.

⁶⁷ Nama ABREP terinspirasi dari nama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Dalam sidang lain yang diselenggarakan oleh Dewan Pusat, Karim dan Lukman diberhentikan dari BRN. Tetapi kemudian Lukman menentang dan memimpin pemberontakan terhadap Dewan Pusat BRN. Gerakannya ini didukung oleh ABREP, Gerilya Kota, dan Kepolisian. Tiga anggota Dewan Pusat ditembak oleh pemberontak. Tiga anggota ditahan dan dipenjara oleh penguasa Thailand. Sementara itu, Amin (Presiden BRN) dan tiga anggota Dewan Pusat yang lain terbang keluar negeri dan hidup di pengasingan di Malaysia.

Akhir 1977, Lukman ditahan oleh Polisi Rahasia Malaysia, karena dianggap melanggar *Internal Security Act (ISA)*, yaitu dituduh berkonspirasi untuk menggulingkan pemerintah Malaysia. Dia dipenjara selama empat tahun, tanpa mengalami proses pengadilan.

Pada 1979, ABREP, Gerilya Kota, dan Kepolisian, memproklamkan dan menyatakan berada dalam BRN, di bawah Dewan Komando Revolusi. Karim Hassan kemudian diangkat menjadi Presiden BRN dan Ahmad Subarjo (seorang mahasiswa Indonesia) diangkat sebagai Sekretaris Jenderal BRN. Setelah Lukman keluar dari penjara Malaysia, 1981, dia diangkat menjadi "Menteri Luar Negeri" BRN.

Tahun 1984, Panglima ABREP dan Deputy Kepolisian memimpin pemberontakan untuk menentang Karim. Kemudian Karim memecat Panglima dan mengangkat Abu Bakar sebagai Panglima ABREP yang baru. Setelah pemberontakan ini, Lukman menutup kantor perwakilan di Aljazair. Tahun 1992, Lukman kembali ditahan oleh Polisi Rahasia Malaysia, atas tuduhan pelanggaran ISA. Dia dipenjara selama tiga tahun.

Tanggal 28 April 1992, Abu Bakar menandatangani persetujuan perdamaian awal dengan Komando Militer Selatan.⁶⁸ Perundingan

⁶⁸ Persetujuan perdamaian 1992 ini ditandatangani ketika rejim junta militer berkuasa di bawah kepemimpinan Jeneral Suchinda (yang membunuh ribuan demonstran mahasiswa tak berdosa di

kedua diadakan pada 1995. Atas perintah Karim, Lukman dan Sofian memimpin delegasi untuk bernegosiasi dengan penguasa Thailand yang diwakili oleh Komando Militer Selatan yang dikenal dengan sebutan “Tentara Wilayah Keempat”.⁶⁹

Perundingan belum tuntas, Karim meninggal dunia, tahun 1997. Mereka mengalami kesulitan untuk mencari penggantinya. Akhirnya pada 1998, mereka sepakat untuk mengangkat Lukman sebagai Presiden dan Sofian menjadi Sekretaris Jenderal BRN. Deputi Sekretaris Jenderal diserahkan kepada Zagari. Sementara Deputi Presiden BRN dipercayakan kepada seorang *Indonesian graduate candidate* yang dikenal dengan panggilan Abang Ding.

Persetujuan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (BRN dan pemerintah Thailand), hanyalah tampak nyata dalam kertas, tetapi tidak pernah diimplementasikan oleh pemerintah. Intelijen Militer, Dewan Keamanan Nasional, dan Dewan Rahasia, memainkan peran untuk merusak dan membatalkan apa yang telah disepakati. Cara yang mereka tempuh adalah dengan mengatur dan mendorong adanya berbagai konflik di antara orang-orang Muslim. Dengan cara ini diharapkan, kekuatan Muslim akan surut dan mereka tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menuntut merdeka. Padahal menurut BRN: “*We have proved to them that we*

Bangkok). Setelah penandatanganan itu, Suchinda terbang ke luar negeri. Kemudian diadakan pemilihan umum yang dimenangkan oleh Partai Demokrasi Thailand. Chuan Lekpai yang memimpin partai itu, menjadi Perdana Menteri Thailand, 1994.

⁶⁹ Persetujuan Perdamaian kedua ini ditandatangani pada 8 April 1995, ketika Chuan Lekpai berkuasa. Pada September 1995, Chuan ditekan untuk mengadakan pemilu dan hasilnya partai yang dia pimpin kalah. Kemudian Banharn menjadi Perdana Menteri. Pada Agustus 1996, Banharn dituntut untuk segera mengadakan pemilu dan dia terlempar dari kursi Perdana Menteri. Partai yang dipimpin Jenderal Chavalit memegang kekuasaan. Bulan Juni 1997, Thailand dihantam oleh krisis ekonomi yang menyebabkan Chavalit jatuh dan Partai Demokrat pimpinan Chuan kembali memegang kekuasaan.

*are genuine and sincere to the peace accord. We stopped fighting, bombings, arsons and other type of sabotage.*⁷⁰

Oleh karena itu, Dewan Komando Revolusi BRN, memutuskan untuk merencanakan suatu strategi baru, yaitu dengan memperhatikan hal-hal berikut:⁷¹

- a. *We must re-establish relationship with FLN, our elder brother who taught us in the modern revolution of Pattani. We prove this with two Peace Agreements signed with Thai authorities.*
- b. *We must also establish relationship with the PDI-P (Democrat Party of Indonesia struggle), led by Megawati Soekarnoputri (daughter of late President Sukarno) whose party is seen as continuation of PNI vision and mission.*
- c. *We have to establish stronger contact with the Pan Islamic Party of Malaysia (PAS) whom we regard as our shelter, protector and caretaker since our early days of 35 years guerrilla warfare against Thai authorities.*
- d. *We must re-establish firm relationship with PLO because they served as our teacher, brother and guardian.*

Di samping menerapkan strategi baru, BRN juga akan mengadakan suatu reformasi yang amat vital dan penting. Bidang yang ingin direformasi adalah politik (baik dalam maupun luar negeri), militer, ekonomi, pendidikan dan budaya, serta reformasi spiritual.⁷²

Reformasi Politik Dalam Negeri. Menyediakan berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai hasil dan inisiatif perdamaian kepada masyarakat. Pada waktu yang sama, menekan penguasa Thailand untuk segera mengimplementasikan berbagai hal yang telah disetujui dalam perdamaian. Mengingat BRN tidak dapat

⁷⁰ Lihat "Self Determination" dalam (<http://republicofpattani.tripod.com/brn/>).

⁷¹ *Ibid*

⁷² Reformasi di berbagai bidang tersebut diumumkan pada 13 Februari 2000 oleh Departemen Penerangan BRN. Lihat *Ibid*.

menguasai media local, maka kampanye akan dilakukan melalui masyarakat dan organisasi politik di Thailand. BRN akan berusaha memasukkan kader dan pemimpinnya untuk ikut mempengaruhi masyarakat dan organisasi politik.

Reformasi Politik Luar Negeri. Membangun hubungan yang lebih intensif dan kuat dengan Negara-negara dan organisasi politik yang mendukung perjuangan BRN, FLN, PDI-P, PAS dan PLO adalah yang penting dan harus didekati. Mereka diharapkan dapat membantu BRN untuk membawa masalah Persetujuan Perdamaian dalam forum ASEAN, OKI dan PBB. Lebih-lebih pada Thailand agar segera mengimplementasikan apa yang telah tertulis dalam Persetujuan Departemen Luar Negeri BRN dipimpin oleh Sofian Savari dan wakilnya adalah Zahari. Kebijakan luar negeri BRN tidak mengalami perubahan secara radikal.

Reformasi Militer. BRN akan merestruktur seluruh organisasi militernya. Mereka akan mengadakan gerakan yang lebih ofensif melawan posisi militer Thailand. Untuk merestruktur militer ini, ada lima hal yang akan dilakukan. *Pertama*, rekrutmen baru dengan latihan militer singkat di beberapa Negara, terutama di Aljazair, Indonesia atau Palestina. *Kedua*, persenjataan baru dan tambahan yang akan dilakukan dengan menambah budget pembelian senjata. Diharapkan beberapa Negara asing bias membantunya. *Ketiga*, ofensif militer yang lebih keras dengan cara mengkonsolidasi program yang disiapkan untuk perang gerilya hutan dan kota, sampai BRN kembali ke meja perundingan untuk mencapai persetujuan perdamaian akhir dengan penguasa Thailand. *Keempat*, bantuan logistic dan financial baru. Hal ini akan dilakukan dengan meningkatkan pajak dan bantuan keuangan dari masyarakat. *Kelima*, menciptakan unit destruktif baru setelah diskusi akhir diadakan dengan dukungan bangsa-bangsa di dunia.

Reformasi Ekonomi. Dalam reformasi ekonomi, BRN akan mengusulkan kepada Dewan Legislatif Propinsi Pattani untuk

mendapatkan 20% royalty hasil minyak dan gas dari MTJA (*Malaysia-Thailand Joint Authority*) dan JDA (*Joint Development Area*), yang dikuasai oleh Perusahaan Minyak Malaysia (PETRONAS). BRN menganggap bahwa kerjasama Malaysia-Thailand itu merugikan masyarakat Pattani. Dari hasil minyak dan gas, Malaysia memperoleh 50% dan Thailand mendapatkan 50%. Sedangkan masyarakat Pattani 0%.⁷³ Oleh karena itu, mereka mengajukan untuk mendapatkan hasil dari minyak dan gas sebesar 20%. MTJA dan JDA dianggap oleh sebagian masyarakat Pattani, telah merampas hak mereka, sehingga ada yang bersuara lantang untuk menentang kerja sama tersebut. Akan tetapi, Malaysia justru membantu pemerintah Thailand untuk menekan rakyat Pattani. Tokoh yang menentang MTJA dan JDA ditangkap dan dideportasikan ke Thailand untuk kemudian dihukum mati dengan tuduhan melakukan subversi atau melawan kekuasaan Raja Thailand.⁷⁴

BRN akan mendorong adanya pembangunan pembangkit listrik raksasa, tempat pemroses gas, dan pabrik penyulingan minyak di Propinsi Pattani. Walaupun demikian, sebagian masyarakat Pattani ada yang menolak pembangunan ini, karena dianggap hanya akan menguntungkan kapitalis Malaysia dan Thailand sementara orang Pattani tidak memperoleh apa-apa.⁷⁵ BRN juga menginginkan pembangunan pelabuhan Pattani sebagai pelabuhan terbesar dan termodern di Asia Tenggara dan sebagai wilayah industri pengalengan ikan terbesar.

Secara formal, BRN juga akan mendukung usaha kaukus ekonomi yang dibuat oleh Indonesia, Malaysia dan Thailand dengan

⁷³ Riza Sihbudi "Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara". Puslitbang Politik dan Kewilayahan-LIPI. 2002. h.103

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ Riza Sihbudi "Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara". Puslitbang Politik dan Kewilayahan-LIPI. 2002. h.104.

sebutan IMT-GT (Indonesia, Malaysia & Thailand Growth Triangle). Walaupun demikian, IMT-GT bias diartikan juga sebagai penekanan ekonomi terhadap masyarakat Pattani. IMT-GT dapat dilihat pula menempatkan Pattani sebagai “buffer state”. Hal ini mengingat pembukaan perbatasan bagi semua pelintas selama 24 jam; pembebasan pajak; pemberlakuan satu mata uang; dan kartu intelijen dipakai menggantikan passport.⁷⁶

Pembentukan IMT-GT juga dapat melancarkan jalan bagi masyarakat Malaysia untuk memasuki dunia kapitalis. Mereka dapat membuat perusahaan besar, memperoleh beberapa properties dan mendapatkan ijin dari pemerintah Thailand. Putra PM Mahathir, misalnya, membeli ribuan hektar tanah di lima propinsi; dan memperoleh hak mengontrol ratusan truk (300-400 sehari) yang bergerak hilir mudik antara Penang dan Hatyai.⁷⁷ Hatyai akan diusahakan untuk memperoleh status ibukota Pattani dan Yala sebagai pusat Administrasi. Hatyai akan melayani rute internasional bagi turis asing.

Reformasi Pendidikan dan Budaya. Meningkatkan status lembaga pendidikan tinggi Islam menjadi universitas adalah vital. Setidaknya ada dua lembaga yang pantas ditingkatkan menjadi universitas. Mereka menempatkan bahasa Melayu sebagai agenda tertinggi untuk diakui sebagai bahasa resmi kedua, selama masa transisi. Tanpa ini, reformasi budaya akan sulit.

Reformasi Spiritual. Di era yang serba cyber ini, reformasi spiritual sangat penting. Pemimpin baru semestinya mampu menunjukkan, melindungi, dan mengarahkan masyarakat menuju visi dan misi partai yang benar.

Selain itu, masyarakat Pattani menganggap ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam rangka perbaikan hubungan Pattani dan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Riza Sihbudi “Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara”. Puslitbang Politik dan Kewilayahan-LIPI. 2002. h.105

pemerintah Bangkok. Masalah kota Hatyai adalah salah satunya. Hatyai yang menjadi kota kedua terbesar di Thailand (setelah Bangkok), dikenal sebagai "Surga Laki-laki". Kota ini dibangun bukan untuk dinikmati masyarakat Pattani. Ratusan hotel dibangun setiap tahun di Hatyai, dengan mengerahkan tenaga kerja dari utara (Budhis Thailand). Ironisnya, nilai moral dan Islam justru hancur. Perbandingan jumlah penganut Islam di Pattani dan yang lainnya sebagai berikut: 20 tahun lalu, Muslim 85% yang lain 15%; tetapi sekarang (2000), perbandingan berubah menjadi Muslim 80% yang lain 20%. Di kota Hatyai sendiri, masyarakat Muslim tinggal 40%.⁷⁸

Kebanyakan usaha di Pattani dikuasai oleh Cina Thailand. Pabrik pengalengan makanan dan pengalengan ikan, dimiliki oleh Cina. Mereka mengambil para pekerja dari wilayah utara yang mayoritas Budha. Produk makanan kaleng kebanyakan dipasarkan ke negara-negara Arab dan Muslim. Produk itu diberi label "halal". Untuk mendapatkan label "halal" diperlukan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Sheikhul Islam Thailand. Menurut BRN, kebanyakan Sheikhul Islam diragukan kejujurannya. Hal ini mengingat pabrik-pabrik yang dimiliki oleh non-Muslim itu mempekerjakan 100% pekerja non-Muslim, tetapi sertifikat tetap masih bias dikeluarkan. Satu sertifikat berharga antara 5-10 juta Baht Thailand. Sheikhul Islam juga dianggap ikut menekan masyarakat Pattani. Sebagian besar mereka dipilih dari Muslim Thailand, bukan Muslim Melayu.

Masalah tenaga kerja ini juga terjadi pada pabrik karet. Thailand adalah negara pengeksport karet terbesar kedua (setelah Indonesia). 80% dari produksi karet Thailand dihasilkan dari lima propinsi daerah selatan. Tetapi kebanyakan pekerja pabrik didatangkan dari utara yang non-Muslim. Hal ini karena masyarakat Pattani menolak dibayar dengan upah rendah, sedangkan pekerja

⁷⁸ Ibid

pabrik di wilayah utara mau dibayar dengan rendah. Pabrik-pabrik karet yang kecil kebanyakan dimiliki oleh orang Islam. Sedangkan pabrik-pabrik karet yang besar dimiliki oleh orang Cina. Pengaturan harga ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi usulan harga dan jumlah produksi karet disampaikan oleh penguasa Cina.⁷⁹

BRN mengakui, memang tidak ada tekanan ekonomi secara langsung kepada masyarakat Pattani. Tetapi kebebasan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada Cina dan datangnya pekerja dari wilayah utara yang Budha, akan berdampak pada ekonomi masyarakat Pattani. Hal ini ditambah lagi dengan adanya IMT-GT yang membebaskan jalur perbatasan dengan Malaysia. Nernagai kebijakan pemerintah Bangkok itu menjadikan masyarakat Pattani semakin terjepit dalam berusaha. Ditambah lagi, adanya masalah yang berhubungan dengan moral dan tingkah laku masyarakat, terutama pelacuran. Di Thailand dikenal industri pariwisata yang merupakan penghasilan terbesar negara itu. Industri pariwisata itu menyumbang sekitar 5 milyar dollar Amerika. Dan sumbangan terbesar industry pariwisata adalah pelacuran.

Untuk mengatasi berbagai hal di atas, masyarakat Pattani menuntut para wakilnya di parlemen untuk dapat mengubah keadaan. Mereka mulai dengan menuntut royalty yang dihasilkan dari minyak dan gas. Mereka juga meminta pembangunan kilang minyak di Pattani, bukan di Propinsi Singkhla. Bahkan masyarakat menuntut pengelolaan minyak dan gas dilakukan oleh mereka sendiri, bukan oleh pemerintah Bangkok.

Akan tetapi, mereka justru kadang-kadang menghadapi hambatan dari kalangan pemimpin Pattani sendiri. Misalnya,

⁷⁹ *Ibid.* Kekayaan karet ini juga diakui oleh Mansour Musthafa, Muhammad Nakdee Waenawae, dan Adam Mamat (Pengurus Persatuan Mahasiswa Islam Pattani Thailand di Indonesia – PEMIPTI). Dalam wawancara pada 5 Desember 2000, mereka mengaku bila Pattani bias merdeka, maka kondisinya akan lebih kaya daripada Brunei atau Singapore. Hal ini mengingat kondisi alam yang subur dan menghasilkan karet, beras, peternakan, buah-buahan, dan sebagainya. Bangkok menurut mereka tidak punya apa-apa.

Komandan Militer wilayah Selatan (yang menguasai 14 propinsi selatan) adalah seorang Melayu, tetapi dia sama sekali tidak mempunyai semangat nasionalisme. Dia berbahasa Thai dan menolak penggunaan bahasa Melayu. Kebanyakan kontrak kepentingan tentara diberikan kepada Budha Thailand. Tidak ada kontrak yang dimenangkan oleh orang Muslim dalam suplai makanan, konstruksi, dan pengadaan barang lainnya. Juru bicara Parlemen juga seorang Melayu yang menikahi seorang gadis Thai. Dia lebih tampak bagaikan seorang bangsawan Thai daripada seorang Melayu. Kekayaannya cukup banyak. Dia pernah menjadi Menteri Transportasi (1996-1998) dan mempunyai perusahaan yang menguasai seluruh taksi airport. Dia seakan tidak tahu kemiskinan yang ada dalam masyarakat Pattani.⁸⁰

Memang kebanyakan pemimpin Pattani takut mendirikan bisnis di wilayah Pattani. Seridaknya ada dua hal yang membuat mereka enggan berbisnis di Pattani. *Pertama*, keuntungan yang diperoleh hanya sedikit. *Kedua*, ketakutan diberlakukan hukum Islam yang tidak menguntungkan mereka.

Tampaknya, ada kesenjangan antara apa yang diperjuangkan dengan apa yang dilakukan sehari-hari. Ada catatan bahwa pemimpin BRN mempunyai kekayaan yang berlimpah dan bahkan menginvestasikan dananya di Malaysia, Arab Saudi, dan juga Indonesia. Sementara itu, tentara mereka berjuang di lapangan dengan susah payah dan tidak kenal lelah. Dikatakan lebih lanjut, *"Most of the leaders are hypocrites. The clerics, sought for alms but they never give any alms to the poor. They never pay zakat."*⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

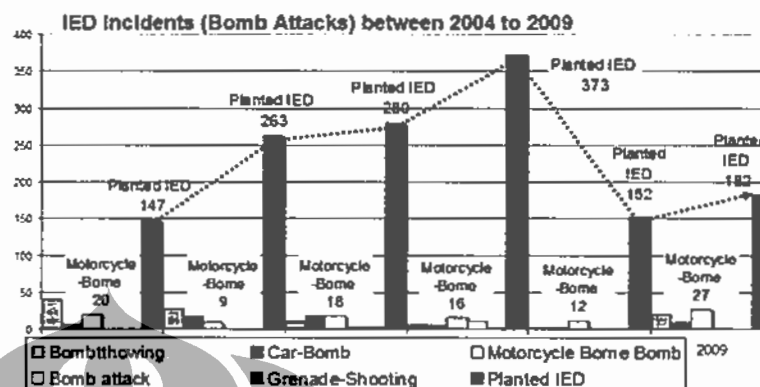
4.1.2 Target dan Korban Kekerasan Separatisme di Thailand Selatan.

Analisis dari sifat dan karakteristik dari kekerasan di Thailand Selatan dalam enam tahun ini berkaitan erat dengan variabel target dan korban dari kekerasan. Jika seluruh korban dari insiden yang terjadi dari Januari 2004 hingga Januari 2010, jumlah korban, baik korban tewas dan korban luka-luka mencapai angka 10.609 orang. Korban tewas sebesar 4.100 orang dan korban luka-luka mencapai 6.509 orang. Tingkat persentasi jumlah korban luka-luka mencapai 61.35% dan korban tewas 38.65%. Hal ini menggambarkan bahwa persentasi korban luka-luka lebih besar bila dibandingkan dengan korban tewas. Rasio antara korban luka-luka dan korban tewas tidak mengalami perubahan yang signifikan dan cenderung stabil sejak 2005 hingga 2009. Pada tahun 2005 persentase korban tewas sebesar 38.65%, pada tahun 2006 sebesar 37.38% dan di 2009 sebesar 34.34 persen.

Strategi dari para pemberontak masih berupa aksi penembakan, penggunaan bahan peledak dan pembakaran. Aksi-aksi pembakaran menurun secara drastis sejak Agustus 2007 dan tetap bertahan pada jumlah yang tidak relative lebih kecil. Aksi-aksi serangan bom pada tahun 2007 mencapai titik tertinggi yaitu sebanyak 373 insiden pengeboman, tetapi pada tahun 2008 jumlahnya menurun menjadi 152 insiden. Pada tahun 2009 insiden pengeboman kembali menunjukkan tren peningkatan menjadi 182 insiden, sebagian besar diantaranya adalah aksi pengemboman dengan menggunakan sepeda motor. Dengan kata lain 27 insiden dari pengeboman menggunakan sepeda motor dalam tahun ini mengindikasikan bahwa serangan bom dapat meningkat pada tahun 2010 ini.

Diagram 4.2

Insiden Pengeboman antara tahun 2004-2009



Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity, Prince of Songkla University, diakses dari www.deepsouthwatch.org/english

Selain itu, selama enam tahun terakhir, karakteristik target atau korban kekerasan juga harus dipantau. Dari latar belakang pekerjaan para korban kekerasan selama enam tahun terakhir, dapat dilihat bahwa sebagian besar korban adalah warga biasa. Ketika mempertimbangkan jumlah korban yang meninggal dan yang terluka warga biasa tanpa jabatan/posisi dalam pemerintahan adalah korban yang paling banyak (untuk kematian dan cedera) yaitu 4.403 orang, diikuti oleh personel militer 1.433 orang, sementara polisi menempati peringkat ketiga sebanyak 966 orang, tempat keempat milik Relawan sekitar 420 orang. Di tempat kelima adalah kamnans (algojo Tambon), kepala desa atau asisten sekitar 335 orang, sementara karyawan pemerintah menempati peringkat keenam yaitu sekitar 308 orang, sedangkan sisanya tersebar di antara berbagai kategori.

Jika dihitung jumlah persentase atau proporsi dari semua yang meninggal dan yang terluka, ditemukan bahwa warga biasa tercatat sebesar 50 persen dari seluruh jumlah korban baik korban tewas dan luka-luka, diikuti oleh militer di 16 persen, polisi di 11 persen, relawan sekitar 5 persen, kamnans dan kepala desa dan kepala asisten di sekitar

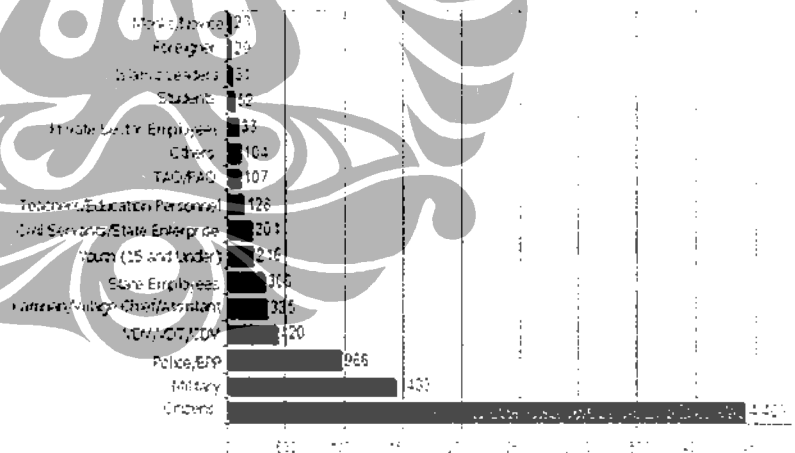
5 persen, pegawai negeri sekitar 4 persen, sedangkan sisanya milik kelompok lain.

Sebuah pengamatan penting dari data ini adalah bahwa statistik korban di antara kamnans dan kepala desa baru-baru ini dianalisis sebagai "berpotensi" menjadi akibat konflik pribadi atau untuk kepentingan politik. Kamnans dan kepala desa hanya menyumbang sekitar 5 persen dari semua korban, sementara pemimpin Tambon Administrasi Organisasi (TAO) dan politisi lokal hanya menyumbang 1 persen dari korban. Dengan demikian hipotesis bahwa konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan adalah konflik pribadi dan kekuasaan politik tidak dapat menjelaskan jumlah korban warga biasa yang lebih tinggi, khususnya di kalangan polisi, militer, serta VDT / VDV yang terlibat langsung dalam memerangi pemberontakan atau terorisme yang terjadi di daerah tersebut.

Diagram 4.3

Perbandingan Korban Januari 2004-Januari 2010

Comparison of Casualties (Jan 2004 - Jan 2010)



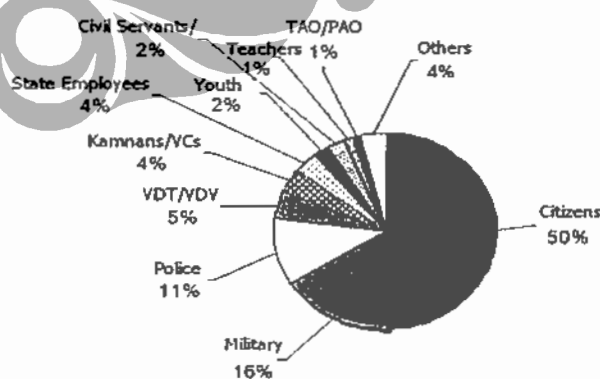
Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity, Prince of Songkla University, diakses dari www.deepsouthwatch.org/english

Namun, jika mempertimbangkan perubahan tahunan atau dinamika kekerasan, maka dapat dilihat bahwa baru-baru ini, dari tahun 2007 sampai sekarang, di antara para korban dengan pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan (bukan termasuk warga biasa), anggota militerlah yang memiliki korban tertinggi, diikuti oleh kamnans dan kepala desa, diikuti oleh VDT dan relawan lainnya, dan polisi berada di tempat keempat. Suatu hal yang menarik adalah bahwa dalam gambar secara keseluruhan lebih dari enam tahun, polisi jauh di belakang militer dalam jumlah korban, namun statistik tahunan dari 2004-2009 tercatat bahwa polisi memiliki korban tertinggi khususnya selama tahun pertama dari kekerasan, terutama pada tahun 2004-2005. Namun, dari tahun 2007 dan seterusnya, militer menempati urutan pertama sasaran di antara mereka yang bukan warga sipil biasa. Kamnans dan kepala desa peringkat di urutan kedua dalam grup ini. Penurunan korban polisi mungkin disebabkan karena penurunan peran operasional polisi pada tahun 2006 dan membiarkan militer untuk memainkan peran kunci dalam pemeliharaan perdamaian di Thailand Selatan,

Diagram 4.4

Persentase Korban Berdasarkan Pekerjaan

Percentage of Casualties by Occupation, 2004-2010



Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity, Prince of Songkla University, diakses dari www.deepsouthwatch.org/english

4.2 Kebijakan Pemerintah Thailand terhadap eksistensi "Muslim Pattani" dan Implikasinya

Adanya perbedaan identitas kultural antara Melayu Muslim Pattani dengan Thai-Buddhis didalam wilayah Thailand berdampak pada munculnya upaya pemerintah Thailand untuk menyatukan perbedaan tersebut melalui politik integrasi. Manifestasi dari kebijakan ini diantaranya berupa pengajaran bahasa Thai, pengenalan sejarah dan lagu kebangsaan Thailand. Di tahun 1921 pemerintah mengeluarkan peraturan adat-istiadat Thai (*Thai Custom Decree*) yang mewajibkan setiap anak untuk mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah. Ini merupakan institusi pendidikan yang menawarkan pendidikan sekuler, dengan bahasa pengantar Thai. Bila sebelumnya pemerintah Thai banyak menggunakan pendekatan kekuasaan yang sarat dengan kekerasan guna menaklukkan Muslim Pattani, kini pemerintah Thailand beranggapan bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya integrasi secara damai. Pendidikan dianggap sebagai inti dari politik integrasi. Pendidikan membutuhkan *medium of instruction* dalam bahasa Thai. Kesamaan bahasa merupakan hal vital untuk berkomunikasi, dengan demikian perbedaan bahasa antara Muslim Melayu dan Thai Buddhis dapat teratasi.

Melalui pendidikan diharapkan sentimen nasionalisme akan berkembang diantara etnis Melayu dan Thai. Sebagai stimulus, pemerintah Thailand menyediakan beasiswa dan berbagai fasilitas kemudahan untuk mendorong masyarakat Muslim Pattani yang akan masuk perguruan tinggi di Thailand. Proses pengenalan bahasa Thai ini cenderung hanya menjadi alat yang menunjang kepentingan pemerintah Thailand, karena bahasa Thai menjadi bagian elemen budaya. Bagi pihak Muslim Pattani, pengenalan bahasa Thai merupakan upaya pemerintah Thailand untuk melenyapkan budaya Pattani.

Di sektor pendidikan, pemerintah Thailand mengharuskan pendidikan tradisional pondok untuk memasukkan kurikulum baru (mengajarkan ilmu-ilmu sekuler seperti bahasa Thai, Matematika dan ilmu-ilmu sosial) disamping pendidikan agama. Kebijakan ini sangat merugikan pihak pondok

dan hanya dianggap sebagai upaya untuk mengikis bahasa Melayu yang selama ini menjadi identitas etnis Melayu Pattani. Demikian pula halnya dengan adanya kewajiban mengajarkan agama Islam di sekolah-sekolah umum pemerintah yang berbahasa Thai, hal ini dianggap sebagai pencegahan agar mereka yang lulus dari sekolah umum nantinya tidak perlu masuk ke sekolah agama lagi, dan hal ini dinilai sebagai pencegahan memasuki "Gerbang Melayu"⁸². Politik uniformisasi bahasa di mata pemerintah Thai ditujukan untuk mengembangkan rasa nasionalisme sebagai bangsa Thai yang berbahasa Thai. Namun di mata pihak Muslim Pattani yang berbahasa Melayu, penggunaan bahasa Thai di sekolah-sekolah Agama sama dengan penghilangan identitas secara turun-temurun, dan memaksa mereka untuk melebur ke dalam identitas dan entitas sosial yang lebih besar yaitu mayoritas Thai-Buddhis.

Kebijakan integrasi Siam terhadap Pattani harus dilihat secara komprehensif dari latar belakang sejarah terbentuknya nasionalisme dan modernisasi Thai pada permulaan abad ke 20. Proses memasukan provinsi-provinsi paling selatan kedalam kedalam kerajaan Thai, merupakan proses yang lambat dan sulit. Situasi pada akhir abad 18 ketika kekuasaan kolonial semakin besar di Asia Tenggara, Siam dihadapkan pada suatu kesadaran kebangsaan akan keharusan yang mendesak mengkonsolidasikan kekuasaan dan menyatukan satuan-satuan politik yang terpencar untuk menghadapi kolonialisme (Nik Anuar 1999) hal ini menunjukkan nasionalisme dan modernisasi Thai dihadapkan pada situasi yang delematis. Pihak Siam merasa perlu untuk melakukan pembaharuan administratif dengan pertimbangan keamanan nasional dan efisien urusan kenegaraan. Gagasan pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Chulalongkron melalui implementasi pendatangannya perjanjian inggris Siam pada tahun 1909 dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk menghadang semakin meluasnya politik ekspansi di Semenanjung Malaya /Burma dan Perancis di Indocina. Selain itu kebijakan intergrasi tersebut berkait erat dengan usaha-usaha untuk

⁸² Panji Masyarakat No 492 (1986), h. 28; enang Turmudi "Masalah Minoritas Muslim di Thailand Selatan" dalam *Masalah-masalah Internasional Masa Kini*, No. 14 (1986), h.36

meningkatkan nasionalisme Thai karena sebelumnya kerajaan Siam merupakan sekumpulan negara yang rapuh.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Timeline dari kebijakan pemerintah Thailand terhadap eksistensi Muslim Pattani di Thailand Selatan

Tabel 4.3 Daftar Kebijakan Pemerintah Thailand

No	Latar Belakang	Kebijakan	Pemerintahan	Dampak
1	Membendung Ekspansi Inggris-Malaya Dan Perancis-Indocina	Integrasi teritorial 1902, integrasi bangsawan, reformasi birokrasi	Raja Chulalongkorn (1868-1910)	Pemberontakan 1902 dan 1922
2	Nasionalisme Thai Raja Vajiravudh	Integrasi Pendidikan berdasarkan UU 1921	Raja Vajiravudh (1910-1925)	Diperkenalkannya bahasa Thai ke pondok-pondok
3	Kudeta dan perubahan konstitusi 1932	Liberalisasi Politik	Pridi Banomyong	Partisipasi terbatas
4	Berkembangnya fasisme di Eropa dan Asia menjelang perang dunia kedua	Thai rathaniyom 1938	PM. Phibun Songkram (1938-1944 dan 1948-1957)	Keberpihakan Pattani pada sekutu, nasionalisme Malaya.
5	Kekalahan Thailand dalam perang dunia kedua	Patronage Islam Act 1946: Integrasi Ulama.	Pridi banomyong (1946)	Chularajamontry, petisi H. Sulong, pemberontakan 47
6	Perang Vietnam	Integrasi Pondok 1960-an	PM Sarit Thanarat (1957-1963) dan pemerintahan sesudahnya	Kontrol pemerintah terhadap Pondok, separatisme di bawah PULO.

7	Pembangunan dan perang dingin AS vs Uni Soviet	Prime Minister Order No. 65/66, Tai Rum Yen	PM Prem Tin Sulanonda	Menurunnya aksi-aksi separatis, simpati ke pemerintah.
8	Kampanye internasional "perang melawan terorisme"	Martial Law 2004	PM Thaksin Sinawatra	Meningkatnya aksi-aksi kekerasan di Pattani, Yala dan Narathiwat

Sumber: Data diolah (Cahyo Pamungkas, PSDR-LIPI 2004)

Wilayah Negara Siam ditentukan berdasarkan negara-negara imperialis yaitu Perancis pada tahun 1907 dan Inggris pada tahun 1909. Oleh karena itu pihak Siam perlu melakukan kebijakan reformasi yang dilakukan oleh Raja Chulalongkorn (1868-1910) untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan wilayahnya (Nasionalisme).

Nasionalisme Thai yang dimaksud oleh Raja Chulalongkorn (1868-1910) dan dilanjutkan oleh penggantinya Raja Vajrayudh (1910-1926) adalah semangat kebangsaan yang didasarkan kesetiaan terhadap kerajaan Siam, bangsa Thai dan Agama Buddha. Kedua raja ini memandang bahwa apa yang disebut *national heritage* dari orang Thai adalah satu bahasa (bahasa Thai), satu agama (Agama budha) dan memiliki hubungan dengan kerajaan (Carki Monrakhi). Nasionalisme Thai ini ditunjukkan untuk menyatukan seluruh bangsa-bangsa yang berada dibawah kerajaan Siam termasuk kelompok-kelompok minoritas non-Thai seperti Moks, China dan Melayu Pattani. Walaupun Thailand tidak pernah dibawah ancaman kekuasaan kolonial, namun selalu dibawah ancaman kekuasaan eksternal. Sebagai konsekuensinya Thailand selalu dipaksa menyesuaikan budaya politiknya terhadap situasi regional dan internasional yang berubah-ubah. Dengan demikian nasionalisme Thai tumbuh dan berkembang sangat dipengaruhi dengan tatanan politik internasional dan sebagai usaha untuk menyelamatkan keutuhan negara siam. Kebijakan ini berdampak positif secara internal yaitu meningkatkan kesadaran nasional dikalangan birokrasi,

mencapai negara bangsa yang mendapat pengakuan dari dunia internasional dan membentuk sistem hukum modern.

Namun kebijakan Integrasi Siam berdampak luar biasa dalam mengacaukan tatanan sosial kelompok-kelompok minoritas terutama bangsa Melayu Pattani. Tak lama setelah wilayah Melayu Pattani berada diwilayah pemerintahan Thai yang berpusat di Bangkok, pengaturan birokrasi pemerintahan Thai yang berpusat di Bangkok, pengaturan birokrasi pemerintahan diberikan kepada pejabat yang beretnis Thai. Namun terdapat kesalahan yang terjadi pada pegawai-pegawai Thai yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan di wilayah Pattani, yaitu kurang memiliki rasa tanggung jawab serta tidak memahami masalah budaya lokal. Tidak mengherankan apabila Melayu Pattani sebagai penduduk asli selatan hanya menjadi penonton pasif dari banyaknya lowongan kerja yang sebenarnya tersedia seiring dengan pembentukan sistem administratif dan infrastruktur baru di selatan. Secara sosial, politik dan ekonomi masyarakat berada didalam posisi yang tidak diuntungkan. Di tanah kelahirannya sendiri harus mengalami diskriminasi, tekanan dan kesewenang-wenangan yang bertubi-tubi dari pemerintah Thai.

Hal ini diperparah dengan adanya politik ultra nasionalis yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Phibun Songkrama (1938-1945). Politik ultra nasionalis pada intinya berkaitan dengan pengakuan kebudayaan Thai sebagai satu-satunya kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan oleh negara di seluruh Thailand. Sedangkan masyarakat-masyarakat minoritas diwajibkan tunduk kepada segala bentuk budaya-budaya orang Thai. Kebijakan Phibun Songkrama yang sangat rasis terkenal dengan istilah "*Thai Rathaniyon*" yang berarti negeri Thai untuk ras Thai.

Ketika dibawah rezim ultranasionalis Phibun Songkram di tahun 1938, dibuatlah suatu kebijakan "nasionalis" untuk menjalankan asimilasi berbagai budaya minoritas ke suatu budaya pokok Buddha "*Thai-ness*"⁸³ yang dibuat

⁸³ Chidchanok Rahimmula, *Peace Resolution: A Case Study of Separatist and Terrorist Movement in Southern Border Provinces of Thailand*, in S. Yunanto, et. al, *Militant Islamic Movements in Indonesia and Southeast Asia* (Jakarta: FES and The RIDEP Institute, 2003), hal. 263-277.

untuk membentuk “*the mono-ethnic character of the state*”⁸⁴.” Kebijakan ini langsung mendapat tentangan dari Melayu-Muslim. Mereka tidak mau identitas mereka sebagai orang Melayu dihilangkan dan diganti dengan identitas “nasional” Thailand.

Di tahun 1940, kebijakan ini memprovokasi suatu gerakan separatis untuk kemerdekaan Pattani. Pada tahun 1948, *Gabungan Melayu Pattani Raya (Union of Malay for a Great Pattani)* dibentuk. Dilanjutkan dengan pembentukan Barisan Nasional Pembebasan Pattani di tahun 1963 yang menyebabkan bentrokan antara pemberontak dengan pasukan pengamanan. Pemberontakan ini terjadi di hampir seluruh provinsi di Thailand Selatan. Di pertengahan tahun 1970, lebih dari 20 organisasi separatis muncul di perbatasan Thailand dengan Malaysia. Gerakan-gerakan ini merupakan gerakan etnonasionalisme yang seperti telah dikatakan Umberto Melotti merujuk pada tipe khusus nasionalisme dan terkait dengan warga negara yang masih memimpikan kemerdekaan.

Politik asimilasi ini berdampak pada kemarahan yang sangat besar kepada masyarakat Pattani. Memasuki perang dunia kedua bangsa Melayu Pattani mulai mengambil keputusan untuk menolak tunduk pada Siam karena politik ultra nasionalis yang ditetapkan, bersama dengan itu gerakan nasionalisasi Malaysia sedang bangkit di seberang perbatasan, sehingga menimbulkan gerakan Pan-Melayu untuk mengobarkan semangat nasionalisme melayu dinegeri-negeri terjajah. Ketidakpuasan dan kebencian terhadap kebijakan Thai Rajithanyom telah mendorong kalangan muda untuk menghidupkan identitas Melayu dan meningkatkan kesadaran Islam. Institusi pondok memiliki peranan yang sangat penting untuk mengobarkan semangat Pan-Melayu dan kebangkitan Islam.

Menanggapi gejolak perlawanan orang-orang melayu Pattani yang dipengaruhi bangkitnya nasionalisme negeri-negeri melayu dari hindia belanda hingga inggris malaysia. Pemerintah berusaha untuk mengambil simpati rakyat dengan menetapkan Undang-undang mengayomi islam atau patronage act pada tahun 1945 pada tanggal 3 mei yang di usulkan oleh

⁸⁴ David Brown, *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia* (London: Routledge, 1994).

arsitek revolusi 1932, Pridi bamoyong dan senator Muslim dari Bangkok Cham Promoyong berdasarkan undang-undang ini kaum ulama dan *chularjaamontri* (dewan ulama pemerintah) diintegrasikan kedalam dalam pemerintahan Thailand. Namun Surin Pitsuwan dalam bukunya *Islam di Muangthai* (1989;78) mengatakan bahwa kebijakan ini lebih banyak ditujukan untuk melemahkan gerakan-gerakan separatis yang digerakan oleh kalangan elit tradisional seperti Tengku Mahyadin (Putra Sultan Abdul Kadir) dan Tengku Abdul Jalal. Termasuk kebijakan pengintegrasian kalangan ulama dan golongan bangsawan sekaligus memberikan satu *sense of belonging* kaum ulama atas negeri Thailand.

Sejalan dengan perkembangan kebangsaan kebijakan ultra nasionalis lambat laun mulai dihilangkan dan diganti dengan kebijakan pembangunan (*patanakm*). Integrasi nasional dilakukan melalui pembangunan sosial ekonomi. Kebijakan ini merupakan pengembangan dari ideologi pembangunan (*devepelopmentalisme*) dimana pemerintah mencoba untuk memasuki seluruh lembaga sosial dan kebudayaan komunitas-komunitas yang ada termasuk Islam. Upaya ini untuk menggeser persoalan konflik kekuasaan menjadi konflik ideologi dengan pemerintah melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga keagamaan.

Salah satunya adalah pemerintah melancarkan program perbaikan pendidikan pada tahun 1961 untuk mengubah lembaga tersebut menjadi lembaga pelopor perubahan modernisasi. Program ini dimaksud untuk mentransformasikan pondok dari sekolah swasta menjadi sekolah-sekolah yang tunduk kepada pemerintah hal itu mengubah image tentang pondok pasantren dari institusi agama menjadi instuti pendidikan dan secara tidak langsung mengurangi peranan agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kebijakan sekulerisasi pondok berdampak negatif yang sangat besar dalam usaha pelestarian identitas dan kebudayaan bangsa melayu Pattani. Pondok tidak lagi menghasilkan cendikiawan-cendikiawan yang selama ini memberikan pelayanan agama terhadap masyarakat-masyarakat pedesaan. Asumsi dari penerapan kebijakan ini bahwa dengan mengembangkan bahasa Thai dan tatanan moral maka akan diciptakan suatu

rasa kebersamaan dan kesadaran sebagai orang Thai. Asumsi ini ternyata keliru dan berdampak pada berkembangnya benih-benih separatis yang berkobar pada tahun 70 an.

Pada tahun 1980 dan 1990, situasi berubah. Pemerintahan baru dibawah Jenderal Prem (1980-1988) menghentikan kebijakan asimilasi tersebut, seperti mendukung hak-hak budaya warga Muslim dan kebebasan beragama, memberikan para gerliyawan amnesti, dan rencana pembangunan ekonomi bagi Thailand Selatan.

Di tahun 1990, pemerintah Thailand menformulasikan "*National Security Policy for the Southern Border Provinces*" yang berlandaskan "pembangunan dan keamanan." Kerjasama yang erat antara Thailand dan Malaysia telah membangun suatu keamanan di perbatasan, hal ini menyebabkan berkurangnya gerakan pemberontakan di perbatasan

Berbagai kebijakan yang diterapkan bagi pemerintah Thailand dalam perkembangannya tidak mengalami perubahan signifikan untuk meningkatkan pembangunan dan menurunkan kondisi kemiskinan di wilayah selatan. Beberapa kebijakan yang terurai dalam tabel 4.1 diatas yang dikeluarkan di atas dan memunculkan perlawanan dan sikap anti Siam yang berkembang semakin besar. Perlawanan anti Siam dan disebabkan adanya kontradiksi antara reformasi politik dibawah pemerintah Thailand dengan nilai-nilai identitas politik bangsa Melayu Pattani. Kontradiksi meliputi dua hal sebagai berikut. Pertama, kontradiksi yang mencakup pada tingkat kelembagaan, inkorporasi elit politik Muslim dalam praktek politik perwakilan dan ekspansi administrasi nasional, termasuk keterlibatan Muslim dalam proses pengambilan kebijakan. Kedua, kontradiksi yang meliputi pembangunan komunitas politik ala kerajaan dan praktek-praktek politik pada perang kerajaan yang belum selesai di bawah konsep negara bangsa.

Kebijakan integrasi baik sosial maupun politik dalam konteks proses pembangunan partisipasi politik masyarakat dalam ruang publik telah bergeser kearah kebijakan operasi militer. Kebijakan militeristik diduga memberikan isyarat adanya sekelompok elit politik di Bangkok dan Pattani yang tindak menginginkan wilayah Thailand Selatan dalam keadaan damai.

Hal itu dilakukan sebagai bagian dari usaha-usaha untuk menutupi kepentingan dan bisnis ilegal yang telah berlangsung cukup lama di daerah perbatasan wilayah Thailand Selatan.

Intervensi pemerintah Bangkok yang pada awalnya merupakan kebijakan administratif berkembang lebih jauh dalam sistem kehidupan pribadi Pattani yang tercermin dari penghapusan sistem Pendidikan Islam sebagai bagian dari program nasional asimilasi Thailand. Program nasionalisasi pendidikan yang diterapkan sejak raja Vajirayudh (1910-1926) atau Rama VI melalui Undang-Undang wajib belajar tahun 1921 (Education Act 1921) berisikan pelarangan berdirinya sekolah-sekolah konservatif (Tradisional) Islam (Rahimulla 2003). program nasionalisasi sistim pendidikan ini membawa efek lumpuhnya sendi kehidupan Islam yang berkembang di sekolah-sekolah pondok dan pola pembelajaran Agama Islam secara informal di masjid-masjid maupun mushola-mushola.

Undang-undang ini mewajibkan generasi muda Pattani untuk mengikuti sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan sekuler dan membuat mereka tidak diizinkan untuk masuk sekolah-sekolah agama. Thailand benar-benar memasuki fase "chauvinistik" khususnya diakhir 1930-an. Kebijakan sekulerisasi kebijakan bukanya membawa asimilasi damai, sebagai mana diinginkan oleh pemerintah Thai, tetapi justru menimbulkan jurang perbedaan ideologis yang kian lebar antara Pattani dan Thai dan semakin menciptakan konflik yang dalam antara Pattani dan pemerintah pusat Thai. Jurang perbedaan ideologis masih dibumbui lagi dengan jurang kehidupan sosial ekonomi antara Pattani dan mayoritas Thai.

Program ini diperkuat pula dengan pelarangan penggunaan bahasa melayu dan nasionalisasi budaya dengan pelarangan penggunaan bahasa melayu dan nasionalisasi budaya masyarakat Thai melalui bahasa dan adat istiadat. Kebijakan kultural yang menyangkut pemakaian bahasa dan adat istiadat Thai ditujukan guna mempromosikan nasionalisme Thai sampai mengikis identitas (agama dan budaya) melayu Pattani. Kebijakan asimilasi yang dikenal dengan Rathaniyom No. 1 yang ditetapkan pada 24 Juni 1930 (farouk 1982 : 252), diantaranya mencakup perubahan nama Siam menjadi

nama Thai. Thai mengacu pada identitas bangsa, bahasa dan negara yang berpengaruh terhadap bangsa-bangsa etnik dengan kelompok cultural (ethnic and cultural boundaries), karena baik yang berasal dari India, Pakistan, dan Banglades, Arab yang merupakan imigran juga dikelompokkan pada kelompok Thai Muslim. Sebagai wujud untuk mengamankan kesamaan ideologi tentang Nasionalisme Thai, pemerintah juga menciptakan lagu kebangsaan yang bertema memuja kebesaran sejarah Thai, kejayaan raja-raja dan pahlawan-pahlawan Thai. Lagu-lagu kebangsaan ini disiarkan setiapharinya melalui berbagai program radio, televisi dan media masa lainnya.

Pemerintah Thailand dalam hal akomodasi kebudayaan melalui identitas minoritas kurang menyesuaikan kebijakan-kebijakannya dengan aspirasi Melayu Muslim di daerah perbatasan. Memperhatikan kebudayaan Melayu sebagai bagian kebudayaan nasional (*country's national heritage*) sangat diperlukan sebagai usaha-usaha memperlakukan orang-orang Muslim agar dapat memperhatikan nilai-nilai dan tradisinya. Kelangsungan tradisi dan adat istiadat orang-orang Melayu seharusnya tidak dilarang oleh pemerintah. Namun yang terjadi adalah asimilasi untuk membangun sekaligus untuk memoderenisasi masyarakat Muslim Pattani. Salah satu bentuk asimilasi untuk menunjukkan identitas nasional adalah perubahan nama Muslim dengan nama Thai. Tanpa merubah nama mereka yang bekerja di kantor pemerintahan tidak akan mendapatkan promosi untuk mendapatkan karir yang lebih tinggi. Misalnya nama (baru) "Surin Pitsuan" salah satu orang Melayu yang pernah diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Thailand nama lama (aslinya) adalah "Abdul Hamid bin Ismail"

Tata aturan berbusana juga termasuk juga dalam undang-undang pemelihara kebudayaan (identitas) Thai. Melayu Muslim juga dipaksa untuk memakai "baju modern" model barat. Mereka dilarang memakai sarung, memakai sangkok (Kupiah), sandal dan mengunyah sirih. Bagi anak laki-laki harus mengenakan Topi, celana panjang dan sepatu sedangkan kaum Muslim Melayu Pattani mengenakan baju kurung dan kerudung sering mengalami pelecehan oleh polisi setempat. Bagi kelompok Muslim berpakaian adalah

ekspresi keagamaan dan model pakaian adalah manifestasi sikap dan perilaku beragama. Namun dari sekian kebijakan yang dianggap fatal dan merusak kepercayaan Muslim adalah kewajiban kaum Muslim untuk menghormati patung Buddha yang berada di lingkungan sekolah lantaran Buddhisme sudah lama diploklamirkan sebagai agama negara, sudah sepantasnya bila masyarakat Pattani menghargai agama ini dengan cara menghormati simbol patung Buddha.

Asimilasi yang dilakukan terhadap Muslim Pattani merujuk pada kebijakan nasionalisasi Thai melalui sekulerisasi pendidikan dan Nasionalisasi Thai melalui sekulerisasi pendidikan dan nasionalisasi Thai melalui bahasa dan adat istiadat sesuai dengan terurai penjelasan di atas kedua model nasionalisasi ini berimplikasi terhadap ketimpangan (gap) sosial-ekonomi-politik dan merupakan kondisi potensial yang mengundang konflik dan kekerasan antar kelompok masyarakat. Kondisi pluraritas masyarakat yang berusaha diseragamkan mengandung potensi dan ancaman bagi terurainya ikatan kesatuan dan keutuhan dalam negara bangsa Thailand itu sendiri. Kekuatan dan otoritas negara yang bersifat memaksa sebagaimana dialami Pattani yang dipaksa masuk dalam lingkup *national state* Thailand melalui program-program Nasionalisasi Thai; pendidikan, bahasa, budaya, agama yang justru memperkuat keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan negara bangsa.

Permasalahan mendasar di selatan pada dasarnya bukanlah semata-mata permasalahan anti Siam dan berkembangnya gerakan separatisme tetapi karena tidak adanya keadilan masyarakat baik dalam ketidakadilan sosial politik meliputi kuatnya sentralisme politik pemerintah pusat dan tidak adanya otonomi bagi masyarakat. Ketidakadilan sosial budaya membuat tercabutnya budaya dan bangsa Melayu dari orang-orang Melayu. Mereka diasimilisasikan secara paksa oleh pemerintah agar menjadi Thai Muslim yang berkebudayaan Thai. Walaupun UUD 1997 menjamin adanya penghormatan terhadap perbedaan (Multikulturalisme) tapi hanya sebatas dalam wacana. Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa akar permasalahan di selatan tidak adanya otonomi untuk memerintah dari etnik minoritas

(Paribrata 1983 : 3). Salah satu informan dari unerversitas Chulalongkon (SW) mengatakan bahwa pada kenyataanya negara Thailand tidak menghendaki *police of recoginitaion* tetapi lebih cenderung pada *politic of homogeneity*. Hal ini diwujudkan dalam kebijakan asimilasi dan nasionalisasi mereka.

Selama paruh abad 20 asimilasi paksa yang dilakukan pemerintah Thailand seperti sekularisasi agama yang ditandai penghapusan hukum Islam dan peranan pengadilan agama, penggunaan bahasa Thai, pemberlakuan budaya Buddisme telah membangkitkan semangat resistensi yang semakin besar dikalangan Pattani. Pemerintah gagal dalam mencermati adanya simbol-symbol identitas yang bersifat permanen, dan karenanya relatif sulit dirubah dengan tempo singkat. Identitas Pattani dibangun diatas symbol-simbol atau atribut seperti: pengalaman sejarah atau collective memori tentang kerajaan melayu Pattani, bahasa melayu, agama islam kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat lokal (Local variance) dengan "islam" tradisi yang masuk belakangan

Identitas Melayu Pattani yang dipelihara oleh sejumlah pranata seperti pranata pendidikan yang tercermin dari sekolah-sekolah agama yang disebut pondok dan berpusat di dalam intitusi keluarga, mesjid serta pondok itu sendiri. Bahasa, kebiasaan (tradisi dan adat istiadat) terlebih lebih keyakinan agama adalah merupakan identitas baku dan asli yang cenderung bersifat setatis dan menetap dari Melayu Muslim Pattani Identitas ini menjadi bagian dari bagian dari system kepribadian atau pola prilaku sehari-hari yang bersifat ajeg. Menyitir Geertz, ikatan-ikatan primordial sebagai sumber identitas kelompok etnik tertentu mengandung nilai-nilai kesejarahaan (ascipirative) yang dibentuk dalam tempo relative panjang, kemungkinan semenjak adanya bangsa Melayu Pattani itu sendiri dan semenjak kedatangan islam. Identitas Pattani merupakan sinkretisme antara "Melayu" sebagai varian local dengan tradisi "Islam". Intregrasi Pattani kedalam national-state thai membawa pengorbanan dan pengikisan identitas (Budaya melayu dan agama islam) Pattani. Di sini berbagai gerakan sparatisme dapat dilihat sebagai salah satu jalan untuk memuluhkan identitas politik Pattani sebagai suatu negeri otonom, berdaulat penuh dibawah kesultanan Pattani

4.3 Faktor-faktor Penyebab Gagalnya Kebijakan Pemerintah Thailand

Aksi-aksi separatism dan terorisme seringkali dianggap sebuah *tangible things*, sehingga, pendekatan material (kekerasaan material) dikedepankan. Salah satu contoh dari negara yang melakukan strategi ini adalah Thailand. Insiden berdarah di Krisek (28 April 2004) dan di Takbai (25 Oktober 2004), dihadapi dengan beberapa aksi berdarah pula. Thailand telah melakukan lima langkah yang mengedepankan kekerasan.

Pertama, Thailand mendirikan apa yang disebut *Southern Border Province Peace Building Command*, atau SBPPBC. Pada realitanya, hal ini hanya membuat pendekatan kekerasan "terkoordinasikan" dengan baik antara tentara dan pihak kepolisian Thailand. Pendekatan kekerasan ini semakin diperkuat dengan langkah kedua, yakni memperkuat posisi politik tentara dalam Undang-Undang (UU). Kebijakan tersebut diperkuat dengan kebijakan ketiga, yakni penambahan jumlah tentara di daerah perburuan teroris, termasuk di Yala, Pattani, dan Narathivat. Keempat, pemerintah Thailand memperkenalkan kode warna dalam penyaluran bantuan keuangan kepada para penduduk di Thailand Selatan. Kebijakan ini, selain terkesan diskriminatif, juga menempatkan posisi rakyat sebagai objek yang harus dicurigai. Padahal dalam teori demokrasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, mestinya menjadi pihak yang mengawasi (mencurigai) pemerintahnya. Kelima, pemerintah Thailand mendirikan sebuah komisi khusus yang bertugas merancang strategi dan penanganan teroris. Komisi yang diberi nama *Reconciliation Commission* ini diketuai oleh bekas Perdana Menteri Thailand, Anand Panyarachun.

Kenyataan yang kini terjadi di selatan Thailand adalah bahwa "terorisme" semakin meningkat. Dalam bahasa strategik, pemerintah Thailand mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu disebabkan oleh kegagalan pemerintah Thailand dalam mengidentifikasi secara tepat akan kelompok yang harus bertanggungjawab dalam mendalangi aksi teroris di Thailand.

Selain itu, kegagalan pemerintah Thailand dalam menangani terorisme, disebabkan oleh lemahnya dukungan masyarakat setempat. Pada faktor

kegagalan ini, terjadi fenomena *antagonix-strategy*, yang disebabkan oleh terjadinya persilangan persepsi antara pemerintah (pemburu teroris) dengan masyarakat (yang sebagiannya merupakan pihak yang diburu). Antagonix-strategy itu sendiri terjadi karena kegagalan pemerintah Thailand dalam menetapkan pendekatan penanganan. Secara empirik, masyarakat di Krisek dan Takbai misalnya, tidak senang dengan gaya penanganan yang dilakukan oleh pihak tentara dan polisi Thailand.

Faktor kegagalan yang ketiga terjadi disebabkan karena ketiadaan *political will* pemerintah Thailand dalam mewujudkan otonomi khusus di Thailand Selatan. Hal ini terjadi, karena pemerintah Thailand kurang memahami akar persoalan lahirnya aksi-aksi terror di Thailand Selatan secara historis. Dalam kasus Thailand Selatan, secara historis pemerintah Inggris mesti ikut bertanggungjawab. Sebab, wilayah Thailand selatan yang mayoritas Muslim itu, sebelum dipisahkan oleh Inggris dan Belanda pada awal abad 20, dulunya merupakan satu "keresidenan" dengan wilayah Kelantan, Malaysia. Sehingga, menafikan keberadaan hubungan idiososiologis antara kedua wilayah beda negara tersebut, akan terus jadi "duri dalam daging" bagi pemerintah Thailand, juga bagi pemerintah Malaysia.

Sedangkan dari sisi internal, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Melayu Muslim teguh mempertahankan identitasnya dan menolak usaha asimilasi yang dilakukan pemerintah Thailand adalah pertama kepercayaan tradisional mereka dan kepercayaan terhadap mitos Kerajaan Pattani (Pattani Darussalam). Lalu, yang kedua, identitas yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Muslim dipengaruhi oleh kontak kebudayaan dengan provinsi di utara di Malaysia. Ketiga Orientasi Religius yang berdasarkan Islam⁸⁵. Konsep religius Islam dapat digunakan untuk melihat penyebab keengganan warga Melayu-Muslim berasimilasi, seperti konsep *Ikhwah* yakni suatu konsep persaudaraan dalam Qur'an dan Hadits, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa persaudaraan sesama Muslim seperti tubuh manusia. Seluruh tubuh manusia akan menderita jika ada salah satu bagian

⁸⁵ Dikutip dari situs www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1344.ch2

tubuh yang terluka. Jadi, jika salah satu umat Muslim terluka atau ditekan maka seluruh tubuh umat Muslim akan menderita.

Keempat, munculnya nasionalisme Melayu yang melanda daerah Thailand Selatan, hal ini ditakutkan oleh Pemerintah Thailand dan ditakutkan akan berkembang menjadi aksi yang resisten terhadap pemerintah Thailand. Nasionalisme yang melanda Melayu-Muslim dilihat sebagai konsep yang alamiah berakar pada kelompok masyarakat masa lampau yang disebut sebagai, suatu kelompok sosial yang diikat oleh atribut kultural meliputi memori kolektif, nilai, mitos, dan simbolisme⁸⁶. Kelima, kebijakan pemerintah Thailand, terutama dalam hal bahasa dan pendidikan yang diasumsikan oleh Melayu Muslim di Selatan Thailand sebagai bentuk penjajahan terhadap asal kebudayaan mereka. Mereka melihat bahasa Thailand di wilayah mereka sebagai sebuah ancaman. Ada suatu kekhawatiran bahwa penggunaan bahasa Thailand akan membawa mereka kehilangan “lidah” Melayu yang merupakan inti dari identitas etnis Melayu.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan masyarakat Melayu-Muslim di Thailand bersikap sangat resisten terhadap kebijakan asimilasi tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut Castells sebagai *resistant identity*. Melayu-Muslim di Thailand merasa bahwa kebijakan asimilasi merupakan suatu bentuk marginalisasi etnis Melayu-Muslim.

4.4 Prospek konflik dan Analisis *Future Trend*

Dinamika kekerasan dan situasi kerusuhan di Thailand Selatan dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, kekerasan dan kerusuhan tersebut bersifat kompleks dan, membingungkan, sehingga memiliki kemungkinan besar untuk memluas dan menyebar. Di sisi lain, kekerasan tersebut mencerminkan pola dan sistem tertentu dengan target dan struktur yang tersembunyi. Dengan kata lain, kekerasan dan kerusuhan yang dinamis tersebut dapat dijelaskan dan sebagian besar bisa dipahami, tapi tidak seluruhnya dapat dikelola.

⁸⁶ Dikutip dari situs <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/03/Bentara/1363295.htm>.

Beberapa isu strategis dalam enam tahun terakhir berkaitan dengan situasi kekerasan dan kerusakan di Thailand Selatan antara lain:

- Pada tahun 2009 pemerintah Thailand dapat dikatakan berhasil secara taktis karena melalui strategi militernya mampu meredam pemberontakan dan menjaga perdamaian di wilayah Thailand Selatan, namun pemerintah masih belum berhasil dalam menerapkan strategi politik yang sistematis terutama dalam hal reformasi dan perubahan politik struktural dalam menangani permasalahan di Thailand Selatan dalam jangka panjang.
- Dari sisi operasional, tercatat fakta bahwa sejak tahun 2007 kerusakan di Thailand Selatan mengalami penurunan yang cukup drastis, namun demikian pemerintah Thailand tidak dapat mengklaim begitu saja bahwa kekerasan di Thailand Selatan telah berakhir. Dari catatan statistik tetap terlihat bahwa meskipun jumlah insiden kekerasan menurun tetapi jumlah kerusakan, korban tewas dan korban luka-luka tidak mengalami penurunan yang signifikan.
- Pertimbangan lain seperti penggunaan kebijakan pembangunan ekonomi dan peranan masyarakat sipil dalam mendukung operasi militer menjaga perdamaian di Thailand Selatan ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Pertimbangan dari indikator pembangunan sosial-ekonomi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Thailand Selatan tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Kondisi masyarakat di Thailand Selatan tetap berkuat pada permasalahan kemiskinan, pengangguran, kerusakan dan narkoba.
- Hal penting lain adalah masalah sosio-psikologis, atau kondisi perasaan masyarakat. Biasanya kita menemukan bahwa masalah penduduk setempat umumnya memiliki pemahaman yang rendah dan ketidakpuasan terhadap proyek-proyek pembangunan negara. Survei Pusat Studi Konflik dan Keragaman Budaya, Prince of Songkla University terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan negara sektor, serta kegiatan dari

badan-badan negara selama bertahun-tahun, ditemukan bahwa meskipun terdapat tingkat kebutuhan yang tinggi akan bantuan pemerintah dan adanya kepuasan terhadap bantuan jangka pendek seperti proyek 4.500 Bahts dan program Sarjana Relawan, serta pengembangan infrastruktur dan transportasi, tetapi masyarakat Muslim Pattani di Thailand Selatan masih belum melihat keberhasilan dalam hal distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Proyek negara dalam hal pengembangan kapasitas, pengembangan dari proses ekonomidan potensi investasi daerah masih kurang

- Salah satu indikator utama dalam permasalahan sosial adalah obat-obatan/narkotika. Obat-obatan terlarang masih beredar luas, hal ini mencerminkan kegagalan dalam pembangunan sosial ekonomi di daerah tersebut termasuk masalah pengangguran pemuda, kemiskinan.
- Pada tahun 2009, sikap dan kepercayaan terhadap sektor keamanan, seperti militer dan polisi, masih belum meningkat, hal ini diantaranya disebabkan oleh kesalahan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya penerimaan dan pemahaman tentang hak untuk identitas penduduk setempat, meskipun sejak pertengahan 2009, banyak orang di daerah benar-benar mulai melihat dan menerima peran militer dalam pembangunan masyarakat dan kegiatan politik. Namun, fakta ini menunjukkan bahwa komitmen personil untuk pekerjaan pengembangan oleh politik terkemuka militer masih belum mencapai tujuannya dan belum mampu untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat. Dalam jangka panjang, negara harus melanjutkan pekerjaannya dalam rangka menciptakan kepercayaan yang lebih besar antara masyarakat Thailand pada umumnya, khususnya di kalangan Melayu Muslim yang mayoritas berada di Thailand Selatan.
- Keadilan tentang identitas etnis dan agama masih menjadi permasalahan, seperti dapat dilihat bahwa sebagian besar orang

masih menganggap jarak budaya antara pegawai negeri / pejabat negara dan penduduk setempat sebagai masalah penting. Di satu sisi, keadilan merupakan isu utama yang ditentukan sebagai penyebab kerusuhan. Ketika komponen minor dianggap menerima perlakuan yang tiak adil, isu-isu yang umum disebut antara lain isu-isu yang berkaitan dengan perbedaan budaya misalnya masalah dari perlakuan pejabat terhadap Muslim, masalah kekerasan bahwa para pejabat negara berkomitmen kepada rakyat, dan masalah berbagai bentuk ketidakadilan pejabat negara. Isu-isu ini menyebabkan masalah keadilan sangat jelas dan prioritas tinggi. Dengan kata lain, masalah keadilan dalam semua aspek memiliki implikasi yang berkaitan dengan isu etnis dan agama, yang cukup konsisten dengan fakta yang disebutkan bahwa pejabat negara di Thailand Selatan sebagai orang asing. Para pejabat seperti bukan penduduk setempat, mereka tidak mengerti budaya, bahasa, dan agama mayoritas masyarakat di Thailand Selatan.

- Tren Internasional dapat menjadi katalisator intensitas kekerasan di Thailand Selatan, tren internasional menghubungkan perjuangan identitas etnis dan keadilan dengan faktor-faktor agama. Misalnya, laporan Deep South Watch pada tahun 2008 menunjukkan bahwa September merupakan bulan dengan tingkat tertinggi kekerasan, yang juga merupakan bulan Ramadhan. Pada tahun 2009, insiden dari akhir bulan Agustus hingga September juga memiliki kecenderungan meningkat yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan di Thailand Selatan adalah wacana tentang etnisitas, ibu pertiwi, dan agama. Namun, masalah saat ini adalah bahwa pentingnya simbolisme tersebut telah menurun karena wacana tentang penyebab kekerasan yaitu konflik kepentingan pribadi, dendam pribadi, isu-isu politik lokal, kejahatan, dan obat-obatan. Kecenderungan kekerasan selama bulan Ramadhan menunjukkan bahwa dengan "wacana kekerasan dari perjuangan di Pattani adalah perjuangan nyata dari sebuah kelompok individu" untuk ras Melayu,

tanah air Pattani, dan Islam, karena hal ini mencerminkan kecenderungan aksi terorisme luar negeri yang juga meningkat pada periode yang sama. Strategi politik-sebelum-militer, penyelesaian masalah identitas, dan pendekatan damai akan membantu memecahkan masalah konflik di Thailand Selatan dalam jangka panjang.

4.4.1 Analisis Tren Masa Depan.

Dari data situasi di masa lalu dan kini, masa depan situasi di Selatan bisa berspekulasi menurut 4 skenario prediksi, sebagai berikut:

1. *Downward Ladder*

Situasi ini bisa terus menurun, seperti tangga ke bawah. Dalam model ini, situasi kekerasan akan terus menurun untuk jangka waktu sekitar 5-10 tahun, tetapi saat ini, kemungkinan model ini mungkin rendah karena dua faktor: situasi pada tahun 2009 menunjukkan kecenderungan situasi untuk berada di kebangkitan, dan situasi pada awal tahun 2010 Januari-Februari tidak memiliki tren menurun diharapkan. Selain itu, faktor krisis politik di Bangkok dan daerah lainnya telah membuat pemerintah bingung pendekatan untuk menyelesaikan masalah di Selatan dan perhatian pemerintah telah dialihkan ke masalah-masalah di daerah lain, yang beratnya meningkat. Saat ini, sangat mungkin bahwa kekerasan di Selatan akan terhubung dengan konflik politik dan kekerasan di ibukota.

2. *V-Shape Trend*

V-Shape Trend dengan penurunan pada tahun 2007-2008 dan spike langsung pada tahun 2010. Meskipun kekerasan memiliki kecenderungan untuk menurun dan menurun menjadi lebih besar pada tahun 2009, kemungkinan bahwa kekerasan akan memiliki kenaikan langsung sebagai Trend V-Shape mungkin agak kecil. Salah satu faktor penting adalah penindasan kekerasan di Selatan oleh polisi, militer, relawan, dan gaya sipil oleh sektor negara di

daerah itu, dan menempatkan lebih dari 100 miliar baht anggaran plus tambahan 60 miliar baht yang akan datang ke wilayah, yang membuat sulit untuk kerusuhan untuk segera bangkit cara di tahun 2004, kecuali dalam hal yang strategis sangat serius/kesalahan taktis berkomitmen dengan pelanggaran hak asasi manusia atau pemicu parah konflik oleh negara, seperti al -Furqan insiden masjid, menyebabkan situasi untuk meningkat di luar kendali, menyebabkan kerusuhan dalam negeri yang memerlukan intervensi internasional.

3. *U-Shape Trend*

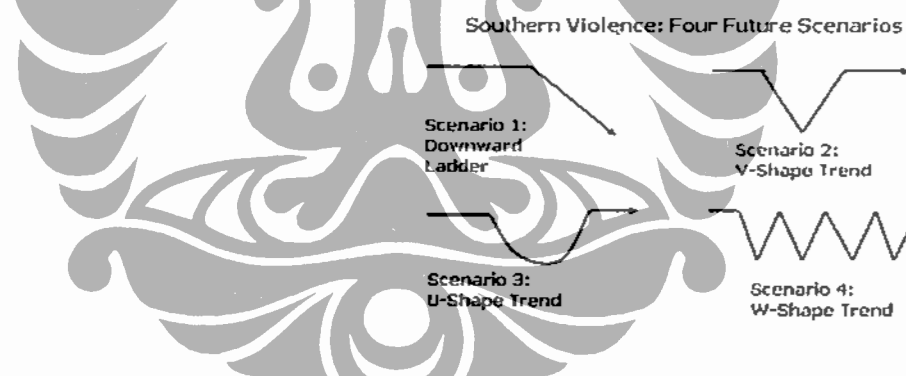
Situasi kekerasan dan kerusuhan bisa menurun seperti yang terjadi pada 2008 dan secara bertahap meningkat sebagai Trend U-Shape. Dalam model ini, situasi kerusuhan tahun 2009 secara bertahap dapat meningkat seperti huruf "U". Kecenderungan tersebut sangat mungkin jika negara hanya berkuat pada upaya militer tetapi tidak dapat memperhatikan masalah struktural dan masalah dasar seperti masalah identitas Muslim Melayu, masalah keadilan di semua sisi, isu kemiskinan dan kurangnya pengembangan SDM di Thailand Selatan, dan isu dalam politik dan pemerintahan. Masalah tersebut adalah faktor yang mendukung bagi kelangsungan konflik dan kekerasan. Para agen dari para pemberontak dan gerakan bawah tanah masih akan bergantung pada hal-hal ini untuk melayani sebagai prasyarat dalam perluasan kekuatan dan penciptaan situasi kekerasan, di mana perubahan taktis yang mungkin dilakukan untuk memungkinkan untuk jangka panjang eskalasi kekerasan.

4. *W-Shape Trend*

Situasi ini bisa naik dan turun secara bergantian, seperti sebuah zigzag. Thailand Selatan akan tetap menjadi daerah kekerasan dan kerusuhan akan tetap ada untuk waktu yang lama dan mungkin naik dan turun secara bergantian, yang bisa baik dalam bentuk kekerasan konstan, atau sebagai Trend W-Shape. Kecenderungan untuk model ini dapat terjadi adalah tinggi seperti dalam model 3,

penyelesaian masalah dengan kekuatan militer, mengontrol daerah dengan langkah-langkah hukum khusus seperti UU Martial dan Keputusan Administrasi Publik dalam Situasi Darurat dapat mengurangi kekerasan pada tingkat tertentu, tetapi masih akan ada masalah pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpuasan penduduk setempat. Tindakan hukum dan ditambah dengan pembangunan dengan komitmen anggaran ke daerah, dapat membantu untuk menarik orang untuk menjadi puas dan mengendalikan eskalasi masalah, tetapi kurangnya solusi untuk masalah struktural dan mendasar, serta kesalahan sesekali oleh para pejabat, tetap menjadi faktor risiko dan prasyarat bagi keberadaan konstan kekerasan, yang memungkinkan para pemberontak untuk menciptakan prasyarat bagi perjuangan yang dapat memungkinkan munculnya kembali kerusuhan.

Gambar 4.1
Pola Skenario Prospek Konflik di Thailand Selatan



Para pejabat keamanan negara dapat memilih model ke 4 dengan menggunakan kekuatan militer tanpa negosiasi, tanpa reformasi politik, administrasi, maupun perubahan dalam masyarakat. Sementara itu, anggaran pembangunan proyek dapat digunakan untuk "membeli hati" beberapa orang dan memperpanjang waktu untuk membiarkan penghasut layu sendiri. Namun, pendekatan ini penuh risiko dan masalah baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ada resiko bahwa situasi akan menjadi seperti model 2, dan jika kesalahan itu dibuat, situasi akan

meningkat dan menjadi insiden internasional. Sisi lain risiko dalam perpanjangan waktu dimana uang sebagai biaya keamanan akan terus menjadi sangat tinggi dan, sehingga ada kemungkinan yang sangat besar pihak militer akan ditekan secara politis. Penggunaan anggaran dan perpanjangan konflik akan menjadi boomerang bagi pihak militer karena dapat saja dituduh mencari keuntungan dari konflik tersebut serta akan menimbulkan masalah ketidakpercayaan, seperti yang terlihat dalam kasus GT-200 detektor bom dan penggunaan sejumlah besar anggaran dalam pembelian balon, menyebabkan militer menjadi target pengawasan sosial sangat berat di masa depan.

Dorongan kekerasan di Thailand Selatan telah menciptakan sebuah wacana politik, yang merupakan kekuatan untuk secara bertahap mengubah pemikiran orang-orang Thailand dan para pengambil keputusan politik di Thailand saat ini. Pemberontakan adalah bagian dari kekerasan politik dan hampir tidak pernah berevolusi menjadi perang sipil atau penggunaan kekerasan terhadap negara. Para pemberontak, dengan konstituen di masyarakat, menggunakan taktik perjuangan bersenjata secara bergantian dengan perjuangan politik. Wacana utama dalam perjuangan di Thailand Selatan yang mengarah pada kerusuhan antara lain adalah politik identitas yang berhubungan dengan sejarah, etnisitas, dan agama. Masalah lain yang menyawa dan mengkatalisasi kekerasan adalah masalah ketidakadilan, kurangnya kesempatan dalam pembangunan, dan kemiskinan. Kenyataan rumit adalah bahwa kadang-kadang konflik pribadi, konflik politik lokal, kejahatan, dan masalah narkoba ditarik untuk menjelaskan kekerasan terus-menerus, yang merupakan alasan mengapa pihak berwenang sedang berusaha untuk membangun sebuah wacana baru pada pelaku kekerasan bukannya "pemberontakan" istilah, yang merupakan upaya untuk membuat gambaran kekerasan dalam bentuk baru dalam rangka untuk

memudahkan makna dari wacana aslinya tentang perang pemberontakan dan pemberontakan.

Dengan kata lain, pembentukan gambaran kekerasan baru dibuat untuk mengurangi makna kekerasan perlawanan dalam bentuk politik identitas. Namun, formasi diskursif tentang kekerasan pemberontak telah menjadi jenis kekerasan yang tampak nyata dan berlangsung lama, karena telah menjadi bagian penting dari realitas politik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar orang di Thailand Selatan selama bertahun-tahun.

Penciptaan gambaran baru bahwa kekerasan yang terjadi merupakan konflik pribadi, kepentingan, dan kekerasan serta obat-obatan, mungkin merupakan upaya menyangkal sisi lain realitas yang berlangsung di daerah tersebut dengan menggunakan istilah baru, penjelasan baru dan sentimen baru. Namun, kekerasan adalah kekerasan. bentuk baru gambaran kekerasan tidak dapat dibangun hanya dengan narasi terencana, tetapi juga membutuhkan praktek diskursif tentang realitas kekerasan yang muncul dalam hubungan sosial-politik yang pasti.

Berdasarkan data dari National Intelligence Agency (NIA) Thailand, jumlah kekerasan dan teror selama tahun 2009 mencapai 733 kasus dan korban meninggal sebanyak 371 orang, sedangkan pada periode Januari-September 2010 terjadi tindakan teror sebanyak 618 kasus dan korban meninggal sebanyak 294 orang. Meskipun jumlah kekerasan dan korban tewas menurun pada tahun 2010, namun strategi, taktik dan kualitas penyerangan dari kelompok separatis semakin berkembang dan meningkat. Target-target penyerangan masih ditujukan kepada pegawai pemerintah dan kerajaan, khususnya tentara, namun demikian tokoh-tokoh seperti pemuka agama dan pejabat tinggi negara tidak lepas juga dari target penyerangan.

Pada 25 oktober 2010, bertepatan dengan peringatan 6 tahun peristiwa Tak Bai, terjadi peristiwa pengeboman sebanyak 17 kali di wilayah Thailand Selatan (13 di Narathiwat, 2 di Pattani dan 2 di

Yala), yang mengakibatkan 13 orang tewas dan 25 orang luka-luka. Sebagian besar bom yang meledak tersebut diletakan sebagai perangkap di tempat-tempat perkebuan karet dengan target para pekerja, sedangkan sebagian bom lainnya di tujukan kepada pegawai/aparat pemerintah yang sedang melaksanakan tugas.

Mencermati data tersebut, maka diperkirakan aksi kekerasan dan teror di wilayah Thailand Selatan akan tetap terus terjadi di masa mendatang, mengingat tingkat kepercayaan masyarakat Muslim Pattani terhadap keseriusan pemerintah Kerajaan Thailand untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sangat rendah. Disamping kultur masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Thailand Utara, laju pertumbuhan dan pembangunan di wilayah Selatan relatif lebih tertinggal, sehingga semakin memunculkan gerakan-gerakan perlawanan Muslim Pattani yang menginginkan terbentuknya negara Pattani terpisah dari pemerintahan Kerajaan Thailand.

Meskipun selama ini belum ditemukan keterkaitan antara gerakan separatis Pattani dengan kelompok-kelompok teroris luar negeri, namun mereka bisa saja berkolaborasi di masa mendatang, mengingat salah satu tokoh Ji (Jamaah Islamiyah), Hambali pernah menjadikan negara tersebut sebagai tempat persembunyiannya sewaktu melarikan diri.

Terkait dengan Indonesia, selama ini banyak pelajar/mahasiswa Muslim dari wilayah Thailand Selatan yang menempuh kuliah di beberapa kota, seperti Bandung dan Yogyakarta, terbuka kemungkinan untuk melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok radikal baik di Indonesia maupun di Thailand Selatan.

4.5 Manajemen Konflik

Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua memiliki

orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan problem-solving approach. Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng. Tahapan-tahapan tersebut dapat diterapkan pada konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan.

Tahap I : Mencari De-eskalasi Konflik

Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (entry point) proses resolusi konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.

Kajian tentang entry point ini didominasi oleh pendapat Zartman tentang kondisi "hurting stalemate". Saat kondisi ini muncul, pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk menerima opsi perundingan untuk mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat. Namun, tesis ini ditolak oleh Burton yang menyatakan bahwa "*problem-solving conflict resolution seeks to make possible more accurate prediction and costing, together with the discovery of viable options, that would make this ripening unnecessary*". Dengan demikian, entry point juga dapat diciptakan jika ada pihak ketiga yang dapat menurunkan eskalasi konflik. De-eskalasi ini dapat dilakukan dengan melakukan intervensi militer yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga internasional berdasarkan mandat BAB VI dan VII Piagam PBB.

Pada kondisi "Hurting Stalemate" pihak pemerintah Thailand dan pihak Muslim Pattani dengan bantuan mediasi dari pihak ketiga dapat memulai proses negosiasi dengan catatan dari kedua belah pihak memiliki itikad untuk

berdamai dan pemerintah Thailand pun harus memiliki "*political will*" untuk menggandeng wilayah Thailand Selatan.

Tahap II: Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik

Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik. Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip *mid-war operations*. Prinsip ini yang merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90-an, mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Dengan demikian, bentuk-bentuk aksi kemanusiaan minimalis yang hanya menangani masalah defisiensi komoditas pokok (*commodity-based humanitarianism*) dianggap tidak lagi memadai. Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang (*entry*) diadakannya negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (*political settlement*) antara aktor konflik.

Pada tahapan ini diharapkan elite politik dari kedua belah pihak telah berunding dengan baik, dan dari pihak pemerintah Thailand pun harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat aksi-aksi kemanusiaan sehingga memberikan image bahwa pemerintah benar-benar berusaha untuk menciptakan perdamaian.

Tahap III: Problem-solving Approach

Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah *problem-solving* yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi. Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai

pemahaman timbal-balik (*mutual understanding*) tentang cara untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik.

Aplikasi empirik dari problem-solving approach ini dikembangkan oleh empat komponen utama proses problem-solving. Komponen pertama adalah masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. Komponen kedua adalah masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik. Komponen ketiga adalah kedua belah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan signal-signal perdamaian. Komponen terakhir adalah problem-solving workshop yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan proses (tidak langsung mencari outcome) resolusi konflik.

Dalam kasus konflik di Thailand Selatan, tahap problem Solving Approach adalah tahap dimana pemerintah memiliki peranan penting untuk mengenyampingkan kebijakan-kebijakan yang cenderung bersifat diskriminatif dan asimilatif statis, pemerintah harus mampu menunjukkan itikad baik untuk merangkul warga Muslim Pattani.

Tahap IV: Peace-building

Tahap keempat adalah peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Kajian tentang tahap transisi, misalnya, dilakukan oleh Ben Reily yang telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik. Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses yaitu: (1) pemilihan bentuk struktur negara; (2) pelimpahan kedaulatan

negara; (3) pembentukan sistem trias-politica; (4) pembentukan sistem pemilihan umum; (5) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik; dan (5) pembentukan sistem peradilan.

Tahap kedua dari proses *peace-building* adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut

Tahap terakhir dari proses *peace-building* adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah "*Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem*". Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan.

Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini⁸⁷. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik. Sistem peringatan dini ini juga dapat dijadikan tonggak untuk melakukan *preventive diplomacy* yang oleh Lund didefinisikan sebagai: "*preventive diplomacy, or conflict prevention, consists of governmental or non-governmental actions, policies, and institutions that are taken deliberately to keep particular states or organized groups within them from threatening or using organized violence, armed force, or related forms of coercion such as repression as the means to settle interstate or national political disputes, especially in situations where the existing means cannot peacefully manage the destabilizing effects of economic, social, political, and international change*".

⁸⁷ Andi Witjajanto, *Early Warning System*. Jakarta: 2001

Kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat eskalasi konflik. Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental Organisations (NGOs), mediator internasional, atau institusi keagamaan

Keempat tahap resolusi konflik tersebut harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan disatu tahap akan berakibat tidak sempurnanya proses pengelolaan konflik di tahap lain. Tahap-tahap tersebut juga menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir. Perdamaian memerlukan upaya terus menerus untuk melakukan identifikasi dan eliminasi terhadap potensi kemunculan kekerasan struktural di suatu komunitas.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Integrasi sosial merupakan faktor terpenting dalam membangun suatu negara. Dengan integrasi sosial itu akan menimbulkan rasa nasionalisme antar etnik. Menurut James G Kellas, nasionalisme membangun kesadaran rakyat sebagai sebuah bangsa serta memberi seperangkat sikap dan program tindakan. Tingkah laku seorang nasionalis selalu berdasar pada perasaan menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara ("nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Thailand bukanlah berdasar pada perasaan menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa ataupun mewujudkan suatu identitas bersama. Pemaksaan yang dilakukan oleh seorang Phibul Songkram bukanlah suatu kebijakan yang nasionalis, justru kebijakan yang anti-nasionalis. Kebijakan ini tentu saja memecah belah negara Thailand, identitas nasional bukanlah identitas satu masyarakat saja, namun juga harus melihat masyarakat yang lain dan hal tersebut tidak dapat dipaksakan.

Upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam lima tahun terakhir, dengan terbentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional yang mengantarkan dan memediasi perdamaian di Selatan. Kuatnya peran tentara di Thailand, membuat banyak rekomendasi komisi tidak bisa dijalankan. Pendidikan, pekerjaan dan fasilitas pemerintah lainnya tetap saja tidak leluasa dinikmati bagi Muslim Melayu. Persyaratan pemakaian ketat bahasa nasional Thai dan sikap yang mencerminkan nasionalisme –pro kebijakan pusat– menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah dilakukan baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komisi rekonsiliasi. Kehadiran masyarakat internasional, antara lain Nahdlatul Ulama yang menjembatani ulama di Thailand Selatan dan pemerintah- kerajaan Thailand akan banyak membuahkan hasil jika pemerintah pusat mengakomodasi gagasan dan

harapan Muslim Melayu di Selatan, yaitu penggunaan tradisi Muslim Melayu lebih terbuka, dan pengakuan pemerintah pusat atas tradisi ini, khususnya di Pattani, Yala, dan Narathiwat.

Dapat disimpulkan, tumbuhnya sikap anti pemerintah pusat yang dilakukan oleh Muslim di Selatan Thailand diakibatkan banyak hal. Kesenjangan ekonomi menjadi kunci atas terus berlangsungnya gerakan 'separatisme' atau dalam istilah David Brown sebagai 'separatisme etnis' atas dominasi kolonialisme internal Thailand. Kesenjangan ini telah berlangsung puluhan tahun. Akibatnya, masyarakat Muslim yang mendapat tekanan politis dan keamanan dari pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Sebagian dari mereka secara diam-diam mendukung gerakan anti-pemerintah. Bahkan beberapa di antara mereka aktif terlibat dalam aksi kekerasan. Konflik di Thailand Selatan berpotensi besar akan tetap berlanjut jika pemerintah masih tetap menggunakan pendekatan sekuritas dengan kekuatan militer tanpa diimbangi dengan upaya-upaya non militer untuk merangkul masyarakat Muslim Pattani di Thailand Selatan. Selain itu konsep asimilasi statis yang diterapkan oleh pemerintah Thailand harus dirubah menjadi konsep asimilasi dimana masih terdapat adanya penghargaan dan toleransi terhadap agama dan kebudayaan etnis Muslim Melayu di Thailand Selatan.

5.2 Saran

Berbagai pilihan solusi muncul untuk mengatasi konflik di Thailand Selatan. Namun bila kita lihat pilihan-pilihan tersebut dapat dibagi dua yakni short-term dan long-term solution. Penyelesaian konflik secara cepat, menurut saya sangat sulit dicapai, memang terlihat pesimis namun permasalahannya konflik ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi semakin kompleks. Solusi-solusinya antara lain:

1. Peningkatan hubungan kerjasama antara pemerintah Thailand dengan negara tetangga, terutama Malaysia, dalam rangka keamanan di perbatasan.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di selatan Thailand merupakan elemen penting untuk mengurangi konflik

3. Komitmen yang tinggi terhadap hak asasi manusia, militer dan polisi bekerja-sama dalam memberantas pemberontak atau teroris namun harus tetap mengacu kepada hak asasi manusia.
4. Kebebasan yang diperuntukkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bebas.
5. Kebebasan untuk beragama.
6. Diberikannya kursi keterwakilan yang diberikan kepada masyarakat Melayu-Muslim dalam badan legislatif.
7. Pembuatan forum bersama antara pemerintah Thailand dengan salah satu wakil dari gerakan separatis untuk menyelesaikan konflik.
8. Pendekatan yang holistik dari berbagai aspek kehidupan yang di terapkan dalam kebijakan yang mengandung prinsip keadilan bagi kehidupan masyarakat Muslim Pattani.

Dalam rangka ikut menciptakan keamanan regional wilayah Asia Tenggara, Indonesia hendaknya mampu berpartisipasi aktif dalam upaya penyelesaian konflik di wilayah Thailand selatan. Hal ini juga akan merendam potensi dimanfaatkannya wilayah konflik di Thailand Selatan sebagai jejaring terorisme internasional.

PUSTAKA RUJUKAN

Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Abidin, Zainal, dan Marcham Darokah. (1999). *Prasangka Rasial dan Persepsi Agresi Sosiohumanika*, 12 (3):.
- Cohen, A. (1974). *Two-dimensional Man*. London: Tavistock.
- Furnivall, J.S. (1938). *The Netherlands Indies: A Study in Plural Economy*.
- Geertz, Clifford (1963) "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States" , Geertz (ed) "Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa" The Free Press.
- Robert Gurr, Ted , (1970) *Why Men Rebel*, Hugh Davis Graham, Violence In America (U.S. Government Printing Office, Bantam Books, and Praeger, 1969; Sage Publications, 1979.
- Islam, Syed Serajul. (1998). "The Islamic Independence Movements in Patani of Thailand and Mindanao of the Philippines", *Asian Survey*, 38.
- Islam, Syed Serajul. (2000). *The Liberation Movement of the Muslims in Thailand*, *Asian Profile*, 28, 5 October 2000.
- Oberschall, A. (1978). *Theories of Social Conflict: Annual Review of Sociology Vol. 4*, pp. 291-315.
- Rabasa, Angel M. (2003). "Political Islam in Southeast Asia: Moderates, Radicals and Terrorists", *Adelphi Paper*, 358.
- Rahimmula, Chidchanok. *Peace Resolution: A Case Study of Separatist and Terrorist Movement in Southern Border Provinces of Thailand*, in S. Yunanto, et. Al. (2003). *Militant Islamic Movements in Indonesia and Southeast Asia*. Jakarta: FES and The RIDEP Institute.
- Suryadinata, Leo. (1999). *Etnis Cina dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Wrigings, Howard, in Yahya Muhaimin, and Colin Mac Andrews. (1995). *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Zartman, I. W. (2000). *Mediation in Ethnic Conflicts*. Center for Development Research. Bonn

Buku

Adler, P. S. (2000). *Natural Resources Conflict Resolution: Water, Science, and The Search for Common Ground*. 1st Australian Natural Resources Law and Policy Conference. Canberra

Anderson, B. (1991 [1983]) *Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, 2nd Ed. London: Verso.

Azra, Azyumardi. (2002). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara*. No. 5. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Berger, Peter, and Thomas Luckman. (1996). *The Social Construction of Reality*. Garden City NY: Anchor Books.

Brewer, M.B., & N. Miller. (1996). *Intergroup Relation*. Buckingham: Open University.

Brehm, S.S., & S.M. Kassim. (1994). *Social Psychology*. Boston: Allyn and Bacon.

Brown, David. (1994). *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia*. London: Routledge.

Castells, Manuel. (2002). *The Power of Identity*. USA: Blackwell Publishing.

Duverger, Maurice. (2003). *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Geertz, C. & D. Apter, eds. (1969). *The Old Societies and New States*. Chicago: Aldine Publications.

Gellner, E. (1983). *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell.

Gilquin, Michael. (2005). *The Muslims of Thailand*. Thailand: Silkworm Books.

Haralambos, Michael, and Martin Holborn. (2004). *Sociology: Themes and Perspective*. New York: Harper Collins.

- Hobsbawm, Eric. (1990). *Nation and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kymlicka, Will. (1995). *Multicultural Citizenship*. New York: Oxford University Press.
- Malek, Mohd. Zamberi A. (1994). *Patani Dalam Tamadun Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- May, Stephen. (2004). *Ethnicity, Nationalism and Minority Rights*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McAlister, John T. (1973). *Southeast Asia: The Politics of National Integration*. New York: Random House.
- Pitsuwan, Surin. (1985). *Islam and Malay Nationalism: A Case Study of Malay-Muslims of Southern Thailand*. Bangkok: Thai Khadi Research Institute, Thammasat University.
- Rudy, May T. (2002). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika.
- Saifuddin, A.F. (2005). *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritik Mengenai Paradigma*. Jakarta: Prenada-Media.
- Smith, A.D. (1986). *The Ethnic Origin of Nation*. Oxford: Blackwell.
- Soekarno. (2000). *Islam Nasionalisme Marxisme*. Yogyakarta: Pustaka Kendi.
- Syamsuddin, Nazzarudin. (1994). *Integrasi dan Ketahanan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Lemhanas.
- Turner, V. (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago: Aldine Publications.
- Unknown. (2000). *Thailand into The 2000's*. Bangkok: National Identity Board, Office of the Prime Minister, Kingdom of Thailand.
- Wyatt, David K. (2003). *Thailand: A Short History*. London: Yale University Press.
- Wyatt, David K. (2007). *The Politics of Reform in Thailand*. London: Yale University Press.

Widjajanto, Andi. (2001). *Early Warning System*. Jakarta.

Tesis dan Penelitian Sebelumnya

Purwaningsih, Endang. (2005). *Pembinaan Bela Negara dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa*. Tesis Pascasarjana PKN UI.

Sihbudi, Riza. (2003). *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara*, Puslitbang Politik LIPI.

Website

<http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand>

<http://www.eramuslim.com/berita/gerakan-dakwah/derita-muslim-pattani-yang-terlupakan.htm>

<http://www.ccc.nps.navy.mil/sj/2005/Feb/croissantfeb05.asp>

<http://republicofpattani.tripod.com/bm/>

www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1344.ch9

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/03/Bentara/1363295.htm>.

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6891&coid=4&caid=33&gid=